

*Refleksi Jiwa*

# **demonstrasi**



**Indra Kusumah  
M. Ikhlas Thamrin**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MUKADIMAH

Ada kegundahan dalam jiwa memikirkan tentang kebermaknaan hidup ini. Ada kegelisahan dalam diri menyadari perjalanan bangsa yang seolah malah semakin menuju jurang kehancurannya. Gundah dan gelisah ini menuntut terus, tak bisa dibunuh atau pura-pura ditutupi. Ia membutuhkan kanalisasi positif. Ia membutuhkan penyaluran yang bermanfaat.

Maka Saya pun mulai menulis apa yang Saya pikirkan dan Saya rasakan. Mulanya hanya sekedar konsumsi pribadi untuk mengekspresikan suara jiwa atas apa yang terjadi dalam diri sendiri dan di lingkungan. Lama-lama mulai terpikir akan lebih baik jika orang lain pun mengetahui apa yang Saya rasakan dan pikirkan. Mudah-mudahan orang lain merasakan manfaat. Dan memang, kebermaknaan hidup ini adalah ketika bisa memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang.

Beberapa di antara tulisan tersebut tetap menjadi koleksi pribadi dan beberapa dikirim ke media massa. Ternyata tulisan-tulisan tersebut dimuat seperti di Harian

Pikiran Rakyat, Harian Republika, juga di koran kampus “INTERVAL”. Berbagai komentar datang atas tulisan-tulisan tersebut, baik pro maupun kontra. Bahkan ada salah satu tulisan yang menjadi polemik cukup hangat beberapa edisi di media tersebut tentang Gerakan Politik Mahasiswa.

Sebenarnya Saya sangat jarang membuat tulisan, apalagi di tengah padatnya aktifitas kuliah, organisasi, training, diskusi publik, demonstrasi dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Saya menyadari ternyata tulisan-tulisan tersebut sudah cukup banyak dan bisa dibukukan. Sahabat-sahabat terdekat juga ada yang memotivasi untuk membukukan tulisan-tulisan tersebut.

Salah seorang teman Saya, M Ikhlas Thamrin (Presiden BEM UNS), ternyata suka menulis juga, maka kami pun bersepakat untuk mengumpulkan tulisan kami dalam bentuk Bunga Rampai. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Kami berharap kumpulan tulisan ini menjadi dokumentasi sejarah pemikiran dan idealisme aktifis mahasiswa Indonesia awal abad 21, baik yang berkaitan dengan apa yang dipikirkan mahasiswa tentang dirinya, tentang kampusnya, tentang Indonesia dan juga tentang dunia baru yang diidam-idamkan.

Kami berharap kumpulan tulisan ini menggambarkan secara 'seadanya' tentang makhluk bernama aktifis mahasiswa serta bisa memberikan sedikit gambaran tentang pertarungan wacana dan interaksi gagasan dalam dunia kemahasiswaan yang melandasi sikap dan manuver pergerakannya seperti penolakan mahasiswa terhadap kenaikan BBM, penolakan terhadap PT BHMN dll.

Di dalam kumpulan tulisan ini ada "Surat Terbuka Untuk Presiden" yang memang secara resmi dibuat oleh BEM Se Bandung Raya dan berhasil diserahkan langsung ke tangan Presiden RI oleh mahasiswa dalam peristiwa "Pencegatan RI-1" di Gasibu pada tanggal 12 Juli 2005. Surat tersebut memiliki makna yang cukup bersejarah karena ia menjadi titik tolak beberapa kali dialog yang terjadi antara mahasiswa Bandung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden yang semula berjanji akan membuat Surat Balasan kepada mahasiswa akhirnya bersedia berdialog secara langsung di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2005 di Bandara Husen Sastra Negara dan pada tanggal 3 Januari 2006 di RM Sari Sunda. Terlepas dari sejauh mana tindak lanjut SBY atas aspirasi mahasiswa, kesediaan

beliau untuk berdialog dengan mahasiswa merupakan kultur baru yang lebih demokratis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Terima kasih pula kepada Ibunda dan Adik tercinta (Hendi Nugraha) yang menjadi sumber inspirasi. Kepada Mang Agus sekeluarga di Bengkulu dan keluarga di Tasikmalaya, “Terima kasih atas dukungannya”.

Tak lupa kepada Kabinet Progresif BEM KEMA UNPAD (Johan, Yuda, Anet, Ratih, Yudi, Simbar, Faiz, Rinto, Suratno, Rico, Aziest, Komar, Nani, Erisanti dll), Kawan-kawan BEM Se-Bandung Raya (Anas, Farouq, Anam dan Wiyono ITB, Salim, Rusman dan Rizky UPI, Eka, Rizal dan Dimas STT Tekstil, Idan dan Jongga Poltekkes, TW (Tri Wahyu) STT Tekstil, dll), penghuni pondok Shorea, terutama teman sekamar yang setia, Muhamad Iqbal. Tak lupa pula kepada keluarga besar Fakultas Psikologi Unpad, Keluarga besar BEM UNS, Keluarga Besar BPM KEMA UNPAD, serta semua sahabat perjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang secara langsung dan tak langsung memiliki peran dalam penyusunan buku.

Jika dibandingkan dengan kerja-kerja besar merekonstruksi Indonesia, maka kumpulan tulisan ini belum

berarti besar dan belum mencakup seluruh isu yang hari ini digarap pergerakan mahasiswa Indonesia. Oleh karena itu, Kami berharap doa dan masukan konstruktif dari berbagai pihak karena adanya kekurangan merupakan sebuah keniscayaan.

“REFLEKSI JIWA DEMONSTRAN”, demikianlah Saya memberi judul kumpulan tulisan ini karena memang demikianlah adanya. Tulisan ini adalah transkrip dari suara jiwa kami saat gelora aktivisme membuncah dalam dada sehingga kami bergerak dalam bentuk aksi. Kumpulan tulisan ini menjadi saksi bahwa aksi-aksi mahasiswa memiliki basis rasionalitas yang kami anggap kuat di saat itu.

Perjuangan belum usai. Mari ikatkan hati, satukan kata dan harmoniskan langkah menuju Indonesia baru penuh berkah.....

Jatinangor, Oktober 2006

Indra Kusumah

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	vi
Persembahan .....	
Langkah Pasti .....	
<b>MAHASISWA DAN PERGERAKAN .....</b>	<b>1</b>
Konsekuensi Identitas Mahasiswa .....	2
Refleksi Jiwa Demonstran .....	6
Gerakan Moral dan Politik Mahasiswa.....	15
Gerakan Politik Mahasiswa .....	24
Gerakan Intelektual Mahasiswa .....	35
Gerakan Mahasiswa di Negara Dunia Ketiga .....	43
Konstitusional Nirkekerasan .....	50
Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh .....	60
Politisi Mahasiswa .....	77
Oh... Mahasiswa .....	82
Konsistensi Idealisme .....	96
<b>MAHASISWA DAN KAMPUS .....</b>	<b>103</b>
“Ya, Kami adalah KEMA Unpad!!” .....	104
Valley dan Reformasi OSPEK .....	111
Unpad di Simpang Sejarah .....	124
“Dari, Oleh dan Untuk Mahasiswa” .....	137

Libatkan Mahasiswa .....	142
Mahasiswa Unpad, Bersatulah .....	147
Mr “J” (Sebuah Catatan Komersialisasi Pendidikan)	151
Quo Vadis Rektor Unpad? .....	156
Refleksi Akhir Tahun BEM UNPAD .....	168
<b>MAHASISWA DAN NEGARA .....</b>	<b>188</b>
Permasalahan Akut Bangsa Ini .....	189
Agenda Gerakan di Masa Transisi .....	199
Poros Baru Pergerakan Mahasiswa .....	208
Gerakan Mahasiswa dan Pemilu 2004 .....	217
Kontrak Politik dan 100 Hari Pemerintahan SBY ....	226
Surat Terbuka untuk Pak Presiden .....	237
RUU BHP: Tsunami Pendidikan Indonesia .....	245
UMI-ku Sayang, UMI-ku Malang .....	253
Tutup TPST Bojong! .....	261
Tolak Kenaikan Harga BBM .....	269
Detasemen 88 VS HAM di Indonesia .....	277
Mencintai Kembali Indonesia .....	289
Demokrasi Berbasis Nilai .....	298
Evolusioner Akseleratif .....	306
Menuju Kebangkitan .....	313
Darah Juang .....	319
Profil Penulis .....	320
Catatan Khusus .....	323

# PERSEMBAHAN

*Kepada generasi baru yang terasing  
Kepada mereka yang bekerja di tengah sepi  
Kepada mereka yang berkarya dengan penuh  
kesungguhan*

*Kepada jiwa-jiwa muda yang miskin dari keangkuhan dan  
arogansi tapi kaya dengan kesederhanaan*

*Kepada kafilah para pejuang yang sepi dari propaganda  
tapi hingar bingar dengan karya nyata*

*Kepada putra-putra terbaik yang siap melanjutkan estafeta  
perjuangan para pahlawan*

*Kepada orang-orang yang siap menapaki langkah-langkah  
abadi*

*Kepada pemuda benteng kebenaran yang selalu rindu  
tertegaknya kejayaan*

*Kepada pewaris tahta nan gemilang yang menapak tegak  
menyongsong Indonesia baru*

*Kepada Indonesia Muda...*

*Tulisan ini kutujukan*

# LANGKAH PASTI

*Buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota*

*Bersatu padu rebut demokrasi*

*Gegap gempita dalam satu suara*

*Demi tugas suci yang mulia*

*Hari-hari esok adalah milik kita*

*Terciptanya masyarakat sejahtera*

*Terbentuknya tatanan masyarakat*

*Indonesia baru tanpa ORBA*

*Marilah kawan mari kita kabarkan*

*Di tangan kita terenggam arah bangsa*

*Marilah kawan mari kita nyanyikan*

*Sebuah lagu tentang pembebasan*

*Di bawah kuasa tirani*

*Kususuri garis jalan ini*

*Berjuta kali turun aksi*

*Bagiku satu langkah pasti*

**MAHASISWA  
DAN  
PERGERAKAN**

# KONSEKUENSI IDENTITAS MAHASISWA

Oleh : Indra Kusumah

Mahasiswa. Beberapa tahun lalu ketika baru masuk perguruan tinggi, kata itu semula terdengar aneh dan gagah. Dan Saya tersentak ketika menyadari sebutan itu ditujukan kepada Saya, bukan kepada orang lain. sebutan itu mulai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri ini. Ternyata, Saya telah memiliki identitas baru: Mahasiswa!.

Semula, terselip rasa bangga ketika dipanggil mahasiswa. Bagaimana tidak, sekarang Saya bukan sekedar siswa lagi karena ada tambahan “maha” sebelumnya. Lebih dari itu, identitas ini tidak didapatkan dengan tiba-tiba, sim salabim!. Identitas ini didapatkan setelah berjibaku dalam seleksi super ketat melawan ribuan saingan ketika UMPTN/SPMB/Ujian masuk. Sehingga, rasanya tak terlalu salah menganggap identitas mahasiswa sebagai simbol kemenangan para juara.

Tidak hanya itu, mahasiswa mendapatkan berbagai gelar yang menggelegar: “*Agent of change*”, “*director of change*”, “*creative minority*”, “calon pemimpin bangsa” dan lain sebagainya. Berbagai perubahan besar dalam

persimpangan sejarah negeri ini senantiasa menempatkan mahasiswa dalam posisi terhormat sebagai pahlawan demokrasi, bahkan gerakan yang dibangun mahasiswa disebut sebagai pilar demokrasi yang kelima. Mahasiswa menjadi tumpuan harapan bangsa, harapan negara, harapan masyarakat, harapan keluarga bahkan harapan dunia.

Di tengah euforia identitas tersebut, tiba-tiba muncul seberkas kesadaran: ada peran-peran yang harus dilakukan sebagai konsekuensi logis dan konsekuensi otomatis dari identitas mahasiswa. Berbagai istilah menggelegar tersebut menuntut pemilik identitas mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Ada harapan dibalik berbagai sebutan dan julukan untuk mahasiswa. Ya, ada konsekuensi identitas mahasiswa!.

Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi konsekuensi identitas mahasiswa:

**Pertama, Aspek Akademis.** Dalam aspek ini tuntutan peran mahasiswa hanya satu: belajar. Ini sebenarnya merupakan tugas inti mahasiswa karena konsekuensi identitas mahasiswa dalam aspek yang lain merupakan

derivat dari proses pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari *civitas akademika* harus menjadi insan yang memiliki keunggulan intelektual karena itu merupakan modal dasar kredibilitas intelektual.

**Kedua, Aspek Organisasional.** Tidak semua hal bisa dipelajari di kelas dan laboratorium. Masih banyak hal yang bisa dipelajari di luar kelas, terutama yang hanya bisa dipelajari dalam organisasi. Organisasi kemahasiswaan menyediakan kesempatan pengembangan diri luar biasa dalam berbagai aspek seperti: aspek kepemimpinan, manajemen keorganisasian, membangun human relation, tim building dan sebagainya. Organisasi juga sekaligus menjadi laboratorium gratis ajang aplikasi ilmu yang didapat di kelas kuliah.

**Ketiga, Aspek Sosial Politik.** Mahasiswa merupakan bagian dari rakyat, bahkan ia merupakan rakyat itu sendiri. Mahasiswa tidak boleh menjadi entitas terasing di tengah masyarakatnya sendiri. Ia dituntut untuk melihat, mengetahui, menyadari dan merasakan kondisi riil masyarakatnya yang hari ini sedang dirundung krisis multidimensional. Kesadaran ini mesti teremosionalisasikan sedemikian rupa sehingga tidak

berhenti dalam tataran kognitif an sich, tapi harus mewujudkan dalam bentuk aksi advokasi. Dalam tataran praksis, aksi advokasi ini sering bersinggungan dengan ketidakadilan dan otoritarianisme kekuasaan. Menantang memang, namun disitulah jiwa kemahasiswaan seseorang teruji.

Kampus memang bukan merupakan masyarakat sesungguhnya (*real society*), tapi ia merupakan masyarakat semu (*virtual society*) dengan segala kemiripan kompleksitas permasalahan serta struktur sosialnya dengan masyarakat sebenarnya. Oleh karena itu mahasiswa bisa menjadikan kampus sebagai ajang simulasi yang akan menjadi bekal sebenarnya ketika betul-betul terlibat dan terjun ke masyarakat sesungguhnya.

Maka, rasanya belum lengkap menjadi mahasiswa tanpa memenuhi konsekuensi-konsekuensi identitas mahasiswa dalam ketiga aspeknya. Pemenuhan keseluruhan konsekuensi identitas menghantarkan kita kepada kebermaknaan menjadi mahasiswa. Sehingga kita menjadi mahasiswa sebenarnya, dan tidak hanya sekedar mahasiswa!.

Jatinangor, Agustus 2004

# REFLEKSI JIWA DEMONSTRAN

Oleh : Indra Kusumah

*“Jangan kamu perkecil cita-citamu! Karena sesungguhnya  
Aku tidak pernah melihat sesuatu yang mengekang  
seseorang (untuk beraktifitas) kecuali karena ia tidak  
memiliki cita-cita”*

***Umar Al Faruq RA***

Saya memiliki mimpi besar tentang sebuah negara bernama Indonesia: Indonesia yang akan memandu peradaban dunia. Indonesia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia yang menjadi referensi tata nilai keutamaan dan ketangguhan spiritual. Indonesia yang kuat dan disegani.

Mimpi itu ternyata harus bertemu dengan kegundahan dan keresahan jiwa menyaksikan kondisi masyarakat hari ini: Utang luar negeri yang menjadi-jadi, kebodohan meraja lela, kemiskinan mendera, konflik berdarah-darah, kriminalitas meningkat dan krisis demi krisis menghantam. Kalaupun ada kemajuan, kita hanya

maju selangkah, sementara dalam waktu yang sama dunia melaju seratus langkah.

Dan tiba-tiba Saya merasakan ketidakbermaknaan hidup ketika membiarkan itu terus terjadi tanpa sedikitpun peran serta kontribusi untuk mengeliminasinya. Bagaimana mungkin kita hanya terdiam menyaksikan detik-demi detik Indonesia menuju jurang kehancurannya.

Itulah alasan paling mendasar mengapa Saya memilih menjadi aktifis gerakan mahasiswa. Bang Hatta Albanik (Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Unpad) ketika berdiskusi menyatakan, “Salah satu keuntungan menjadi aktifis adalah kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini ketika masih menjadi mahasiswa, yang orang lain mungkin baru bisa melakukannya setelah lulus kuliah”.

Indonesia hari ini menghadapi megaproblem multidimensi. Proyek mengembalikan kejayaan bangsa ini juga merupakan megaprojek kebangkitan yang membutuhkan orang-orang besar karena hanya makhluk tipe ini yang mampu melakukan kerja-kerja besar. Merekalah kaum pekerja (*qaumun ‘amaliyyun*) yang beraktifitas di tengah hening. Sentuhan tangan halus mereka telah, sedang dan akan terus bekerja menataulang

kepribadian bangsa ini. Pada saatnya mereka tampil sebagai generasi baru yang unik dan menyejarah.

Saya ingin menjadi bagian dari generasi harapan ini. Maka di tengah segala keterbatasan Saya harus berbuat. Di tengah segala kekurangan, kerja ini harus dimulai. Jika tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Meskipun sederhana, lakukan. Karena kesempurnaan itu ternyata dibangun dari hal-hal sederhana. Sedangkan kita tahu, kesempurnaan bukan hal yang sederhana.

Kerja sederhana itu bernama belajar: Memperdalam sebuah disiplin ilmu sehingga menjadi spesialis dan mengkaji ilmu-ilmu lain sehingga menjadi generalis. Ilmu adalah rahasia kebangkitan peradaban bangsa ini. Saya mau dan harus belajar dengan menjadi pembelajar sejati!

“Belajar paling baik adalah dengan mengajar”, Demikian kata salah seorang Psikolog pendidikan. Dengan demikian Saya juga tidak boleh hanya mencari ilmu, Saya juga harus menyampaikannya kepada orang lain. Aktifitas yang memungkinkan adalah menjadi guru, mentor, trainer, da'i dan lain-lain. Saya mau dan harus menjadi semua itu, atau minimal salah satunya!

Kerja sederhana itu juga bernama menulis. Pernah ada yang mengatakan kepada Saya, “Seseorang belum bisa dikatakan orang cerdas kecuali ia mampu mengaktualisasikan isi pikirannya tidak hanya secara lisan, tapi juga dengan tulisan!”. Tentu Saja Saya mau menjadi orang cerdas☺. Saya menulis apa yang Saya pikirkan dan rasakan tentang diri dan juga lingkungan.

Tulisan tersebut bisa sebagai konsumsi pribadi. Kalau memungkinkan, tulisan tersebut juga menjadi konsumsi publik dengan dikirimkan ke media masa. Ya Saya mau dan harus menjadi Penulis! Kemauan ini semakin menggelora ketika membaca sebuah hadits, “Ada tiga golongan yang senantiasa mendapat pertolongan Allah SWT, yaitu orang yang berjuang di jalan-Nya, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dan seorang penulis yang senantiasa memberikan solusi”. Saya mau dan harus menjadi ketiganya, tidak dengan minimal salah satunya☺.

Kerja sederhana itu bernama organisasi. Ia merupakan wahana pengembangan diri dalam bidang-bidang yang tak mungkin didapatkan dalam ruang-ruang kelas. Saya belajar mengembangkan leadership skill.

Bukan membangun ambisi menjadi seorang ketua/pimpinan, tapi dengan mengembangkan sikap dan karakter kepemimpinan serta melakukan kapitalisasi social power. Saya juga bisa belajar banyak hal-hal lain yang tak mungkin bisa disebutkan secara detail, tak sedikit yang tak bisa diungkap kata-kata, memang ia hanya bisa dirasakan Sang aktifis. Saya mau dan harus menjadi aktifis!

Kerja sederhana itu bernama demonstrasi. Sang Reformis Sejati bersabda, “Perjuangan paling utama adalah kalimat kebenaran di hadapan pemimpin tiran”. Kalimat kebenaran itu bisa disampaikan berbagai cara, demonstrasi hanyalah salah satunya.

Tidak! Saya tidak boleh mendasari demonstrasi dengan sikap kebencian kepada Sang Penguasa tiran, Saya melakukan dengan penuh cinta untuk menolongnya ketika melakukan kedzaliman.

Muhammad SAW, Sang Reformis Sejati, telah menyadarkan kita ketika beliau bersabda, “Tolonglah saudaramu yang dzalim dan yang terdzalimi!”

Para sahabatnya bertanya, “Kalau menolong orang yang didzalimi itu sudah rasional. Lalu, bagaimana cara menolong saudara yang melakukan kedzaliman?”

“Hentikan kedzalimannya! Itulah cara menolong saudaramu”, jawab sang Reformis Sejati.

Setelah mendengar petuah Sang Reformis Sejati, Saya bertekad menolong orang dzalim dan didzalimi. Saya mau dan harus menjadi seorang demonstran! Itu adalah salah satu cara di antara sekian cara yang bisa Saya lakukan untuk menolong orang-orang yang dzalim.

Pada hakikatnya aktifitas menolong orang lain adalah untuk menolong diri sendiri. Jika kita diam saja melihat kemungkaran sosial, maka bisa jadi adzab turun pertama kali kepada kita.

Dalam sebuah hadits qudsi diceritakan Sang Pencipta memerintahkan diturunkan adzab kepada suatu kaum pelaku kemungkaran. Malaikat bertanya, “Bukankah di dalamnya ada seorang shalih bernama si Fulan?”

“Ya, Justru mulailah adzab itu dari dia, karena wajahnya tidak pernah memerah karena Aku!”, Jawab Tuhan

Hadits tersebut luar biasa. Wajah yang tidak memerah (marah) melihat kedzaliman dan tidak peduli dengan hal itu adalah sikap: yang penting Saya shalih, yang penting Saya tidak terlibat narkoba, yang penting Saya tidak

korupsi, yang penting Saya tidak terlibat pergaulan bebas, yang penting Saya selamat, yang penting Saya tidak melakukan tindak kriminal, peduli setan dengan orang lain mau melakukan itu.

Ternyata sikap diam terhadap kedzaliman, egois dengan kebaikan, hanya shalih secara pribadi dan tidak shalih secara sosial, hanya akan mengundang adzab dan menjadi korban pertama kali. Ternyata perjuangan ini adalah salah satu cara menyelamatkan diri dari adzab-Nya dengan cara menyelamatkan orang lain.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan status mahasiswa, Saya menyadari bahwasanya rakyat telah mensubsidi mahasiswa dalam jumlah yang luar biasa. Seharusnya mahasiswa bayar sampai sekitar 10-18 juta pertahun, namun sebagian besar disubsidi oleh rakyat melalui pajak yang mereka bayarkan. Sungguh merupakan hal yang keterlaluan jika suatu saat rakyat membutuhkan pembela, mahasiswa tidak turun membela masyarakat, padahal selama ini rakyat telah membiayainya. Ini di antara alasan lain mengapa memilih menjadi seorang aktifis.

Saya mau terus mengembangkan diri dalam rangka melakukan kerja-kerja sederhana sebagai kontribusi atas kebangkitan yang merupakan sebuah keniscayaan. Saya yakin masih banyak hal lain yang bisa Saya lakukan. Biarlah sang waktu yang akan menguak rahasia tersebut.

Sepertinya Iwan Fals bisa menggambarkan peta mental para aktifis ketika dia bersenandung:

*Kalau cinta telah dibuang  
Jangan harap keadilan akan datang  
Kesedihan hanya tontonan  
Bagi mereka yang diperkuda jabatan*

*Oo Ya o ya o ya bongkar!  
Oo Ya o ya o ya bongkar!*

*Sabar sabar sabar dan tunggu  
Itu jawaban yang kami terima  
Ternyata kita harus ke jalan  
Robohkan syetan yang berdiri menganggang*

*Oo ya o ya o ya bongkar!*

*Oo ya o ya o ya bongkar!*

*Penindasan serta kesewenang-wenangan  
Banyak lagi... teramat banyak untuk disebutkan  
Hoi hentikan....!! hentikan jangan diteruskan  
Kami muak dengan ketidakpsatian dan keserakahan*

*Di jalanan kami sandarkan cita-cita  
Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya  
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia  
Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta*

Itulah kami, bagaimana dengan Anda?

Jatinangor, Maret 2005

# PENCERAHAN MORAL DAN POLITIK MAHASISWA<sup>1</sup>

Oleh : Indra Kusumah

## **Gerakan Mahasiswa: Resultan Gerakan Politik Nilai dan Gerakan Moral Mahasiswa**

Gerakan moral (*moral movement*), sebuah istilah mempesona yang selama ini disematkan kepada gerakan mahasiswa. Mempesona karena berbicara tentang moral berarti berbicara tentang suara hati yang senantiasa merefleksikan kebenaran universal, menolak segala bentuk pelanggaran HAM, penindasan, kesewenang-wenangan, kedzaliman dan otoriterianisme kekuasaan. Suara hati nurani inilah yang memberi energi konstan dan kontinyu bagi pergerakan mahasiswa. Ya, kekuatan moral (*moral force*) adalah kekuatan abadi yang tak kan pernah mati selama ada manusia yang jujur dengan nuraninya.

Gerakan politik nilai (*value political movement*), istilah idealis lain yang dikaitkan dengan gerakan

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dimuat di rubric OPINI Harian Pikiran Rakyat edisi 24 Juni 2003

mahasiswa. Idealis karena gerakan yang dibangun bukan gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) yang berorientasi kekuasaan seperti partai politik, namun berorientasi terciptanya nilai-nilai ideal kebenaran, keadilan, humanisme (kemanusiaan), profesionalitas dan intelektualitas dalam seluruh aspek pengelolaan negara.

Perpaduan antara gerakan moral dan gerakan politik nilai inilah yang menjadikan gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang murni (*genuine*), unik, luas, lintas sektoral, anti kekerasan dan kontrol sosial yang teramat sulit dikooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan *an sich*. Isu-isu yang diangkat terdiri dari berbagai masalah (politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, keamanan dan sebagainya) secara umum, namun dalam kondisi tertentu bisa menitik lebih spesifik seperti penurunan rezim diktator seperti yang terjadi pada tahun 1966, 1998, 1999, 2001 dan sekarang<sup>2</sup>. Khusus masalah kepemimpinan nasional maupun daerah, gerakan mahasiswa tidak berkepentingan untuk mendukung seseorang menjadi presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Namun siapa pun yang naik ke

---

<sup>2</sup> Tulisan ini dibuat tahun 2003 saat mahasiswa demonstrasi menuntut Megawati mundur

pucuk pimpinan dan tidak menjalankan amanat reformasi akan senantiasa berhadapan dengan gerakan mahasiswa.

Hariman Siregar dalam bukunya 'Gerakan Mahasiswa, Pilar ke 5 Demokrasi' menjelaskan ciri Gerakan Mahasiswa, yaitu:

1. Bersifat spontanitas

Partisipasi mahasiswa dalam gerakan merupakan respon spontan atas situasi sosial yang tidak sehat, bukan atas ideologi tertentu, melainkan atas nilai-nilai ideal. Namun hal ini bukan berarti tidak ada pendidikan publik di kalangan mahasiswa

2. Bercorak non struktural

Gerakan mahasiswa tak dikendalikan oleh suatu organisasi tunggal, termasuk kepemimpinan komando, melainkan bercorak organisasi cair, dimana otonomi masing-masing basis kampus sangat besar. Agenda aksi dibicarakan secara terbuka dan diputuskan serta diorganisasikan secara kolektif.

3. Bukan agen politik di luar kampus

Gerakan mahasiswa bersifat independen dari kelompok kepentingan tertentu, tetapi tidak menutup

kemungkinan ada langkah bersama. ini bisa terjadi lantaran sifat gerakan mahasiswa itu sendiri yang merupakan reartikulator kepentingan rakyat atau gerakan moral

#### 4. Mempunyai jaringan yang luas

Mengingat otonomi masing-masing kampus begitu tinggi, pola gerakan mahasiswa terletak pada jaringan yang dibinanya. Bentuk jaringan menjadi salah satu ciri dari pengorganisasian gerakan mahasiswa. Jaringan yang terbentuk biasanya luwes, sehingga memudahkan untuk bermanuver serta tidak mudah untuk dikooptasi oleh kelompok kepentingan yang bertentangan dengan gerakan moral, termasuk pemerintah.

### **Pencerahan Moral dan Politik Mahasiswa: Titik Tolak Eskalasi Gerakan Mahasiswa yang Masif**

Ada realitas tak terbantahkan yang menunjukkan tidak semua mahasiswa memiliki ketersadaran dan keterlibatan dengan gerakan mahasiswa. Hal ini disebabkan mahasiswa Indonesia terhinggap virus pragmatisme dan apatisme. Di sisi lain, sistem pendidikan

yang berlaku cenderung mendukung tersebarnya virus pragmatisme dan apatisisme karena sepertinya hanya membentuk mahasiswa yang pintar dan terampil serta berorientasi kerja *an sich* untuk memenuhi permintaan pasar. Virus ini telah sukses menggiring mahasiswa ke sisi tragis mahasiswa. Tragis, karena virus ini telah berhasil “membunuh” atau setidaknya “membonsai” karakter khas mahasiswa, yakni idealisme dan daya kritis.

Maka kita menyaksikan mahasiswa yang terasing dari masyarakatnya, berusaha lulus cepat namun hanya untuk mengisi barisan pencari kerja, tidak peduli dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, individualistis bahkan hedonistis! Mahasiswa seperti inilah yang disebut oleh Hariman Siregar dengan mahasiswa mental kerupuk!.

Mereka mungkin tercerahkan secara akademis/intelektual tapi mereka belum tercerahkan secara moral dan secara politik. Tidak, Saya tidak mengatakan mereka tak bermoral ataupun tak berpolitik. Namun moralitas tersebut pasif, tidak memiliki elan vital yang melahirkan gerak, sebagaimana (mungkin), walaupun mereka berpolitik, aktivitas politiknya di dasari anggapan

bahwa politik itu 100% kotor, jijik dan tidak mungkin ada politik yang bersih.

Dari sinilah dibutuhkan sebuah rekayasa sosial yang konseptual dan sistematis untuk melakukan pencerahan moral dan politik terhadap mahasiswa sehingga mereka menyadari tanggung jawabnya yang bukan sekedar tanggung jawab akademis, namun juga tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, tanggung jawab politis serta tanggung jawab kesejarahan. Keseluruhan tanggung jawab tersebut inheren dalam diri mahasiswa seiring berubahnya status dan identitas menjadi mahasiswa. Ya, keseluruhan tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi identitas mahasiswa.

Lebih dari itu, pencerahan moral dan politik ini akan menghidupkan daya kritis dan idealisme mahasiswa dalam menyikapi pelbagai kejadian serta menumbuhkembangkan semangat perlawanan mahasiswa atas pelbagai penindasan, kesewenang-wenangan, kedzaliman, pelanggaran HAM dan otoriterianisme kekuasaan.

Dari rahim kesadaran, daya kritis, idealisme serta semangat perlawanan inilah terlahir gerakan moral mahasiswa. Gerakan ini eskalasinya akan semakin masif

manakala pencerahan moral dan politik yang dilakukan betul-betul konseptual dan sistematis sehingga memiliki daya tular yang cepat dan dahsyat di kalangan mahasiswa.

Dalam tataran praktis, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan akselerasi pencerahan moral dan politik di kalangan mahasiswa. Metode-metode ini telah terbukti cukup ampuh membangun kesadaran dan daya kritis mahasiswa pada masa lalu dan dirasa efektif untuk sekarang. Diantaranya:

1. menghidupkan kembali mimbar bebas di setiap kampus, baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan.
2. menggalakkan forum-forum diskusi tentang berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Forum diskusi ini bisa melakukan kajian berdasarkan pandangan disiplin ilmu tertentu, ataupun interdisipliner yang pesertanya berasal dari fakultas, jurusan maupun universitas berbeda
3. mengintensifkan seminar-seminar tentang gerakan moral mahasiswa
4. menghidupkan pers mahasiswa sebagai sarana komunikasi, aktualisasi dan artikulasi gagasan-gagasan

brilian serta ide-ide cerdas mahasiswa untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan

5. optimalisasi kegiatan-kegiatan pengkaderan di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang diarahkan untuk mencetak kader-kader mahasiswa dan calon pemimpin bangsa yang cerdas, terampil, moralis, religius, kredibel, peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar serta memiliki integritas diri yang diakui.
6. memperbanyak penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan problem-problem nyata di masyarakat
7. membangun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang layak disebut *student government*, yang mandiri dalam menentukan sikap tanpa tekanan birokrat atau pihak manapun

Dengan demikian, akan terbentuk generasi baru mahasiswa Indonesia yang tercerahkan, siap menghadapi masa depan dengan penuh optimisme, pemuda ksatria yang akan mengukir sejarah kejayaan yang mempesona. Sungguh, sejarah sedang menunggu-nunggu langkah-langkah mahasiswa Indonesia yang spektakuler.....!

Seruan menuju pencerahan ini harus segera dikumandangkan untuk membangunkan singa-singa mahasiswa yang sedang tidur. Wahai mahasiswa! Sambutlah seruan TOTALITAS PERJUANGAN ini:

*Kepada para mahasiswa  
Yang merindukan kejayaan  
Kepada rakyat yang kebingungan  
Di persimpangan jalan*

*Kepada pewaris peradaban  
Yang telah menggoreskan  
Sebuah catatan kebanggaan  
Di lembar sejarah manusia*

*Wahai kalian yang rindu kemenangan...!  
Wahai kalian yang turun ke jalan...!  
Demi mempersembahkan jiwa dan raga  
Untuk negeri tercinta*

Jatinangor, Maret 2003

# GERAKAN POLITIK MAHASISWA<sup>3</sup>

Oleh : Indra Kusumah

*Kepada pewaris peradaban  
Yang telah menggoreskan  
Sebuah catatan kebanggaan  
Di lembar sejarah manusia*

.....

Kutipan Lagu “Totalitas Perjuangan” di atas seolah ingin memberitahu kita bahwa sejarah berbagai negara biasanya berbesar hati mengabadikan peran-peran signifikan gerakan mahasiswa dalam berbagai momentum besar negara tersebut. Namun faktanya, tak sedikit bias sejarah yang menjadikannya tak mampu menangkap gelora semangat, gelombang antusiasme dan aura idealisme yang menyertai pergerakannya yang monumental.

Pergerakan mahasiswa. Sebuah istilah yang dari masa ke masa senantiasa disertai diskursus wacana yang tajam mengenai fungsi dan perannya. Diskursus ini menjadi

---

<sup>3</sup> Tulisan ini dimuat di rubrik OPINI kalam Harian Republika edisi Rabu, 15 Desember 2004

urgen karena ia akan sangat berkaitan dengan jati diridan karakter pergerakan mahasiswa itu sendiri.

Perdebatan yang terjadi biasanya dalam mendefinisikan dan mendeskripsikan gerakan mahasiswa, terutama berkaitan dengan karakter pergerakannya, apakah pergerakan mahasiswa adalah gerakan moral atau gerakan politik? Atau kedua-duanya?.

Hariman Siregar (Mantan Ketua BEM UI 1974, tokoh peristiwa Malari) dalam bukunya 'Gerakan Mahasiswa, Pilar ke 5 Demokrasi' bersikukuh bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan moral dan bukan gerakan politik. Kalau sampai gerakan mahasiswa melakukan pergerakan politik, berarti dia telah keluar dari jati dirinya. Oleh karena itu beliau tidak bersepakat dengan gerakan mahasiswa yang bermain di tataran politik seperti menuntut mundur seorang presiden.

Hal yang berbeda disampaikan Rico Marbun (Mantan Ketua BEM UI yang menuntut Megawati mundur), beliau berpendapat Gerakan Mahasiswa justru merupakan gerakan politik dan tidak perlu takut untuk menegaskan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik ekstra parlementer. Gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab

secara politis atas bangsanya yang sedang dalam sakaratul maut, dan mereka dituntut untuk melakukan gerakan politik secara aktif dan masif.

Fajroel Rachman menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai gerakan moral dan gerakan menumbangkan rezim saja, tetapi juga harus merebut dan membangun kekuasaan. Tanpa kekuasaan ini tidaklah mungkin bagi mahasiswa untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Fajroel Rachman bahkan menyarankan sebagian pergerakan mahasiswa mendirikan partai politik dan menjadi bagian gerakan politik intraparlementer dengan terlibat dalam kancah politik formal sebagai elemen mahasiswa.

Pandangan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik inilah yang mendasari keterlibatan aktifis mahasiswa Indonesia sebagai anggota legislatif di DPR-MPR pada awal orde baru, Manuver tersebut ternyata dianggap gagal dan justru menimbulkan konflik internal pergerakan mahasiswa. Selain itu pandangan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik juga mendasari munculnya wacana “potong generasi” dan “Junta Muda Mahasiswa” yang disuarakan beberapa elemen pergerakan mahasiswa

Indonesia. Wacana ini berkembang berkaitan dengan kemungkinan (bahkan keharusan) generasi muda, terutama mahasiswa untuk mengambil alih kekuasaan karena golongan tua yang hari ini memimpin dianggap memilik dosa-dosa masa lalu yang menjadikan mereka gagu dan gagap melakukan reformasi dalam rangka transisi demokrasi.

Perbedaan pandangan tentang karakter pergerakan mahasiswa ini terkadang menajam dan menyebabkan konflik di kalangan aktifis mahasiswa itu sendiri. Para penganut gerakan moral an sich biasanya menuduh aktifis yang melakukan gerakan politik sebagai komparador partai politik tertentu, ditunggangi kepentingan politik tertentu dan lain-lain. Sebaliknya, Para aktifis yang meyakini gerakan mahasiswa bukan hanya gerakan moral, tapi juga gerakan politik biasanya menganggap orang-orang yang tidak terlibat bersama mereka sebagai apatis, apolitis,tidak melek politik dan lain-lain. Konflik-konflik di kalangan mahasiswa seperti ini masih sering terjadi sampai sekarang.

## **Gerakan Politik Nilai VS Gerakan Politik Kekuasaan**

Sebenarnya, ada titik temu di antara dua aliran di atas karena kedua-duanya juga meyakini gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral yang universal. Perbedaan terjadi berkaitan dengan gerakan politik yang dilakukan mahasiswa. Apakah itu sesuai dengan jati diri dan karakter pergerakan mahasiswa?

Perbedaan pandangan di atas menyebabkan mahasiswa terpolarisasi dalam dua kutub yang berlawanan. Karena itu kita perlu melakukan redefinisi paradigma baru pergerakan mahasiswa dalam rangka rekonstruksi jati diri dan karakter pergerakan mahasiswa Indonesia, dan sebagai upaya rekonsiliasi antar kubu sekaligus langkah awal konsolidasi pergerakan mahasiswa Indonesia yang hari ini terkotak-kotak.

Kalau kita menganalisis secara jujur, aktifitas pergerakan mahasiswa seperti demonstrasi, orasi, seminar, kongres, pernyataan sikap, tuntutan dan lain-lain, sebenarnya merupakan aktifitas politik. Semua itu merupakan sarana komunikasi politik lisan dan tulisan. Jadi secara jujur tak bisa dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik. Namun, gerakan politik seperti

apakah yang layak dimainkan pergerakan mahasiswa? Apa yang membedakannya dengan partai politik?

Ada konsep menarik yang akhir-akhir ini mencuat dan Saya melihatnya sebagai alternatif yang cerdas. Hal ini berkaitan dengan mencuatnya konsep Gerakan Politik Nilai (*value political movement*) dan Gerakan Politik Kekuasaan (*power political movement*).

Gerakan Politik Nilai (*value political movement*) adalah gerakan yang berorientasi terciptanya nilai-nilai ideal kebenaran, keadilan, humanisme (kemanusiaan), profesionalitas dan intelektualitas dalam seluruh aspek pengelolaan negara. Sedangkan gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) merupakan gerakan politik untuk mencapai kekuasaan seperti yang dilakukan oleh partai-partai politik.

Gerakan mahasiswa sebagai gerakan Politik Nilai (*value political movement*) ini tidak mempedulikan siapa yang berkuasa, karena siapa pun yang berkuasa akan menjadi sasaran tembak ketika melakukan penyimpangan. Ia tidak berkepentingan mendukung seseorang untuk menjadi penguasa, tapi siapa pun penguasa yang otoriter akan berhadapan dengan gerakan mahasiswa.

Hal tersebut jelas berbeda dengan ketika gerakan mahasiswa menjadi gerakan politik kekuasaan (*power political movement*), karena ia sangat mempedulikan siapa yang berkuasa dan senantiasa berusaha merebut kekuasaan itu, atau berusaha terus mempertahankan kekuasaan itu ketika ia menjadi penguasa atau membela organisasi/partai yang menjadi patronnya ketika menjadi penguasa.

Gerakan politik nilai mahasiswa bersifat independen, tidak mendukung calon penguasa dan tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan atas nama pergerakan mahasiswa, karena dengan demikian fungsi controlnya hilang, selain itu karena akan ada tugas utama mahasiswa yang akan terbengkalai, yakni belajar. Namun, ketika gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik nilai, Gerakan ini lebih memainkan fungsinya sebagai *social control* dan *social pressure* terhadap kekuasaan. Kalaupun gerakan menukik menjadi tuntutan mundur penguasa, itu didasari standar nilai yang jelas bahwa pemerintah sudah tak mampu dan bukan dalam rangka menaikkan seseorang menjadi penggantinya.

Gerakan politik kekuasaan biasanya tidak independen karena kepentingannya sempit: kekuasaan. Jika gerakan mahasiswa menjadi gerakan politik kekuasaan, maka bukan merupakan hal yang tabu untuk mengatasnamakan aktifis gerakan mahasiswa dalam rangka mendukung calon penguasa (seperti yang dilakukan Rico Marbun dkk dengan terang-terangan mendukung Jenderal Wiranto dari Partai Golkar sebagai calon Presiden dalam pemilu 2004), atau masuk ke dalam sistem (seperti para penganut “junta muda mahasiswa”, dan seperti aktifis mahasiswa di awal orde baru yang menjadi anggota parlemen atas nama perwakilan mahasiswa), atau membela penguasa/partai yang merupakan patronnya (seperti CGMI yang membela PKI di tahun 1966).

Saya sepakat dengan pandangan gerakan mahasiswa selain sebagai gerakan moral, juga merupakan gerakan politik nilai dan bukan gerakan politik kekuasaan. Gerakan politik kekuasaan merupakan *area concern* partai politik dan bukan untuk gerakan mahasiswa. Jika ada aktifis mahasiswa yang bermain dalam area tersebut, seharusnya tidak mengatasnamakan gerakan mahasiswa, tapi lebih baik bergabung dalam partai politik. Gerakan politik nilai

memang bersentuhan dengan aktifitas-aktifitas politik, menggunakan berbagai sarana komunikasi politik, dan memiliki target-target politik, tapi bukan berkaitan dengan perebutan kekuasaan.

Memang dengan demikian, gerakan mahasiswa akan tampak seperti koboy pahlawan yang datang ke kota untuk memberantas bandit-bandit dan penjahat. Setelah bandit-bandit itu kalah, Sang Koboy kembali pulang ke padang rumput. Mahasiswa akan turun ketika menyaksikan rakyat terdzalimi oleh bandit-bandit penguasa dan kembali ke kampus untuk belajar setelah rezim itu “dihajar” dan diberi pelajaran.

Lalu, bagaimana sesudah itu? Siapa yang akan memimpin kota sepeninggal sang Koboy? Siapa yang akan memimpin negeri setelah Sang diktator turun?. Di sinilah rumitnya. Yang pasti itu bukan tugas sang Koboy muda, ia masih harus belajar sehingga suatu saat nanti sampai masanya dia memimpin kota. Itu bukan tugas gerakan mahasiswa, ia masih punya tugas akademis dan pembelajaran kaderisasi kepemimpinan di kampus yang menjadikannya siap untuk suatu saat menjadi para

pemimpin masyarakat yang memiliki konsistensi idealisme seperti ketika masih di kampus.

Masalah kekuasaan lebih merupakan tugas partai politik. Gerakan mahasiswa hanya bertanggung jawab mengontrol dan mengawal transisi dan developmentasi demokrasi supaya tetap pada relnya, terlepas dari siapa yang berkuasa. Dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang tidak mungkin untuk berkordinasi dengan partai politik, LSM dll ketika lembaga-lembaga tersebut menjunjung nilai-nilai moral universal seperti gerakan mahasiswa.

Meskipun demikian, ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul dan menggelitik. Mungkinkah terjadi suatu kondisi luar biasa memaksa keterlibatan mahasiswa untuk terjun menjadi para pemimpin negara? Menurut Saya mungkin-mungkin saja, hanya mereka harus siap dengan konsekuensi seperti yang disampaikan Imam Syafi'i : "Apabila orang muda terlalu cepat tampil menjadi pemimpin, maka ia akan kehilangan banyak waktu untuk ilmu!". Meskipun demikian, bukan hal yang mustahil pula seorang muda mengakselerasi kematangannya melalui tradisi ilmiah dan pergolakan social yang kental.

Tugas inti kita sekarang, bagaimana mengoptimalkan keseluruhan peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi intelektual akademisi, fungsi cadangan masa depan (*iron stock*), fungsi agen perubah (*agent of change*) dll. Kata kuncinya adalah menjadi pembelajar sejati, sehingga mahasiswa mampu memiliki kedewasaan yang jauh meninggalkan umurnya dan pandangan-pandangan yang jauh meninggalkan zamannya. Sehingga kita senantiasa siap memenuhi panggilan kehidupan untuk menoreh sejarah kepahlawanan sebagai pemimpin sejati!.

Jatinangor, Nopember 2004

# GERAKAN INTELEKTUAL MAHASISWA

Oleh : Indra Kusumah

## Peradaban Intelektual Bangsa Indonesia

Berapakah jumlah pakar/ahli (biasanya bergelar PhD) dibandingkan jumlah masyarakat di berbagai negara? Ryan Heryansyah Utama, SE., Ak., Msi dalam salah satu makalahnya memaparkan fakta bahwa rata-rata jumlah pakar tiap satu juta orang di beberapa Negara adalah berikut ini:

- Israel : 13.000 pakar
- Eropa : 6.500 pakar
- Jepang : 6.000 pakar
- Rusia : 5.000 pakar
- India : 1.300 pakar
- Mesir : 370 pakar
- Indonesia : 74 pakar

Fakta di atas jelas mengabarkan kepada kita bahwa peradaban intelektual bangsa Indonesia hari ini cukup tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Semakin dekat perbandingan pakar ilmu dengan total masyarakat, biasanya Negara tersebut semakin maju. Oleh karena itu,

tampak jelas perbedaan Indonesia dengan Negara lain dari sisi ketersediaan pakar keilmuan dalam berbagai bidang yang hal itu juga sebanding dengan kemajuan peradaban bangsa itu.

Di Indonesia, realitas masyarakat yang terbelakang secara pendidikan menjadikannya sebagai komunitas yang kurang tercerahkan. Komersialisasi pendidikan penyebab biaya pendidikan yang melangit serta kualitas pendidikan yang rendah semakin mendorong bangsa yang besar ini ke jurang kehancuran.

Kondisi ini lebih diperparah oleh usaha-usaha 'pemeliharaan' kebodohan dan kemiskinan oleh sebagian elit-elit politik yang dilakukan secara '*halus*'. Elit-elit politik seperti ini berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara tersebut karena mereka menuai dukungan politis dengan memanfaatkan kebodohan dan kemiskinan masyarakat.

Realitas tersebut menuntut peran aktif berbagai pihak untuk mengubahnya karena kemajuan sebuah bangsa berbanding lurus dengan tingkat peradaban intelektualnya. Peradaban intelektual tersebut ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

kompetensi ilmu social humaniora yang dijadikan landasan teoritis dan praksis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakatnya.

Kalangan intelektual memiliki tanggung jawab berlipat ganda dalam menunaikan hak bangsa ini karena kapasitas intelektual seseorang berbanding lurus dengan tanggung jawab perubahannya. Mereka adalah kelompok menengah yang memiliki akses ke atas dan ke bawah sehingga sangat memungkinkan menjadi pemicu dan pemacu perubahan social secara signifikan.

### **Peran Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Intelektual**

Mahasiswa merupakan bagian integral dari perguruan tinggi yang dikenal sebagai symbol intelektualitas, maka pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi intelektualnya merupakan tanggung jawabnya secara moral dan secara intelektual. Gerakan mahasiswa juga pada hakikatnya adalah gerakan intelektual karena intelektualitas merupakan ciri khas yang *inheren* dalam diri mahasiswa sebagai kelas menengah terdidik.

Oleh karena itu pergerakan mahasiswa dituntut untuk mampu menunjukkan kadar intelektualnya. Gerakan mahasiswa harus menjadi gerakan ilmiah yang dibangun di atas basis rasionalitas yang tangguh. Gerakan mahasiswa bukanlah gerakan emosional yang dibangun di atas romantisme sejarah masa lalu sekaligus sarana penyaluran agresi gejolak muda.

Merupakan fakta memprihatinkan ketika mahasiswa bergerak untuk membela masyarakat, tapi tanpa penguasaan terhadap wacana yang diusung. Gerakannya seperti orang yang mengalami *sleep walking*, mereka berjalan tapi tanpa dibangun di atas sebuah kesadaran. Masih hangat ingatan kita ketika ada seorang mahasiswa diwawancarai saat menolak sebuah rancangan Undang-Undang, dia berteriak dengan lantang menolak RUU tersebut, tapi gelagapan ketika ditanya wartawan apa alasan penolakan dan bagian mana yang ditolaknya.

Masyarakat hari ini membutuhkan solusi. Oleh karena itu pergerakan mahasiswa dituntut untuk mampu menunjukkan kadar intelektualnya dengan mengajukan alternative-alternatif solutif atas berbagai permasalahan bangsa. Mahasiswa jangan sampai hanya mampu berteriak

menolak tapi tak mampu menyampaikan gagasan brilian ilmiah sebagai alternative solusi. Jangan sampai mahasiswa memberikan kritik 'asbun' (asal bunyi) dan 'asbed' (asal beda), mahasiswa harus mampu memberikan kritik argumentative sekaligus arahan perubahan social yang sistematis dan metodologis.

Masalahnya ada realitas lain yang cukup menyedihkan. Tradisi ilmiah di kalangan mahasiswa belum begitu kuat. Interaksi gagasan secara kontinyu dan intensif belum menjadi menu utama dalam aktifitas keseharian sebagian besar mahasiswa Indonesia. Mahasiswa belum terbiasa untuk melakukan 'pertarungan' gagasan dan 'perkelahian' wacana. Wajar kalau kemudian, pisau analisis yang mereka miliki untuk membedah berbagai permasalahan social masih tumpul karena jarang diasah.

Selain itu tradisi literacy (baca tulis) di kalangan mahasiswa juga belum membudaya secara kuat. Wajar juga kalau kemudian mahasiswa banyak yang 'miskin' wacana, kurang 'melek', 'kurang' sensitif dan 'kurang' tanggap terhadap berbagai kejadian di sekelilingnya.

Ketika tradisi ilmiah lemah, bagaimana mungkin daya kritis intelektual bertumbuh dan berkembang optimal?

Padahal tradisi ilmiah lah yang akan membentuk struktur berpikir ilmiah seseorang. Mahasiswa dituntut untuk memiliki idealisme, berpikir objektif, solutif dan mampu memandang permasalahan secara integral. Mahasiswa dituntut untuk mampu melihat interelasi berbagai persoalan secara komprehensif, kemudian merumuskan konsep dan aksi penyelesaian. Dengan demikian, mahasiswa layak mendapat gelar *creative minority*.

Menurut sebagian orang yang notabene mantan aktifis mahasiswa, kemampuan seperti di atas dinilai semakin berkurang. Justru tak sedikit mahasiswa yang terjebak berpikir pragmatis, oportunistis, subjektif, parsial dan tampak hanya menjadi *problem speaker an sich*.

Seandainya para aktifis pergerakan mahasiswa terbiasa menikmati kondisi gagasan yang senantiasa di drop, apalagi massa dan logistic juga harus di drop, maka nanti yang terlahir adalah *virtual leader* yang tak punya pengalaman memproduksi gagasan, tak mampu menjangkau massa dan tak memiliki daya cipta finansial.

## Menuju Orisinalitas Pergerakan Mahasiswa

Mari berkaca kepada sejarah. Pergerakan mahasiswa dengan eskalasi yang semakin masif senantiasa diinisiasi oleh pergumulan wacana yang panas. Sebagai contoh, pergerakan mahasiswa 1998 yang spektakuler ternyata diinisiasi oleh berbagai kelompok studi mahasiswa yang menjamur beberapa tahun sebelumnya.

Kelompok-kelompok studi tersebut memiliki peran signifikan dalam proses pematangan pergerakan mahasiswa tahun 1998 sekaligus menjadi salah satu factor desisifnya, memang ada factor desisif lain yang tak kalah penting, yakni momentum pergerakan berupa krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 1997.

Hari ini pergerakan mahasiswa seolah mengalami kelesuan. Gerakan intelektual sejati sudah di ujung tanduk, kecuali mahasiswa mampu betul-betul menjadi *creative minority* dengan mengembalikan pergerakan mahasiswa kepada orisinalitasnya sebagai gerakan moral intelektual dan bukan hanya gerakan jalanan.

Ketika mahasiswa mampu membangun gerakan intelektual sebagai kultur pergerakan dengan level yang lebih tinggi, maka pergerakan mahasiswa akan kembali

bersemi dan tampil sebagai gerakan modern. Selain itu, di masa mendatang para aktifis pergerakan mahasiswa akan menjadi pakar-pakar *social engineering* (rekayasa social), menjelma bak stok gagasan yang tidak ada habis-habisnya (*rashidul fikr*) dan menjadi pemicu dan pemacu perubahan social ke arah yang lebih baik.

Dan Indonesia pun akan tampil berwibawa dalam percaturan peradaban dunia .....

Jatinangor, Desember 2004

# **GERAKAN MAHASISWA DI NEGARA DUNIA KETIGA**

Oleh : Indra Kusumah

Potret Perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia seolah tidak bisa dilepaskan dari peran pergerakan mahasiswa. Sejak awal masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, sampai sekarang senantiasa memasukkan pergerakan mahasiswa sebagai elemen signifikan dalam setiap perubahan besar Indonesia.

Menariknya, peran pergerakan mahasiswa senantiasa terkait dengan dinamika dunia politik Indonesia. Pergerakan mahasiswa ternyata tidak bisa dihalangi dengan NKK BKK sebagai upaya depolitisasi kampus dan pengebirian peran politik mahasiswa. Pergerakan mahasiswa masih dianggap wajar terlibat dalam dunia perpolitikan. Hal ini jelas berbeda dengan di negara-negara maju yang sebagian besar masyarakatnya menganggap pergerakan mahasiswa mencampuri urusan politik secara tidak absah dan menyimpang.

Hal ini terjadi karena Indonesia hari ini masih masuk kategori dunia ketiga yang masih terbelakang dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dunia kemahasiswaan di Indonesia sebagai negara dunia ketiga jelas akan berbeda dengan dunia kemahasiswaan di negara-negara yang sudah maju.

Philip G Altbach dalam bukunya '*Student Politics*' menjelaskan fenomena unik tersebut sebagai berikut:

- Negara dunia ketiga sering kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan sebagaimana yang terdapat di negara-negara industri. Dengan demikian akan lebih mudah bagi setiap kelompok yang terorganisir, seperti halnya komunitas mahasiswa, untuk mempunyai dampak langsung atas politik
- Dalam berbagai kasus, mahasiswa terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan sejak awal berdirinya negara menjadi bagian yang diakui dari sistem politik. Mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam politik
- Mahasiswa Universitas di dunia ketiga membentuk suatu elit yang baru mulai dan di banyak negara membangun perasaan bahwa mereka memiliki

kedudukan istimewa. Mereka merupakan anggota sekelompok kecil minoritas yang mempunyai akses bagi pendidikan pasca SMTA dan kesempatan mereka untuk mendapatkan akses bagi posisi-posisi kekuasaan dan kewenangan jauh lebih baik dibandingkan orang biasa (Barkan, 1975)

- Lokasi berbagai Universitas besar di dunia ketiga menambah kemungkinan terjadinya kegiatan kemahasiswaan. Banyak di antara universitas tersebut terletak di ibu kota, dan sebagian besar populasi mahasiswa berada di dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap pusat-pusat kekuasaan. Fakta geografis yang sederhana ini membuat demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan lebih mudah diorganisir dan memberi mahasiswa suatu perasaan bahwa mereka berada pada pusat kekuasaan dan mempunyai akses ke pusat tersebut
- Relatif sedikit negara dunia ketiga yang secara efektif menjalankan sistem politik yang demokratis. Akibat keadaan ini, dan meluasnya persoalan buta huruf serta buruknya komunikasi, mahasiswa sering dianggap sebagai orang-orang yang bisa menyuarakan populasi

yang lebih luas. Sedikit banyak mereka memiliki kewenangan yang melampaui jumlah mereka yang kecil, dan mereka yang memegang kekuasaan sering memperlakukan demonstrasi dan ketidakpuasan mahasiswa secara serius karena alasan ini. Dalam berbagai kasus, demonstrasi mahasiswa yang nampaknya kecil ternyata efektif dalam memobilisasikan gerakan sosial yang lebih besar secara cepat atau mengakibatkan dampak yang mengejutkan bagi penguasa. Sedikit banyak mahasiswa di dunia ketiga bertindak sebagai “hati nurani” masyarakat mereka

- Karena rata-rata mahasiswa di dunia ketiga berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih tinggi di masyarakatnya dibandingkan dengan dengan mahasiswa yang sama di negara industri, maka mereka memiliki dampak tambahan. Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan nasional yang signifikan serta situasi yang berubah ketika sistem pendidikan tinggi berkembang di dunia ketiga, sejumlah besar populasi mahasiswa di banyak negara dunia ketiga datang dengan latar belakang elit perkotaan, dan melalui

keluarganya, mereka mempunyai akses langsung kepada segmen-segmen masyarakat yang kuat

Analisis Philip G Altbach tersebut sebagian besar masih relevan dengan pergerakan mahasiswa Indonesia. Ia cukup menjelaskan efektifitas relatif partisipasi politik mahasiswa Indonesia sampai sekarang, meskipun dalam beberapa hal tidak sesuai karena Indonesia memang memiliki kekhasan tersendiri.

Gerakan mahasiswa tumbuh subur ketika lembaga-lembaga politik yang ada tidak mampu memainkan fungsi dan perannya secara optimal. Partai-partai politik, pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lain di Indonesia belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga proses-proses politik meluber ke jalanan. Di jalanan semua orang mengetahui bahwasanya raja jalanan adalah para demonstran: mahasiswa!.

Pada saat transisi demokrasi yang disertai kemandulan lembaga-lembaga politik yang ada, masyarakat membutuhkan reartikulator aspirasi dan kepentingan masyarakat. Harapan masyarakat biasanya tertumpu ke lembaga akademis (kampus) yang masih dianggap steril dan obyektif dalam memandang masalah.

Harapan masyarakat ini bisa dijawab oleh mahasiswa yang mampu memainkan peran reartikulator aspirasi ini secara optimal ketika gerakannya terorganisir secara rapi dan masif.

Indonesia hari ini memang tidak murni memiliki seratus persen ciri sebagai negara dunia ketiga karena sekarang sedang bertransformasi menuju negara berkembang (lagi). Karena itu pergerakan mahasiswa juga sedang melakukan transisi sehingga mereka sekarang tidak melulu mengurus masalah politik, tapi juga mulai menggarap isu-isu lingkungan hidup, HAM (Hak Asasi Manusia) dan lain-lain.

Ketika suatu saat nanti Indonesia menjadi negara industri dan negara demokrasi yang mantap, maka pergerakan mahasiswa harus siap untuk memainkan peran kesejarahan yang baru karena lembaga-lembaga politik yang ada sudah memainkan fungsinya secara optimal sebagai reartikulator kepentingan masyarakat. Tentu saja bukan berarti mahasiswa meninggalkan ranah politik sebagai area concern pergerakannya, karena pada momentum tertentu bisa jadi sang sejarah memanggil mahasiswa untuk turun tangan.

Di beberapa negara industri, pergerakan mahasiswa masih memainkan peran signifikan dalam perpolitikan meskipun secara tidak langsung. Di Amerika, gerakan penolakan perang Vietnam pertama kali digaungkan masyarakat kampus dan ternyata direspon publik. Gerakan mahasiswa juga berhasil memaksa Presiden Johnson untuk tidak menduduki jabatannya yang kedua kali.

Untuk di Indonesia, pergerakan mahasiswa Indonesia sampai sekarang masih tetap dituntut untuk berpartisipasi dalam dinamika perpolitikan di Indonesia terutama sebagai pengawal reformasi yang dibidani oleh mahasiswa dan sekarang sedang mengalami mati suri. Agenda-agenda reformasi terancam gulung tikar karena status quo berhasil melakukan konsolidasi dan menjadi benteng penghalang reformasi Indonesia menuju masyarakat madani.

Perjuangan masih panjang....

Jatinangor, April 2005

# KONSTITUSIONAL NIR KEKERASAN

Oleh : Indra Kusumah

## **Potret Buram Demonstrasi Mahasiswa Indonesia**

Aksi dan demonstrasi adalah kata yang seolah inheren dalam diri aktifis pergerakan mahasiswa. Eksistensi aktifis pergerakan mahasiswa biasanya diukur dengan “jam terbang” aksi dan demonstrasi yang diikutinya. Bahkan, masyarakat sering mengasosiasikan mahasiswa dengan aksi dikarenakan banyak perubahan besar perjalanan bangsa Indonesia sering terkait dengan demonstrasi mahasiswa.

Dalam psikologi sosial, apa yang sering dilakukan oleh aktifis pergerakan mahasiswa ini disebut aksi kolektif (*collective action*). Aksi Kolektif adalah aksi spesifik yang dilakukan oleh beberapa orang dengan berorientasi terhadap tujuan khusus yang melibatkan perubahan sosial. Dalam hal ini adalah aksi-aksi demonstrasi yang menunjukkan rantai dari aksi kolektif dengan berorientasi terhadap tujuan khusus yang melibatkan perubahan sosial (Oliver, 1989). Kampanye kolektif juga dapat merujuk pada

suatu kejadian tunggal dari aksi kolektif yang menginginkan adanya perubahan.

Collective action juga didefinisikan sebagai: '*A group member engages in collective action anytime that he or she is acting as a representative of the group and the action is directed at improving the condition of the entire group*' (Wright, Taylor and Moghaddam, 1990)

Citra yang terbangun berkaitan dengan demonstrasi di kalangan masyarakat memang bermacam-macam. Namun, tak sedikit di antaranya yang merasa ngeri dengan istilah demonstrasi karena selama ini demonstrasi identik dengan kekerasan. Tak sedikit demonstrasi yang berakhir dengan bentrokan dan kerusuhan. Media massa sering menggambarkan demonstrasi yang disertai dengan darah dan luka, bahkan korban nyawa.

Demonstrasi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia di Makasar merupakan salah satu contoh. Demonstrasi tersebut menjadi perhatian masyarakat luas dikarenakan kekerasan terjadi. Mahasiswa menyandera polisi dan menuntut teman mereka yang telah ditangkap polisi untuk dibebaskan. Namun, polisi justru menanggapi dengan menyerang ke kampus dan melakukan tindakan-

tindakan anarkis terhadap mahasiswa, bahkan sampai menggunakan peluru timah.

Contoh lainnya adalah apa yang terjadi pada tahun 1998 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat untuk meruntuhkan orde baru dan mengusung orde reformasi. Sejarah mencatat momentum tersebut diwarnai dengan anarkisme, luka-luka, darah, air mata, bahkan korban nyawa para demonstran mahasiswa.

Kasus Tanjung Priok pun merupakan contoh demonstrasi yang berakhir dengan pembantaian ratusan manusia oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sejarah demonstrasi buruh, mahasiswa, masyarakat dan sebagainya di Indonesia selama ini seolah identik dengan kekerasan, bentrokan, pentungan, peluru dan hal-hal menakutkan.

Realitas seperti itu menjadikan tak sedikit masyarakat yang anti dengan demonstrasi. Orang tua biasanya melarang anak-anaknya untuk terlibat dalam demonstrasi karena mereka merasa khawatir demonstrasi yang dilakukan akan berakhir dengan kerusuhan. Mereka ketakutan dengan fakta demonstrasi selama ini yang

ditampilkan di televisi, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### **Konstitusional Nirkekerasan**

Fenomena menurunnya citra demonstrasi di kalangan masyarakat merupakan hal yang perlu dicermati karena akan sangat berdampak terhadap efektifitas pergerakan mahasiswa itu sendiri. Apabila masyarakat tidak mendukung aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa, maka itu alamat tamatnya pergerakan mahasiswa karena bukannya mendapat simpati tapi justru mendapatkan antipati masyarakat.

Pada dasarnya paradigma perubahan yang dihusung para aktifis pergerakan mahasiswa adalah konstitusional nirkekerasan. Konstitusional berarti perubahan yang dituntut dan dilakukan pergerakan mahasiswa tetap menghormati dan menghargai konstitusi serta perundang-undangan perundang-undangan yang ada. Dalam aplikasinya pun diusahakan memenuhi proses dan mekanisme legal formal kenegaraan. Nirkekerasan berarti metode perubahan sosial dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan.

Berkaitan dengan aksi kolektif (*collective action*) tanpa kekerasan, dalam bukunya *The Politics of Nonviolent Action* (1980), Gene Sharp mencatat ada sekitar 198 metode aksi nirkekerasan (tanpa kekerasan) yang berhasil dihimpun dari sejarah gerakan politik berbagai belahan dunia. Itu yang tertulis, masih banyak metode yang tidak tertulis melekat dalam budaya masyarakat yang belum ditemukan. Juga, dari ke-198 aksi itu kemungkinan bisa berkembang lebih banyak tergantung kreativitas manusia dalam mengembangkannya sesuai dengan rezim politik yang dihadapinya.

Dalam bukunya itu, Sharp —yang dijuluki sebagai “Machiavelli nirkekerasan” itu—menolak anggapan umum bahwa metode nirkekerasan Gandhi tidak efektif untuk gerakan perubahan praktis dalam gerakan perubahan politik.

Sebaliknya, Sejarah menunjukkan bahwa manusia dengan caranya masing-masing telah melakukan aksi nirkekerasan ketika ditindas oleh rezim berkuasa. Memang sebagian gagal mencapai perubahan politik cepat, tetapi sebagian besar berhasil mengesankan dan luar biasa.

Dari berbagai macam metode aksi, Sharp membagi ke dalam tiga bagian besar menurut derajat intensitasnya: (1) protes, demonstrasi, dan persuasi; (2) nonkooperasi ekonomi, sosial, politik; dan (3) intervensi tanpa kekerasan.

Ketika dengan protes, demonstrasi, dan persuasi, sudah berhasil, metode nonkooperasi tidak dipergunakan. Metode intervensi dipakai hanya sebagai senjata pamungkas, ketika protes, persuasi, nonkooperasi, tidak berhasil.

Metode pertama adalah penyampaian tuntutan dengan jalan komunikasi publik, agar penguasa menanggapi. Komunikasi tidak terbatas verbal, tetapi juga simbolik dan interaktif. Terdapat sekitar 54 metode termasuk di sini, di antaranya pernyataan publik, deklarasi, petisi, slogan, karikatur, poster, leflet, lobi, simbol pakaian, warna bendera, gambar seseorang sebagai protes, doa protes, drama, musik, parade, upacara kematian korban represi, pengiriman deputi perwakilan, duduk di jalan, *walk-out*, dan sebagainya.

Metode nonkooperasi adalah aksi nirkekerasan dengan cara tidak mau kerjasama dengan rezim atau memutus hubungan dengan rezim sehingga kepentingan

rezim terganggu. Sekitar 103 macam metode termasuk di sini. Di antaranya, boikot, penundaan dukungan, mogok, keluar dari lembaga tertentu, tinggal di rumah saja, pergi hijrah, boikot ekonomi, embargo, sanksi ekonomi, menolak mendukung, menolak membantu, memblok komando dan informasi, menolak rapat, menolak dialog, dan sebagainya.

Metode intervensi diambil ketika kedua metode di atas tidak berjalan. Ia sebagai cara terakhir karena di dalamnya memiliki risiko tinggi. Metode ini adalah menekan secara psikologis dan fisik tanpa kekerasan kepada pihak lawan atau penguasa. Terdapat sekitar 41 macam aksi masuk di sini. Di antaranya ialah puasa, mempuasai hari-hari jatuhnya korban, mogok makan, menduduki tempat strategis, membuat alternatif organisasi massa, blokade tempat simbol penindasan, membuka kedok agen rahasia, membebaskan tahanan politik, memutus hubungan penguasa dengan pendukungnya, memojokkan posisi penguasa dari pergaulan internasional, dan sebagainya.

Gerakan sosial biasanya dibentuk dari beberapa kampanye kolektif yang dilakukan oleh sejumlah aktor kolektif yang berbeda yang berorientasi terhadap tujuan umum dari perubahan sosial. Dengan kata lain, beberapa

aksi kolektif membentuk kampanye kolektif dan beberapa kampanye kolektif akan membentuk gerakan sosial. Gerakan itu sendiri bervariasi dalam durasi waktunya, macam dari aksi kolektif yang terlibat dan tingkat organisasi di antara orang-orangnya.

Pamela Oliver (1989) menyatakan bahwa gerakan sosial dapat dicirikan dari : jenis reaksinya, orang-orang yang melakukan gerakan sosial, hal yang ingin diubah dan tujuannya. Kompleksitas dari hubungan yang terjadi di antara komponen-komponen tersebut dapat digambarkan sebagai rantai, dimana suatu aksi kolektif tertentu bisa saja menciptakan suatu peristiwa baru yang akan menimbulkan reaksi kelompok.

Ditinjau dari jenis aksinya, aksi kolektif dapat berupa : *civil action* (yaitu dengan berbicara dengan petugas, melakukan kampanye melalui penulisan surat, penyelenggaraan konferensi pers); *protest action* (yaitu demonstrasi atau *long march*); *obstruction action* (yaitu seperti aksi sabotase, melakukan aksi duduk dan mencegah orang yang ingin menjalankan tugas sewaktu diadakan pemogokan); *violent action* (yaitu kerusuhan dan terorisme).

Pergerakan mahasiswa seharusnya menghindari bentuk-bentuk *violent action* yang dilakukan dengan kekerasan, anarkis, kerusuhan dan teror publik. Sayangnya, masih ada elemen pergerakan mahasiswa yang memiliki pandangan bahwa yang disebut demonstrasi harus disertai bentrokan dengan aparat, demonstrasi seolah tidak terasa heroik jika tanpa dibarengi pentungan, darah dan air mata. Maka bentrokan dengan aparat merupakan salah satu kewajiban demonstrasi!

Aksi-aksi anarkis seperti inilah yang mencederai citra pergerakan mahasiswa sebagai pergerakan moral dan intelektual. Demonstrasi yang digelar menjadi kehilangan ruh moral dan intelektual yang menjadi ciri khas mahasiswa sebagai insan terdidik. Maka wajar jika masyarakat kemudian menjadi antipati pergerakan mahasiswa.

Kinilah saatnya kita menyelamatkan pergerakan mahasiswa Indonesia demi Indonesia baru penuh keadilan!

Wahai mahasiswa! Dengarlah seruan ini:

*Katakan hitam adalah hitam*

*Katakan putih adalah putih*

*Tuk kebenaran dan keadilan*

*Menuju totalitas perjuangan*

*Seluruh rakyat dan mahasiswa  
Bersatu padu berjuang bersama  
Bebekal moral intelektual  
Selamatkan Indonesia tercinta*

Jatinangor, April 2005

# **GERAKAN MAHASISWA PEDULI ACEH<sup>4</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

## **Acehku Sayang Acehku Malang**

Apa yang beda dari tahun baru 2005 bagi bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia, bahkan dunia, menangis menyaksikan serambi Mekah dilanda gempa 8,9 skala richter dan dihantam gelombang Tsunami yang meluluhlantakkan kota dan penduduknya. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia, mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan sampai di atas tiang listrik, rumah-rumah dan perkantoran hancur, ribuan anak menjadi yatim, ribuan wanita menjadi janda. Ya, hari-hari ini hanya ada tangis dan duka nestapa untuk Aceh.

Musibah ini dinyatakan sebagai musibah terdahsyat abad ini. Dunia terperangah melihat dampak luar biasa dari gempa dan gelombang Tsunami yang melanda Indonesia dan beberapa Negara Asia lainnya. Bahkan Menlu AS Collin Powell mengaku ngeri saat menyaksikan langsung

---

<sup>4</sup> Tulisan ini dibuat ketika mahasiswa dan Shafira mengirimkan relawan ke Aceh Januari 2005

kondisi Meulaboh melalui helicopter, padahal ia sudah menyaksikan berbagai kejadian peperangan dan bencana dengan korban tak sedikit di berbagai Negara, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan musibah di Aceh.

Dan tiba-tiba, musibah ini menghentak nurani bangsa dan dunia. Nuansa spiritualitas dan kemanusiaan menyeruak menggedor kesadaran manusia yang selama ini terlena dengan kepentingan diri dan dunia. Individualisme dan dunia menjadi ciut di hadapan kuasa Tuhan Yang Maha Perkasa.

Apakah ini adzab atau ujian? Bagi hamba-hambanya yang shaleh, jelas ini adalah ujian untuk mengetahui mana yang sabar dan mana yang lemah iman. Ini bisa menjadi sarana introspeksi diri dan bangsa bahkan dunia. Ini juga bisa menjadi salah satu bentuk kerinduan Tuhan untuk segera berjumpa dengan hamba-hamba yang dicintai-Nya.

Sedangkan bagi para pendurhaka, jelas ini merupakan adzab bagi orang-orang yang selama ini mengotori Serambi Makah dengan dosa dan maksiat. Ini bisa jadi adzab Tuhan untuk para pelanggar HAM di Aceh,

pembunuh masyarakat tak berdosa, pemerkosa wanita, pengedar ganja dan sebagainya.

Kejadiannya sama: Gempa dan Tsunami, tapi tidak bisa menggeneralisir bahwa itu adzab untuk masyarakat Aceh. Apa dosa bayi dan anak-anak kecil yang ketika mayatnya dijajarkan tampak seperti tertidur dengan lucunya? Apa dosa para da'i yang tak pernah lelah siang malam mengajak masyarakat kepada Sang Pencipta? Yang malamnya penuh kekhusyukan bermunajat kepadanya? Para ulama yang ketika menyaksikan jenazahnya, tampak tersenyum penuh kegembiraan? Bagi orang-orang seperti ini, Insya Allah kejadian ini merupakan ujian, bahkan bentuk kasih sayang Sang Pencipta.

### **Gerakan Mahasiswa: Quo Vadis?**

Gempa dan Tsunami Aceh adalah sepenggal realita yang melahirkan solidaritas umat sedunia. Kejadian ini menjadi perhatian dunia dan lembaga-lembaga internasional. Bantuan mengalir dengan deras dari berbagai penjuru dan dari berbagai kelompok orang, apapun agamanya dan bagaimanapun kondisi finansialnya.

Ketika bergabung dengan FKDF Unpad yang menghimpun dana untuk Aceh di gerbang Unpad Jatinangor, Saya berjumpa dengan seorang pengamen anak jalanan yang bercerita, “Kalau untuk seperti Aceh, Saya juga ikut nyumbang tadi meskipun hanya Rp.500,00!”. Ia juga bersedia bersama kami untuk menghimpun dana di bis yang lewat. Dia bernyanyi dan kemudian dana yang terkumpul diserahkan untuk Aceh. Luar biasa! Saya hampir menangis mendengarnya. Anak jalanan yang sebenarnya mereka juga membutuhkan, ternyata memiliki empati luar biasa untuk saudaranya di Aceh.

Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang jauh lebih beruntung dari anak jalanan tadi? Apakah mahasiswa memiliki kepedulian yang (minimal) setara dengan anak tadi? Apakah mahasiswa Indonesia juga ikut berpartisipasi membantu saudara-saudaranya di Aceh?

Lebih spesifik lagi, pertanyaan ini perlu ditujukan kepada para aktifis kemahasiswaan yang menjadi motor pergerakan mahasiswa di Indonesia, Apa yang telah dilakukan gerakan mahasiswa dengan kejadian ini? Apakah gerakan mahasiswa tetap asyik masyuk dengan

isu-isu politik *an sich*? Dan apa yang sebaiknya dilakukan gerakan mahasiswa berkaitan dengan masalah ini?

Saya sengaja ingin menyoroti gerakan mahasiswa karena kalau mahasiswa secara umum sudah jelas antusiasme mereka untuk membantu saudara-saudara mereka di Aceh. Mereka dengan suka rela mengumpulkan dana, makanan, pakaian layak pakai dan tentunya doa.

Mengapa gerakan mahasiswa? Karena jika pengelolaan isu Aceh ini terorganisir rapi se-Indonesia akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar. Ini memang bukan masalah politik, karena memang terlalu naif jika menganggap gerakan mahasiswa hanya berkaitan dengan masalah politik saja. Gerakan mahasiswa memang sebuah gerakan politik nilai, tapi ia juga adalah gerakan moral, gerakan intelektual, gerakan cinta lingkungan, bahkan gerakan social.

Secara kelembagaan, kita sudah menyaksikan peran-peran mahasiswa secara riil di kampus masing-masing serta di Aceh langsung. Di kampus masing-masing, lembaga kemahasiswaan memiliki *legitimation* power untuk menghimpun dana dari mahasiswa dan mendapat

kepercayaan juga dari masyarakat untuk menyalurkan dana untuk korban bencana.

Dana dan bantuan dari mahasiswa serta masyarakat telah diorganisir secara resmi oleh lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas dan jurusan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), BEM/SEMA Fakultas dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) semuanya telah bergerak. Bahkan bukan hanya lembaga kemahasiswaan intra kampus, elemen ekstra kampus juga bergerak seperti KAMMI, HMI, IMM, PMII dan sebagainya.

Di Universitas Padjadjaran, BEM KEMA Unpad bekerja sama dengan BEM/SEMA Fakultas mengumpulkan dana untuk Aceh, hanya saja dana yang terkumpul diprioritaskan untuk mahasiswa Unpad asal Aceh yang membutuhkan. UKM dan FKDF juga bergerak menghimpun dana dan disalurkan melalui lembaga yang dapat dipercaya seperti BSMI, Media Indonesia dan lain-lain. Beberapa mahasiswa Unpad sudah berangkat sebagai relawan ke Aceh dari berbagai jalur. SAR UNPAD juga mengirimkan relawan ke Aceh.

Pihak rektorat Universitas Padjadjaran memberikan bantuan untuk mahasiswa asal Aceh. Hanya saja belum jelas apakah gratis SPP atau ditanggungkan? Kalau gratis SPP, apakah hanya semester ini saja atau selama kuliah di Unpad? Informasi di kalangan mahasiswa masih simpang siur. Sepertinya, BEM Unpad perlu bergerak mengadvokasi mahasiswa Aceh sehingga mereka mendapat kejelasan dan jaminan bisa kuliah sampai beres di Universitas Padjadjaran.

Di Institut Teknologi Bandung, lembaga kemahasiswaan juga bergerak menghimpun dana dan menyalurkannya. Mereka meminta kantin di ITB bisa gratis khusus mahasiswa asal Aceh. KM ITB mengirimkan relawan ke Aceh dengan dukungan dana juga dari rektorat. Resimen Mahasiswa ITB pun telah mengirimkan relawan dari anggota terbaiknya ke Aceh.

STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) tak mau kalah dalam kebaikan. Mereka mengirimkan relawan dari praja STPDN ke Aceh untuk membantu masyarakat Aceh secara langsung. Hanya saja, ada informasi mereka ditembaki GAM. Kemungkinan terjadi

salah paham, mereka dianggap seperti TNI karena potongan rambut cepak mereka.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengirimkan relawannya ke Aceh. Mereka memasang instalasi air bersih di dekat Rumah Sakit di Aceh sesuai dengan kemampuan mereka. Sebelum pemasangan instalasi air bersih itu, mahasiswa dari BEM UI sempat bersitegang dengan tentara dari Australia yang menolak pemasangan instalasi air bersih itu karena dianggap kurang canggih.

Badan Eksekutif Mahasiswa di Medan mengirimkan relawannya pada awal-awal bencana di Aceh, bahkan Ketua BEMnya langsung ke tempat kejadian. BEM di Yogyakarta juga ada yang mengirimkan relawan ke Aceh. Di Bandung sendiri, mahasiswa dari berbagai kampus bekerja sama dengan Shafira dan Serikat Karyawan Telkom berencana mengirimkan relawan ke Aceh untuk membuat dapur umum dan penyediaan air bersih. Gerakan ini didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Bandung Raya. Sekarang tim advance dari mahasiswa masih berada di Aceh dan Medan.

## **Aceh: Agenda Gerakan Mahasiswa Indonesia 2005**

Semua lembaga kemahasiswaan di Indonesia hari-hari ini memang sudah semua bergerak, hanya saja masih bergerak sendiri-sendiri dan belum terkordinasikan dengan baik dari segi isu dan praksisnya. Maka gerakan mahasiswa perlu merumuskan kebutuhan dan solusi-solusi kongkret yang bisa di lakukan mahasiswa untuk Aceh. Penanggulangan masalah Aceh tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, setidaknya butuh waktu minimal tujuh bulan untuk kembali pulih.

Agenda gerakan mahasiswa haruslah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta kemampuan mahasiswa. Gerakan ini juga diharapkan menjadi sarana aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah. Gerakan ini juga harus mampu bekerja sama dengan semua elemen bangsa karena mahasiswa tidak mungkin bisa bekerja sendirian.

Berikut ini adalah tawaran agenda kepada gerakan mahasiswa Indonesia, baik intra kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia) maupun ekstra kampus (HMI, KAMMI, PMII, IMM, GMNI, FMN, dll). Sudah saatnya gerakan mahasiswa kembali bersatu dan menghilangkan

sekat-sekat yang hari ini menjadikan gerakan mahasiswa terpolarisasi.

Agenda Gerakan Mahasiswa yang dimaksud adalah:

1. Advokasi Mahasiswa Aceh

Gerakan mahasiswa harus memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa asal Aceh yang keluarganya menjadi korban bencana. Pastikan mereka tetap belajar sampai beres di kampus sehingga mereka siap kembali ke Aceh untuk membangun daerahnya. Pastikan mereka mendapat fasilitas SPP gratis dan biaya untuk kehidupan sehari-hari (makan, kostan dll). Kalau perlu, gerakan mahasiswa mendesak Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu mahasiswa asal Aceh.

2. Pengiriman tenaga medik

Pasca gempa dan Tsunami sangat dimungkinkan muncul bencana baru berupa wabah penyakit. Dibutuhkan tenaga medis untuk menangani masalah ini. Mahasiswa fakultas kedokteran, keperawatan dan

Farmasi bisa terlibat dalam masalah ini dengan bimbingan dari dokter dan apoteker.

3. Pendirian Trauma Center

Penduduk Aceh mengalami musibah yang tidak hanya meluluh lantakkan fisik kota dan tubuh, tapi juga mengguncang struktur psikologis mereka. Mereka menyaksikan bencana, melihat mayat-mayat keluarga mereka, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Mereka mengalami stress, depresi dan trauma (post traumatic disorder). Dibutuhkan tenaga psikolog dan psikiater dalam jumlah yang banyak untuk membantu mereka. Mahasiswa Psikologi dan Kedokteran bisa ikut terlibat dengan tetap disupervisi oleh psikolog dan psikiater. Program ini tidak bisa dilaksanakan sendirian. Gerakan mahasiswa harus bekerja sama dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) dan ikatan profesi kedokteran jiwa.

4. Pembangunan instalasi air bersih

Air permukaan di Aceh pasca bencana jelas-jelas tidak bisa digunakan segera karena bercampur dengan air laut dan sisa-sisa mayat manusia serta binatang.

Dibutuhkan tenaga-tenaga ahli teknik untuk membangun instalasi air bersih. Mahasiswa dari Fakultas Teknik bisa berperan dalam program ini. Pengadaan peralatan pembersih air bisa bekerja sama dengan kedutaan besar Amerika Serikat dan Jepang yang memberikan bantuan kepada Indonesia berupa peralatan pembersih air untuk Aceh.

5. Pengiriman relawan guru

Aktifitas pendidikan terhenti di Aceh karena sarana dan prasarana rusak. Kita semua sepakat, pendidikan memainkan peran signifikan dalam pembangunan sebuah daerah, oleh karena itu recoveri aktifitas pendidikan untuk anak-anak Aceh perlu segera dilaksanakan. Dibutuhkan relawan dalam jumlah yang besar untuk mengajar anak-anak Aceh. Mahasiswa dari perguruan tinggi kependidikan dan keguruan (seperti UPI, UIN dll) bisa berperan optimal dalam program ini. Kalau perlu desak pihak Universitasnya supaya ada program pengiriman guru 71esam di Aceh. Bahkan, kalau bisa secara resmi menjadi program Praktek Kerja Lapangan dengan mengajar di

Aceh dan merupakan bagian dari tugas kuliah yang harus dilaksanakan mahasiswa.

6. Program Kakak Asuh

Masyarakat Aceh tidak bisa semuanya serta merta bekerja seperti semula sehingga mereka memiliki penghasilan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mahasiswa bisa menggagas program kakak asuh untuk anak-anak Aceh. Tidak perlu mengadopsi mereka karena akan lebih baik mereka tidak keluar Aceh sehingga tidak tercerabut dari akar budayanya. Mahasiswa hanya mengumpulkan dana untuk membiayai pendidikan adik-adik kita di Aceh. Program ini perlu dikelola secara professional sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada public. Dalam pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan LSM-LSM terpercaya yang memiliki program serupa.

7. Pengiriman Pembimbing keagamaan

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat religius. Pada saat bencana, banyak para ulama dan tokoh agama yang meninggal dunia. Dibutuhkan orang-orang yang memahami agama untuk membimbing masyarakat di Aceh. Mahasiswa yang menguasai ilmu

agama bisa berperan dalam program ini, terutama mahasiswa dari perguruan tinggi keagamaan seperti IAIN, LIPIA, Sekolah Theologi dan sebagainya. Mereka diharapkan memberikan bimbingan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh yang plural.

8. Dapur Umum

Dapur umum masih diperlukan sampai beberapa bulan ke depan, baik untuk masyarakat maupun untuk para relawan. Mahasiswa yang memiliki keahlian memasak atau belajar tata boga bisa berpartisipasi dalam program ini

9. Pemberdayaan struktur pemerintahan

Aktifitas pemerintahan belum bisa berfungsi 100% karena SDM yang minim serta sarana prasarana belum memadai. Mahasiswa Fisip dan mahasiswa kedinasan seperti praja STPDN, AIS, AKMIL dan sebagainya bisa berperan optimal membantu proses pelayanan masyarakat di sana dengan terlibat di pemerintahan daerah sampai desa di Aceh.

## 10. Pemberdayaan ekonomi

Aktifitas ekonomi pasca bencana membutuhkan tangan-tangan professional dan ahli untuk membangun ekonomi masyarakat Aceh. Mahasiswa dari setiap fakultas dan jurusan bisa terjun membantu masyarakat Aceh sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing. Mahasiswa Fakultas Pertanian bisa membantu masyarakat kembali bercocok tanam dengan teknologi pertanian yang melipatgandakan hasilnya, mahasiswa fakultas peternakan bisa mengajarkan teknologi peternakan yang produktif dan memiliki potensi financial yang baik dan sebagainya

## 11. Program lain yang disesuaikan dengan karakteristik dan disiplin ilmu masing-masing dan memberi manfaat untuk masyarakat Aceh. Dan lain-lain.

Ini adalah tawaran agenda untuk mahasiswa Indonesia yang diharapkan mampu memberi kontribusi riil kepada bangsa ini. Mahasiswa Indonesia memang sudah bekerja untuk membantu Aceh dan bangsa ini. Hanya saja sekarang yang dibutuhkan bukan hanya sama-sama bekerja, tapi juga harus bekerja sama secara sinergis

sesama mahasiswa dan juga dengan seluruh elemen bangsa demi Aceh dan Indonesia yang lebih baik.

### **Forum Mahasiswa Peduli Aceh: Wajah Baru Pergerakan Mahasiswa Indonesia**

Tulisan diatas dibuat awal Januari 2005, di tengah kesedihan menyesakkan dada menyaksikan kondisi Aceh. Ternyata apa yang Saya pikirkan seirama dengan pemikiran para aktifis mahasiswa di berbagai kampus.

Akhir Februari 2005 menjadi saksi pertemuan BEM Se-Indonesia di Institut Teknologi Surabaya untuk membicarakan peran aktif dan riil mahasiswa dalam bencana gempa dan Tsunami yang menghantam Aceh. Sayangnya Saya tidak bisa hadir karena tanggal 24-27 februari 2005 ada kongres KEMA UNPAD yang merupakan pelantikan Saya sebagai Presiden BEM KEMA UNPAD.

Sebagai lanjutan dari pertemuan di ITS, pada tanggal 16-17 April 2005 diadakan pertemuan Forum Mahasiswa Peduli Aceh yang dihadiri puluhan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan blue print Aceh versi mahasiswa, sekaligus program-program real yang akan

dilaksanakan di Aceh dalam KKN Bersama Mahasiswa se-Indonesia di Nanggroe Aceh Darussalam sekitar bulan Juli-September 2005.

Pertemuan ini menarik. Gerakan mahasiswa Indonesia mulai menyentuh aktifitas-aktifitas yang langsung dirasakan masyarakat secara terorganisir. Gerakan mahasiswa Indonesia ternyata berhasil keluar dari jebakan elitisme yang seringnya hanya mengurus masalah politik an sich. Selama ini gerakan mahasiswa Indonesia yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa mendapat stigma tidak membumi dan bersifat elitis, gerakan hanya membatasi dalam aksi-aksi politik.

Sepertinya, gerakan mahasiswa Indonesia sedang melakukan transformasi menuju gerakan intelektual dan juga gerakan sosial. Mereka mulai memperluas area concern dan tidak terjebak dalam dunia politik an sich. Inilah format baru gerakan mahasiswa Indonesia

Jatiangor, April 2005

# **POLITISI MAHASISWA<sup>5</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

*“Saya adalah kader Partai Demokrat....!”*

*(Bill Clinton pada saat kampanye untuk menjadi presiden mahasiswa di kampusnya)*

Di berbagai daerah sekarang mulai bermunculan mahasiswa yang terlibat dalam partai politik sebagai pengurus. Tercatat beberapa partai politik yang cukup berhasil menggoda anak-anak muda untuk bergabung, contohnya PRD (Partai Rakyat Demokratik), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PAN (Partai Amanat Nasional).

Tampaknya mahasiswa mulai terbuka dan tidak tabu dengan politik. Proyek depolitisasi kampus melalui NKK BKK ternyata tidak mampu menghalangi trend seperti ini. Gelombang reformasi mampu mendobrak gembok kebebasan yang selama ini terpasung oleh rezim otoriterian.

---

<sup>5</sup> Tulisan ini dimuat di Majalah Saksi No. 12 Tahun II 16 Nopember 2005

Namun, harus diakui fenomena seperti ini bukan berarti lepas dari kontroversi. Masih ada suara-suara sumbang atas keterlibatan mahasiswa di partai politik, terutama yang mempertanyakan kemurnian gerakan mahasiswa karena khawatir ditunggangi partai politik tertentu. Sebut misalnya, birokrat kampus dan juga penguasa sering menjadikan isu ini sebagai propaganda membonsai dan memecah belah gerakan mahasiswa.

Perlu diketahui, sebenarnya keterlibatan mahasiswa dalam partai politik merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang. Karena itu Saya sangat menghargai para aktifis mahasiswa yang terlibat dalam partai politik, apalagi keterlibatan mereka dalam rangka pengabdian dan kontribusi kepada masyarakat.

Namun, jika partisipasi politik itu dilakukan dalam rangka mencari keamanan finansial dan pemenuhan syahwat kekuasaan, maka itu merupakan pencederaan terhadap fatsoen politik mahasiswa.

Sebab, fatsoen politik bagi mahasiswa adalah pengabdian dan kontribusi, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Dan karena itu pula proses kontribusi terhadap masyarakat ini idealnya mengikuti rumus berikut

ini: “Dimulai dengan gerakan mahasiswa, dilanjutkan dengan dunia profesi, dan diselesaikan melalui partai politik”.

Ya. Kontribusi ini dimulai dengan gerakan mahasiswa. Kita melakukan advokasi terhadap berbagai permasalahan kemasyarakatan dan menjadi reartikulator aspirasi rakyat. Setelah lulus dari dunia mahasiswa, kita memasuki dunia profesi. Kita membangun keamanan intelektual dan finansial.

Baru kemudian masuk dunia politik melalui lembaga-lembaga formal: partai politik. Sehingga keterlibatan dalam politik betul-betul dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan melayani mereka, bukan dalam rangka mencari keamanan finansial dan pemenuhan dorongan untuk dilayani masyarakat.

Di Belanda, konon ada anggota DPR tidak digaji. Mereka tidak perlu digaji karena mereka adalah mantan-mantan aktifis yang sudah berhasil membangun keamanan finansial dengan profesi masing-masing. Di Mesir, gaji dewan perbulan di bawah satu juta per bulan dengan fasilitas perumahan seperti asrama/barak. Tapi

mereka tetap bekerja. Maka kehadiran mereka menjadi solusi dan bukan justru menjadi beban masyarakat.

Konsep di atas sangat ideal dan masih jauh dengan kondisi bangsa kita sekarang ini. Untuk itu penting kiranya memahami politik tidak identik dengan partai politik atau lembaga-lembaga pemerintahan.

Karena itu menjadi politisi tidak mesti harus menjadi anggota dewan atau birokrat pemerintahan. Ketika tidak masuk dalam partai politik, bukan berarti kehilangan peluang kontribusi dan sebutan politisi.

Probabilitas masih terbuka lebar untuk kontribusi terhadap masyarakat, misalnya menjadi politisi ekstra parlementer. Kita bisa bergabung dalam organisasi pergerakan kemahasiswaan, masuk OKP (Organisasi Kepemudaan), mendirikan LSM, NGO dan sebagainya yang berorientasi pembelaan terhadap masyarakat.

Kita juga bisa tetap memperjuangkan konstitusi, menolak kedzaliman penguasa dan memperjuangkan aspirasi publik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Menjadi politisi intra parlementer ataupun politisi ekstra parlementer adalah optional. Keduanya merupakan

pilihan terhormat. Keduanya bisa melahirkan manfaat nyata untuk masyarakat ketika perjuangan dilaksanakan secara konsisten. Namun, ibarat pedang bermata dua, keduanya juga bisa berperan sebagai penghancur bangsa ini.

“Seorang kader sejati niscaya menjadi seorang politisi”. Demikian ungkapan para tokoh pergerakan. Tentu saja menjadi politisi dalam makna luas: menjadi orang yang senantiasa berpikir dan bertindak untuk memproduksi berlaksa manfaat yang akan dipersembahkan untuk bangsa tercinta. Menjadi pemandu bangsa menuju kejayaannya. Menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang tidak pernah kering dari antusiasme kebangkitan.

Dan sekarang bukan saatnya lagi malu-malu kucing untuk mengatakan, “Kami para politisi muda Indonesia....!”

Jatinangor, April 2005

# OH... MAHASISWA

Oleh : Indra Kusumah

*Aktifis juga manusia*

*Punya rasa punya hati*

*Jangan samakan dengan pisau belati*

.....

## **Kasus I**

Saya kembali melihat SMS yang masuk. Isinya tetap sama: "Baca Galamedia hari ini. Nama BEM Se-Bdg Raya dicatut oknum mhsw tdk brtnggung jwb dlm aksi dukung Punclut kmrn 25/2/05. Usut tuntas!". Demikian isi SMS Presiden KM ITB, Anas Hanafiah yang mampir ke HP-ku.

Tiba-tiba Saya baru ingat, kemarin salah seorang kawan SMS menanyakan apakah betul BEM Se-Bandung Raya turun aksi mendukung punclut? Dia bertanya karena mendengar berita di Elshinta bahwa BEM Se-Bandung Raya (termasuk BEM UNPAD) aksi dukung Punclut.

Tentu saja kami kaget. KEMA UNPAD sedang kongres dari tanggal 24-26 februari 2005. Ketua BEM UNPAD yang lama, Nasrul Haq, ada di kongres terus. Saya

juga sebagai Ketua BEM terpilih belum dilantik dan terus ikut kongres juga. Tiba-tiba di berita, jelas termuat BEM UNPAD ikut aksi dukung pembangunan Puncut yang merusak lingkungan.

Ketika dikonfirmasi ke BEM lain yang tergabung di BEM Se Bandung Raya, ternyata mereka juga mengaku tidak turun aksi. Nah lho? Jadi yang aksi dan ngaku-ngaku BEM Se Bandung Raya siapa? Yang ngaku-ngaku dari BEM UNPAD siapa? Demonstran bayaran?

## **Kasus II**

Firmansyah, Mensospol BEM UNPAD 2003-2004 bercerita, Dia sering menghadiri pertemuan-pertemuan undangan BEM UNPAD dari berbagai institusi di luar kampus.

Suatu ketika, dia datang agak terlambat ke sebuah pertemuan. Ketika akan mengisi daftar hadir, dia terperanjat karena salah satunya tertulis Indra Maulana, Ketua BEM UNPAD. Ada tanda tangan, tapi dia tahu itu bukan tanda tangan Indra Maulana. Lebih mengherankan lagi, dia tahu Indra Maulana memang belum datang.

“Mbak, Indra Maulana dari BEM UNPAD kan belum datang, kenapa di sini ada tanda tangannya?”

“Wah Saya gak tahu, tadi ada yang nulis namanya begitu”

Ternyata ada seorang mahasiswa yang sering datang dalam acara-acara yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Dia sering mengaku sebagai Ketua BEM UNPAD, padahal pengurus BEM UNPAD pun bukan. Dia justru aktif di salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Ketika ditegur, “Hai, ngapain Elo ngaku-ngaku Ketua BEM UNPAD?”

Dengan malu-malu kucing, dia hanya berkata, “Ya... biasa aja”

### **Kasus III**

Indra Maulana, Ketua BEM UNPAD pertama, datang bersama salah seorang pengurus BEM ke TVRI. Ceritanya ada undangan untuk shooting wawancara. Ketika akan masuk, dicegat oleh Satpam.

“Mau ke mana De?”

“Kami dari BEM UNPAD, Saya ketuanya mau shooting wawancara”

“Lho, dari BEM UNPAD sudah datang tadi dan sekarang sedang wawancara”

“Bagaimana bisa, Saya Ketua BEM UNPAD, Saya bawa undangannya”

“Kami tidak tahu. Cuma dari BEM UNPAD sudah ada yang wawancara!”

Sang Ketua BEM tidak mau memperuncing masalah. Ia pun memilih pulang. Tapi ia melihat dulu, siapa yang berani ngaku-ngaku sebagai Ketua BEM UNPAD? Ternyata itu adalah Mr “X”, seorang mahasiswa yang bukan aktifis BEM UNPAD, ia justru aktif di elemen ekstra kampus.

Ketika di lain waktu bertemu, Mr “X” ditanya, “Ngapain kemarin wawancara di TVRI ngaku-ngaku Ketua BEM?”

Mr “X” hanya terdiam.....

#### **Kasus IV**

PRAMA UNPAD (Pemilihan Raya Mahasiswa UNPAD) sudah memasuki masa tenang. Namun ternyata suhu “politik kampus” justru memanas. Ada salah satu

kandidat yang diindikasikan melanggar aturan kampanye dan terancam diskualifikasi pencalonannya karena dianggap pelanggaran berat.

Uniknya, tiba-tiba ada yang mengadukan Saya juga ke PPU (Panitia PRAMA UNPAD) dengan tuduhan kampanye di luar waktu karena masih ada pamflet kampanye di gedung Fisika. Sepertinya ini “serangan balik” dari calon yang terancam diskualifikasi karena mengira dia dilaporkan sengaja oleh Tim Sukses Saya.

Setelah diklarifikasi oleh Promotor Saya di Fakultas MIPA, Roni, tempat yang dituduhkan masih tertempel pamflet Saya itu sebenarnya sudah dibersihkan. Dia sendiri yang mencabut pamflet di sana. Teman-teman kuliahnya juga memberi kesaksian karena mereka semua melihat di tempat tersebut sudah tidak ada pamflet sejak lama.

PPU akhirnya menyatakan bahwa Saya tidak melanggar karena kesaksian beberapa mahasiswa Fisika menyatakan tempat tersebut sudah bersih dari media kampanye dan tidak ada bukti bahwa yang memasang kembali adalah tim sukses Saya. Itu juga sebenarnya bukan yang pertama. Beberapa hari sebelumnya, di Fakultas Hukum pamflet kampanye sudah dicabuti oleh tim sukses.

Tapi esok harinya ada salah satu pamflet yang sudah terpasang lagi, bahkan di atas pamflet orang lain yang masih berlaku.

Pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, “Siapakah yang memasang kembali pamflet itu yang secara tidak langsung memfitnah calon bersangkutan sehingga akan dianggap melanggar yang berbuntut diskualifikasi?”

## **Kasus V**

Sahabat dekat Saya yang pernah menjabat sebagai Deputi Luar Negeri BEM UNPAD cerita. Ia bersama beberapa mahasiswa kampus lain menghadiri kongres mahasiswa di salah satu kampus luar Jawa. Delegasi dari Bandung mendapatkan dana jutaan dari Pemprov.

“Saya di sana beberapa hari. Kurang tidur dan kurang makan karena harus mengikuti persidangan yang seolah tanpa jeda. Namun ternyata ada beberapa orang delegasi kampus lain dari Bandung yang jarang hadir sidang, ia lebih banyak jalan-jalan dan tidurnya pun di hotel. Uang yang digunakan adalah ‘uang rakyat’ yang diberi oleh Gubernur....”, katanya dengan sedih

“...Bukan hanya itu, untuk telepon habis ratusan ribu rupiah, padahal dipakai untuk telepon-teleponan dengan pacarnya di Bandung. ‘Halo Sayang, atos emam?’...”

“...Yang lebih dahsyat”, lanjutnya dengan nada sedih, “Ketika Saya menemui mereka di hotel, di dalam kamar ada wanita berpakaian seksi. Sepertinya cewek panggilan....!!!”

Nah, lho?

## **Kasus VI**

Mensospol BEM KEMA UNPAD 2003-2004, Firmansyah, bercerita. Ada undangan kepada BEM UNPAD untuk menghadiri pertemuan mahasiswa tingkat nasional di Surabaya. Ketika beliau datang dan registrasi di panitia, ternyata di sana tercantum sudah ada dua orang delegasi dari BEM KEMA UNPAD, satu mahasiswa dan satunya lagi mahasiswi.

Firmansyah mendatangi kedua orang itu tanpa memakai jas almamater dan menanyakan delegasi dari mana. Mereka menyatakan diri mereka sebagai aktifis BEM KEMA UNPAD dan salah seorangnya mengaku sebagai Menteri Sospol BEM KEMA UNPAD.

Firmansyah pun membuka identitasnya sebagai Mensospol BEM KEMA UNPAD yang “asli” dan memperlihatkan Surat Tugas dari BEM KEMA UNPAD kepada mereka dan panitia. Akhirnya panitia mempersilahkan delegasi resmi untuk mengikuti acara dan mempersilahkan aktifis BEM UNPAD gadungan untuk pulang dan meninggalkan acara.

## **Kasus VII**

Dalam rangka sebuah acara, dua orang aktifis BEM UNPAD (Ketua BEM dan Mensospol) bersama seorang aktifis BEM dari kampus lain di Bandung bermalam di sebuah penginapan. Satu kamar bertiga supaya lebih hemat.

Tak lama setelah check in, terdengar ketukan pintu kamar. Ketika dibuka ternyata ada tiga perempuan berdandan seksi. Mereka mengaku ada yang meminta untuk ke kamar tersebut dalam rangka memberikan “service”.

Terang saja Ketua BEM UNPAD dan Mensospol UNPAD saling pandang. Mereka kebingungan karena merasa tidak memanggil “Pramunikmat” ke kamar. Namun

di belakang mereka, Sang Aktifis dari salah satu kampus ternama di kota Bandung tertawa dan mempersilahkan ketiga wanita itu masuk. Ternyata dia yang memanggil “Pramunikmat” tersebut. Sepertinya dia mengundang tiga pramunikmat supaya dua orang aktifis BEM UNPAD juga “dapat bagian”.

Ketua BEM UNPAD dan Mensospol tentu saja tidak mau terlibat dalam aksi maksiat tersebut. Mereka keluar dan mengingatkan, “Sorry, Gua masih takut rajasinga....!!!”

Dan kemudian, entah apa yang terjadi di dalam kamar tersebut.....

## **Antara Kampus dan Indonesia**

Kisah-kisah tersebut merupakan realitas yang memilukan dan memalukan. Di sisi lain, ia menceritakan sebuah fakta yang menarik sekaligus membuka mata kita tentang dunia mahasiswa, ternyata dunia kampus merupakan miniatur Indonesia.

Intrik, korupsi, desepsi informasi, character assassination, pencatutan nama orang, klaim institusi, bahkan sex ternyata tidak hanya dilakukan orang luar kampus. Ternyata orang kampus juga bisa terjadi, termasuk

aktifis mahasiswa, bahkan dengan cara-cara yang tidak intelek dan tidak elegan.

Kampus merupakan miniatur negara (*mini state*). Di dalamnya berkumpul Indonesia muda yang beberapa tahun lagi akan terjun di tengah masyarakat untuk mengelola Indonesia ini. Kampus hari ini merupakan miniatur Indonesia beberapa puluh tahun ke depan.

Jika masih mahasiswa saja seperti itu. Bagaimana jika suatu saat kelak mengelola organisasi terbesar bernama negara? Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan jika dipimpin oleh orang-orang seperti ini?

Bagaimana jika.....?

Ah, Saya tidak mau terbuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memang pertanyaan tersebut wajar. Sangat sangat wajar. Namun pertanyaan tersebut hanya akan menggiring frame berpikir negatif tentang suramnya masa depan bangsa.

Kalau Saya hanya terus memikirkan negatifnya bangsa ini. Bisa jadi seperti dr Ario Djatmoko dalam bukunya 'Sehatlah Jiwanya. Sehatlah Badannya. Untuk Indonesia Raya' yang malah mengalami stress dan insomnia. Ketakutan terhadap masa depan yang jika

berlebihan malah bisa melahirkan simptom-simptom abnormal.

Kalau dr Ario Djatmoko seperti itu wajar karena sudah tua. Ia lebih banyak kenangan dibanding mimpi. Sedangkan mahasiswa adalah pemuda. Mimpi harus lebih dominan dibanding nostalgia dan romantisme masa lalu. Indonesia muda harus berani merancang sejarahnya sendiri. Orang sering menyebutnya dengan mimpi.

Namun, apakah kita masih bisa bermimpi dengan tenang di tengah kondisi seperti ini?

### **Di Antara Dua Pilihan**

Hasan Al Banna -demonstran ulung dari Mesir yang dengan mudah menggerakkan setengah juta demonstran-membagi pemuda dalam dua kelompok:

*Pertama*, Pemuda yang tumbuh dalam situasi bangsa yang dingin dan tenang, di mana kekuasaan pemerintah telah tertanam kuat dan kemakmuran telah dirasakan oleh warganya. Pemuda yang tumbuh dalam suasana ini aktifitasnya lebih banyak tertuju kepada dirinya sendiri daripada untuk bangsanya. Dia pun kemudian

cenderung main-main dan berhura-hura karena merasa tenang jiwanya dan lega hatinya.

*Kedua*, Pemuda yang tumbuh dalam suasana yang keras dan bergolak, di mana bangsa itu sedang dikuasai lawannya dan dalam semua urusan diperbudak oleh musuhnya. Bangsa ini berjuang semampunya untuk mengembalikan hak yang dirampas, tanah air yang terjajah, dan kebebasan, kemuliaan, serta nilai-nilai yang agung hilang. Saat itulah kewajiban mendasar bagi pemuda yang tumbuh dalam situasi seperti ini adalah berbuat untuk bangsanya lebih banyak dari pada berbuat untuk dirinya sendiri. Jika ia lakukan hal itu, ia akan beruntung dengan mendapatkan kebaikan segera berupa kemenangan di medan juang, atau kebaikan yang tertunda berupa pahala dari Sang Pencipta.

Di tengah dominasi kapitalisme global, serangan neoliberalisme dan neo imperialisme, maka Indonesia hari ini sebenarnya masuk kategori kondisi kedua yang terjajah secara ekonomi, politik budaya dsb. Tapi kondisi mayoritas pemudanya justru termasuk kelompok pertama yang hedonis dan egois. Ini merupakan keajaiban dunia yang ironis.....

Meski demikian. Nun di sana. Di antara sekat-sekat dan belenggu tiran yang pongah. Ada cahaya yang mulai menyemburat: sebuah generasi baru mulai muncul!. Generasi unik nan mempesona. Yang kehadirannya membuat dunia tidak percaya. Kalaulah sejarah tidak mengabarkan, niscaya semua orang akan beranggapan itu hanya mungkin di negeri dongeng.

Bukan! Bukan di Negeri Dongeng. Ini ada di Indonesia juga. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, orang-orang ini berani dengan tegas berkata tidak terhadap korupsi. Dengan segala kepolosannya mereka bangkit dan berteriak untuk melakukan perubahan di negeri yang ringkih ini.

Mereka juga demonstiran bayaran, tapi yang membayarnya adalah Sang Pencipta. Tak jarang mereka mengeluarkan uang sendiri untuk berangkat berjuang. Prinsipnya “Perjuangan Kami dari dana kami. Dana kami dari saku kami sendiri”, katanya. Mereka senantiasa ditunggangi, tapi yang mampu menunggangi mereka hanyalah kejujuran suara nurani dan kebenaran. Pengorbanannya luar biasa. Tak jarang mereka kurang tidur karena memikirkan bangsanya. Pelupuk matanya

seolah ketakutan untuk tertutup dengan masih menyaksikan penderitaan bangsanya.

Mereka berbicara dengan cinta. Mereka bekerja dengan hati nurani. Mereka berkreasi dengan ide. Mereka beraksi dengan gagasan. Mereka berteriak dengan pikiran. Cinta, nurani, ide, gagasan dan pikiran itu terus berjalan dan bekerja mengetuk jiwa bangsa yang mulai kering ini. Bekerja di tengah hening....

Tentu saja mereka juga manusia yang niscaya salah dan khilaf. Mereka bukan malaikat yang tanpa cela. Namun mereka adalah para pemuda. Mereka adalah harapan. Mereka juga adalah realitas yang ada di kalangan mahasiswa. Mereka para pemburu syurga...

Sungguh, Aku terus bermimpi untuk menjadi bagian dari mereka...

*“Barang siapa yang ketika mudanya berada dalam satu keadaan (pemikiran, sikap, perilaku, hobi dll), maka biasanya dia akan beruban dalam keadaan seperti itu juga”*

*(Ahli Hikmah)*

Jatinangor, April 2005

# KONSISTENSI IDEALISME

Oleh : Indra Kusumah

“Ah kalian mahasiswa, kalian teriak-teriak sekarang karena belum merasakan enaknyanya kekuasaan. Jika nanti kalian menjadi pejabat, kalian juga akan seperti pendahulu kalian!”

Sungguh miris hati ini ketika mendengar kalimat seperti ini. Pesimisme publik atas masa depan para aktifis yang hari ini vokal dan kritis menentang segala bentuk ketidakadilan dan keserakahan. Masyarakat telah disakiti oleh mantan para aktifis yang ternyata mengulang kesalahan orang yang dahulu ditentang dan didemo.

Masih jelas dalam ingatan ketika beberapa tokoh mahasiswa 1998 dari elemen-elemen yang berteriak nyaring untuk membubarkan Golkar, tiba-tiba berbondong-bondong masuk ke partai tersebut. Masyarakat jelas kecewa karena mereka masih mengingat tuntutan pembubaran, teriakan dan caci maki mereka terhadap partai orde baru yang dianggap bertanggungjawab atas krisis multidimensi yang hari ini mendera Indonesia.

Ini bukan yang pertama karena orang-orang yang dianggap bertanggungjawab atas krisis sekarang ini juga dulunya adalah para aktifis mahasiswa tahun 1966 yang dulu bersama-sama dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menggulingkan rezim orde lama: Sukarno. Kini mereka menyebarkan virus yang mampu membunuh sebuah bangsa, yakni virus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Contoh lain adalah Mulyana W Kusumah sebagai anggota KPU yang tertangkap tangan menyuap Khairiansyah, Sang Auditor Putih BPK. Masyarakat mencibir mengingat Mulyana W Kusumah dulu dikenal sebagai aktifis KIPP dan YLBHI yang lantang berteriak menentang penyelewengan. Namun ternyata, aktifis sekaliber Mulyana pun bisa tergelincir dan tergoda Syaithan.

Sungguh merupakan fenomena yang menarik karena ternyata ingatan publik sangat kuat merekam sepak terjang makhluk bernama aktifis mahasiswa. Di satu sisi mereka memiliki ekspektasi yang sangat besar kepada para aktifis untuk melakukan perubahan, di sisi lain ada pesimisme publik atas konsistensi idealisme yang diusung para aktifis pergerakan mahasiswa hari ini.

Namun, aktifis pun (seperti rocker) juga manusia, punya rasa punya hati, jangan samakan dengan pisau belati☺. Manusia merupakan tempat kesalahan dan dosa. Kesalahan Publik adalah menuntut aktifis menjadi manusia sempurna tanpa cela, sedangkan kesalahan aktifis biasanya terlalu mempermaklumkan/mentoleransi sisi kemanusiaannya ketika melakukan penyimpangan karena menganggap telah banyak berjasa kepada masyarakat.

Itu bisa terjadi kepada semua aktifis...

Termasuk Saya..... (Na'udzu billahi min dzalik!)

### **Keniscayaan Alih Generasi**

Mahasiswa adalah sebuah identitas fana yang tidak abadi. Cepat atau lambat identitas tersebut akan berganti karena sudah tidak kuliah lagi. Perjalanan waktu memberi ruang terbuka kepada mereka untuk melakukan mobilitas sosial ke posisi elit karena mahasiswa sendiri menempati posisi tengah dalam struktur sosial masyarakat.

Perjalanan masa menjadikan alih generasi merupakan sebuah keniscayaan. Akan tiba suatu masa mereka menjadi pemimpin masyarakat bahkan pemimpin nasional karena kampus hari ini mulai kembali memainkan

fungsi regenerasi kepemimpinan nasional setelah sekian lama fungsi tersebut diambil alih dan dipusatkan di Magelang (AKABRI).

Masa pasca kampus merupakan ujian yang sebenarnya bagi mahasiswa untuk menguji apakah mereka konsisten dengan idealisme mereka ataukah tidak. Mereka masuk ke dalam dunia yang sebenarnya karena waktu di kampus bukanlah beraktivitas di masyarakat yang sebenarnya, ia adalah masyarakat virtual yang menjadi miniatur masyarakat sebenarnya.

Dunia pasca kampus memberikan realitas hidup dan kehidupan kepada mantan aktifis mahasiswa. Idealisme yang terpupuk di kampus tiba-tiba harus bertemu dengan realitas yang pragmatis. Dunia pasca kampus menyediakan wajah asli masyarakat yang harus dihadapi sang mantan aktifis. Ini lah pertarungan yang sesungguhnya.

Ternyata tak sedikit mantan aktifis yang tak kuat dengan godaan dunia yang aduhai. Matanya buta terhalang tarikan kenikmatan syahwat kekuasaan yang luar biasa. Mulutnya bisu tersumpal rupiah yang menggoda. Telinganya tuli tertutup propaganda syaithan yang melenakan.

Namun, masih ada juga aktifis yang memiliki konsistensi idealisme yang luar biasa di tengah arus hitam dunia. Nuraninya terlalu terang untuk bisa dibunuh oleh kekuasaan. Jiwanya terlalu tenang untuk bisa diguncang tribulasi.

Sayangnya, sangat sulit menemukan makhluk seperti ini. Mereka biasa terasingkan di tengah pergulatan zaman. Dunia seolah belum memberi ruang terbuka kepada makhluk seperti ini untuk mengekspresikan suara hatinya. Mereka seolah mengalami isolasi psikologis karena dianggap anak haram yang kehadirannya merusak harmoni ketidakadilan yang berpadu dengan kekuasaan.

Mungkin Khairiansyah bisa menjadi salah satu contoh. Khairyansah Salman, Sang Auditor Putih BPK yang membongkar kasus megakorupsi di KPU. Dia adalah seorang aktifis ketika masih mahasiswa, bahkan dipercaya menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di STAN. Perjalanan waktu ternyata tidak melunturkan idealismenya, godaan dunia tidak meluluhkan jiwa pemberontakannya atas kedzaliman. Maka Khairiansyah Salman hari ini masih sama dengan Khairyansyah dulu pada saat menjadi aktifis mahasiswa.

Semoga Dia pun tetap istiqamah di jalan para pejuang....

### **Lalu, bagaimana dengan kita?**

Pertanyaan yang paling relevan kemudian adalah, Bagaimana dengan kita wahai Indonesia muda?

Akankah kita mengulang sejarah kebodohan?

Akankah kita rela menggadaikan idealisme keadilan?

Akankah kita tetap konsisten, persisten dan resisten di jalan para pahlawan ini?

Akankah kita mau dihancurkan oleh doa-doa orang-orang tertindas?

Akankah masyarakat kembali dikecewakan?

Tidak! Hari ini kita tidak pernah berpikir melakukan itu semua dan kita tidak akan pernah mau melakukannya. Biarlah dunia menjadi saksi hadirnya generasi baru yang istiqamah dan memiliki konsistensi idealisme. Kita pastikan kehadiran cahaya baru keadilan yang semakin hari memancar menerangi persada Indonesia.... bahkan dunia.....

Kita tidak akan pernah berputus asa menghadapi tribulasi jalan perjuangan ini. Justru sang putus asa yang akan berputus asa memasuki jiwa-jiwa kita....

Kita akan terus bersama mengikuti jalan keterhormatan ini. Menapaktisasi perjuangan para pahlawan yang telah memeras habis air matanya demi kehormatan bangsa ini....

Ya Tuhan kami, kami telah bertekad. Maka saksikanlah!

Jatinangor, April 2005

**MAHASISWA  
DAN  
KAMPUS**

# **“YA, KAMI ADALAH KEMA UNPAD!!”<sup>6</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

*“Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah!”*

**(Ir. Sukarno)**

## **Pewarisan Sejarah yang Tak Terlembagakan: Ironi Lembaga Kemahasiswaan Indonesia**

Terkadang mahasiswa mendengar cerita kepahlawanan, keberanian, patriotisme, konsistensi, persistensi, resistensi serta heroisme mahasiswa Indonesia dalam memperjuangkan idealisme kemahasiswaannya. Namun, itu mungkin hanya bagi sebagian kecil mahasiswa, sementara mayoritas mahasiswa tidak tahu (atau tidak mau tahu?) dan tidak pernah mendengar hal itu. Padahal, hampir dalam setiap perubahan spektakuler perjalanan bangsa ini, mahasiswa memainkan peran signifikan.

---

<sup>6</sup> Tulisan ini dibuat sebagai jawaban atas kontroversi di antara mahasiswa UNPAD terkait berdirinya Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada tahun 2002-2003

Ada ketidaksadaran eksistensi hari ini, ketidakterarahan langkah dan kebingungan bertindak di kalangan mahasiswa yang disebabkan ketidaktahuan sejarah dan tiadanya transformasi visi dan misi berkesinambungan antar generasi dalam lembaga kemahasiswaan.

Sejarah memang masa lalu, namun ia berimplikasi terhadap eksistensi kita hari ini. Kejelasan dan kesinambungan sejarah menjadikan eksistensi hari ini bisa kita lalui dengan tenang dan terarah. Sebaliknya, ketidakjelasan dan keterputusan sejarah menjadikan kita bingung dalam melangkah dan bersikap. Kesinambungan ataupun keterputusan sejarah, kejelasan maupun ketidakjelasan tergantung kepada proses pewarisan sejarah yang secara otomatis dengannya terjadi transformasi visi, misi, nilai-nilai dan semangat.

Secara jujur harus kita akui proses pewarisan sejarah lembaga kemahasiswaan selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka kita menyaksikan beberapa lembaga kemahasiswaan yang setiap tahun berganti visi dan misi, program yang tak berkesinambungan, kevakuman kegiatan, bahkan terjadi konflik untuk mendukung atau

menolak eksistensi lembaga yang di antara faktor desisifnya adalah ketidaktahuan sejarah. Hal seperti ini bukan hanya terjadi di Universitas Padjadjaran, tapi juga berbagai lembaga kemahasiswaan di Indonesia.

Agaknya 'Pewarisan Sejarah' inilah yang bisa menjelaskan fenomena Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Kema Unpad) hari ini, ketika hasil polling Koran Djatinangor menunjukkan sebagian besar mahasiswa Universitas Padjadjaran **belum** mengenal Kema Unpad, lebih jauh lagi ketika tanggung jawab mengenai hal itu ditimpakan kepada BEM Unpad *an sich*.

### **Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran: Antara Sejarah Masa Lalu dan Orientasi Masa Depan**

Sungguh malang nasib makhluk bernama Kema Unpad, ketika eksistensinya hari ini yang dibangun di atas idealisme kekritisian, semangat persatuan, energi perjuangan, keringat, bahkan air mata aktifis mahasiswa Universitas Padjadjaran, belum mampu mengakar di kalangan mahasiswanya sendiri.

Kema Unpad adalah sebuah gagasan yang kini telah menjadi nyata. Gagasan ini muncul sebagai konsep

alternatif dari mahasiswa atas konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dari pemerintah yang dianggap membonsai idealisme kekritisannya, sarat nuansa depolitisasi serta memiliki *bargaining position* yang lemah karena format organisasi yang mirip sebuah forum. Gagasan ini didukung oleh sebagian besar elemen lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran, baik tingkat Universitas, Fakultas, bahkan jurusan.

Konsep Kema Unpad mengacu kepada *Student Government* dengan perangkat Organisasi berupa Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Unpad), Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BPM Unpad), BEM/SEMA Fakultas dan BPM Fakultas. Keseluruhan organisasi kemahasiswaan di Unpad merupakan bagian tak terpisahkan dari Kema Unpad.

Usaha memperjuangkan gagasan ini bukan hal mudah karena rektorat saat itu menolak konsep kemitraan dalam AD/ART Kema Unpad, bahkan pertemuan lembaga kemahasiswaan se-Unpad di Lembang dibubarkan polisi. Gagasan ini diperjuangkan bertahun-tahun dan semakin cerah dengan terbentuknya Forgab (Forum Gabungan)

yang terdiri dari Forkom BEM, Forkom UKM dan Forkom BPM.

Akhirnya, sekitar akhir 2001 dan awal 2002 terjadi kesepakatan-kesepakatan dengan rektorat yang mulai setuju dengan konsep Kema Unpad. Perbedaan pendapat terjadi di kalangan mahasiswa, ada yang berpendapat kongres dulu, dan ada yang berpendapat diadakan pemilu terlebih dahulu. Mayoritas berpendapat diadakan pemilu lebih dahulu.

Pemilu Kema Unpad diselenggarakan pertama kalinya pada bulan September-Oktober 2002 untuk memilih Ketua BEM dan anggota BPM Unpad dari tiap Fakultas. Perangkat organisasi pun dibentuk, kongres diselenggarakan, dan sekarang sudah mulai berjalan secara normal.

Namun disinilah mulai muncul masalah. Rotasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan yang terjadi tiap tahun tidak diimbangi dengan proses pewarisan sejarah yang sehat. Pengurus lembaga kemahasiswaan sebelumnya kurang optimal dalam melakukan pewarisan sejarah kepada pengurus baru sehingga pengurus lembaga kemahasiswaan baru kurang mengenal Kema Unpad.

Selain itu sosialisasi ke seluruh mahasiswa pun kurang optimal, padahal itu tanggung jawab setiap lembaga, baik tingkat Universitas, Fakultas, bahkan jurusan. Hal-hal inilah yang saya sebut dengan sejarah yang tak terlembagakan.

Konsep Kema Unpad sudah jelas dalam AD/ARTnya yang menjelaskan landasan filosofis, fungsi dan perannya. Memang bukan kita yang membuat, tapi itu produk brilian dari para pendahulu kita yang terdiri dari seluruh elemen mahasiswa Unpad. Kita memang tidak mendapat kehormatan sebagai *Founding Father* Kema Unpad, tapi kita memiliki kesempatan untuk meneruskan dan mewujudkan gagasan besar mereka. Kesungguhan menunaikan tugas kesejarahan ini pun merupakan sebuah kehormatan, setidaknya karena penghormatan bagi para pendahulu kita.

Sekarang, Kema Unpad sudah berdiri sebagai wadah aktualisasi diri seluruh mahasiswa Unpad, maka tidak layak untuk mengklaim ataupun menuduh Kema milik golongan mahasiswa tertentu karena Kema adalah milik kita semua: mahasiswa Unpad. Klaim maupun tuduhan bahwa Kema hanya milik golongan tertentu hanya akan

memecah belah mahasiswa dan mengaburkan Kema dari hakikatnya.

Hari ini adalah sejarah esok hari. Hari ini kita sedang membangun mimpi karena mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari, sebagaimana kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin. Kita sedang berusaha menorehkan sejarah emas yang akan membuat bangga generasi penerus kita. Tiada jalan kecuali menyatukan seluruh potensi terserak, menghimpun seluruh elemen dan mensinergikan seluruh kekuatan.

Kita juga tidak boleh melupakan sejarah masa lalu kita, karena eksistensi kita dibangun di atasnya. Sebagaimana ungkapan salah seorang tokoh negeri ini, Sukarno, yang mengatakan, **“Jasmerah! Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!”**.

Dengan sejarah para pendahulu kita, hari ini dengan tenang dan bangga kita akan mengatakan, **“Saksikanlah! Kami semua adalah bagian Kema Unpad”**.

Lihatlah sang Sejarah mulai terpesona dan tidak sabar lagi untuk mengabadikan langkah-langkah monumental kita!

Jatinangor, September 2003

# **VALLEY DAN REFORMASI OSPEK**

Oleh : Indra Kusumah

## **Universitas Padjadjaran, 2002**

Ada duka yang menyelimuti keluarga besar jurusan Geologi Universitas Padjadjaran ketika mendengar kabar meninggalnya E M Valley, mahasiswa Geologi angkatan 2002, pada tanggal 2 Nopember 2002 di RS Cileungsi Bogor sekitar pukul 19.00 WIB. Bahkan kedukaan itupun tidak hanya dirasakan oleh jurusan geologi, tetapi juga seluruh keluarga besar Universitas Padjadjaran, karena almarhum pun adalah mahasiswa Universitas Padjadjaran.

Kejadian ini mendapat perhatian banyak pihak karena Valley meninggal ketika mengikuti acara Pengenalan Alam Bebas (PAB) dan Studi Pengenalan Lapangan (SPL) yang merupakan acara puncak dari kegiatan semacam OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) yang diselenggarakan oleh jurusan Geologi FMIPA Universitas Padjadjaran pada tanggal 1-3 Nopember 2002 di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi berdekatan dengan meninggalnya Cisilia Puji Rahayu,

mahasiswi baru Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro angkatan 2002, yang diduga akibat stress mengikuti Pengenalan Kehidupan Ilmiah Kampus (PEKIK) 2002. Poltabes Semarang turun tangan untuk mengusut kematian tersebut.

Kasus-kasus seperti ini mendapat perhatian karena ada yang menganggap hampir serupa dengan meninggalnya Zaki Tiffany Lazuardian, mahasiswa baru Jurusan Fisika ITB, pada tahun 1992, yang harus ikut long march lima hari dan berendam di dalam air setinggi pinggang. Kasus Zaki itu berbuntut pemecatan panitia Ospek dan tuntutan ikatan orang tua ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang setelah banding dimenangkan oleh pihak ikatan orang tua.

Tentu kurang bijak jika kita kemudian saling menyalahkan, apalagi pihak orang tua Valley dengan sangat sabar menerima musibah yang dialami putranya serta menyatakan tidak akan menuntut ke pengadilan. Selain itu, menurut panitia, acara PAB dan SPL sekarang relatif “lebih baik” karena menggunakan konsep baru yang berusaha meminimalisir hal-hal negatif seperti kekerasan dalam Ospek yang selama ini dipermasalahkan. **Sebuah**

**terobosan yang perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari semua.** Sayangnya hal ini terjadi ketika perubahan mulai dirintis. Mungkinkah ini merupakan peringatan dari Tuhan karena masih ada di antara kita yang setengah hati dalam melakukan perubahan?

Meskipun demikian, terlepas dari sejauh mana perubahan yang terjadi dalam PAB dan SPL Geologi tahun ini, panitia perlu mengklarifikasi penyebab meninggalnya Valley kepada semua pihak karena masih terjadi kesimpangsiuran informasi. Di kalangan mahasiswa, ada yang mengatakan karena kekurangan glukosa, dehidrasi bahkan ada isu disebabkan kerasukan. Klarifikasi ini perlu segera dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan.

Jangan sampai kejadian ini berlalu tanpa ada hikmah yang dapat kita ambil, apalagi sampai kejadian ini terulang kembali. Karena itu, kita semua, terutama para aktivis lembaga kemahasiswaan, perlu menjadikannya sebuah pelajaran dengan mengevaluasi kembali konsep Ospek yang selama ini dipakai di lembaga masing-masing.

Apakah konsep yang dipakai telah betul-betul menghargai nilai-nilai kemanusiaan, intelektual, bermoral,

rasional, religius dan bersih dari tindakan dehumanisasi – yang menyaingi gaya kolonialisme- seperti tindakan bersifat anarkis dan militeristik yang selama ini ditolak oleh mahasiswa dalam demonstrasi-demonstrasi mereka?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya menjadi ruh penyusunan konsep dan pelaksanaan Ospek.

Valley memang belum merasakan Ospek yang betul-betul ideal, ia baru merasakan sebagian dari proyek reformasi Ospek yang belum tuntas. Kita tidak bisa menghidupkannya kembali, Kita hanya bisa berusaha memastikan kejadian ini tidak terulang dan mahasiswa baru tahun-tahun berikutnya bisa merasakan Ospek yang betul-betul ideal.

### **Universitas Padjadjaran, 2005**

Tulisan di atas adalah catatan Saya pada tahun 2002 yang sebagiannya dipublikasikan dalam bentuk pamflet ke berbagai fakultas di Unpad atas nama Lembaga Ilmiah dan Pengembangan Masyarakat Madani Universitas Padjadjaran (LIPMI UNPAD) ketika saat itu Saya menjadi ketuanya.

Kini tak terasa sudah tahun 2004. Alhamdulillah, tidak ada lagi korban nyawa dalam pelaksanaan OSPEK di Universitas Padjadjaran. Tidak ada lagi Valley-Valley baru yang tak bisa lagi menikmati perkuliahan di perguruan tinggi setelah berjibaku di UMPTN/SPMB dikarenakan Allah mengambil ruhnya pada saat pelaksanaan OSPEK. Yang ada adalah sebagian calon-calon mahasiswa yang sudah lulus SPMB harus menggigit jari karena tidak mampu kuliah disebabkan biaya masuk yang melangit.

OSPEK sendiri masih ada, termasuk di Universitas Padjadjaran dengan berbagai nama baru yang muncul. Dan seperti biasa, OSPEK menyisakan nostalgia suka dan duka yang menyertai dinamika pelaksanaannya. Ada konflik yang terjadi, baik secara personal, kelompok, maupun kelembagaan. Sebagiannya mampu diselesaikan secara elegan di antara sesama mahasiswa, namun sebagian lain berkembang menjadi konflik tak jelas ujung pangkalnya.

Konflik biasanya terjadi di antara kelompok pro reformasi OSPEK dengan kelompok konservatif yang ingin tetap mempertahankan gaya-gaya lama dalam pelaksanaan OSPEK. Perebutan pengaruh dan dominasi terjadi sebelum pelaksanaan OSPEK dalam penyusunan

konsep, pada saat pelaksanaan, bahkan ada juga pasca OSPEK. Masing-masing menganggap pemikirannya paling benar dan paling sesuai untuk membentuk mahasiswa baru yang lugu.

Konflik-konflik seperti ini secara rutin terjadi tiap tahun. Hal ini memang berulang dengan pola serupa di berbagai kampus, Namun ketika Saya menganalisis dampaknya lebih jauh, terutama di Universitas Padjadjaran, Saya melihat fenomena yang menarik: Secara evolutif, terjadi perubahan dan penguatan dominasi kelompok pro reformasi OSPEK.

Ya, ada perubahan evolusioner akseleratif dalam tataran konsep dan aplikasi OSPEK dari tahun ke tahun. Beberapa fakultas bahkan mengalami perubahan drastic dan revolusioner. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut tidak selalu mulus, tak sedikit yang terlebih dahulu disertai perdebatan panas, bahkan konflik fisik sesama mahasiswa.

Di Fakultas FMIPA, ketika kelompok pro reformasi OSPEK mulai bergerak, ternyata mendapat respon negative dari pihak sebagian senior. Bahkan, konon katanya Indra Maulana (Ketua Panitia OSPEK FMIPA yang

di kemudian hari menjadi Ketua BEM KEMA Unpad pertama) sampai dipukuli oleh senior yang tidak setuju perubahan OSPEK.

Di Fakultas Peternakan Unpad, pada awalnya OSPEK dikenal paling keras. Konon, kontak fisik berupa pukulan dan tendangan dari senior dan alumni menjadi menu keseharian, bahkan ada prosesi khusus yang terkenal disebut 'Bakti Kandang', yaitu setiap mahasiswa baru harus berendam di kotoran binatang ternak.

Ketika kelompok pro reformasi berusaha mengubah prosesi-prosesi OSPEK yang dianggap feodal, penentangan muncul dari pihak konservatif. Ketua panitia dicari-cari dan diancam. Bahkan di tahun 2004, kelompok konservatif melakukan aksi boikot dengan mengajak mahasiswa baru untuk tidak mengikuti Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas, mereka juga menganggap BEM Fakultas Peternakan telah menjadi kaki tangan dekanat karena mengubah OSPEK.

Di Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) Unpad, Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas sering menjadi penyebab konflik antar mahasiswa. Tahun 2001 terjadi konflik berkaitan dengan acara yang disebut 'Malam Dewa'

di Kiara Payung. 'Malam Dewa' adalah malam puncak pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru yang dihadiri oleh para senior dan alumni yang disebut 'Dewa'. Presiden BEM FIKOM menganggap acara tersebut telah melebihi batas sehingga mengambil keputusan untuk membatalkan acara tersebut. Konflik memanas sampai kemudian keluar memorandum dari BPM, bahkan kasus ini menyebabkan LPJ Presiden BEM FIKOM ditolak. Sampai sekarang kontroversi 'Malam Dewa' masih terjadi di FIKOM.

Di kampus Saya sendiri, Fakultas Psikologi, Penerimaan Mahasiswa Baru ternyata tak luput dari kontroversi. Beberapa tahun lalu, konflik antara kelompok pro reformasi dan kelompok konservatif berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru terjadi secara samar dan tak terbuka. Konflik itu ada, meski di tahun 2001, ada sebuah komunitas pemerhati OSPEK yang menilai PMB/OSPEK di Fakultas Psikologi sebagai OSPEK terbaik di Universitas Padjadjaran.

Kelompok pro reformasi ternyata belum puas dengan pelaksanaan PMB yang ada karena dianggap masih menyisakan prosesi yang kurang manusiawi. Kelompok ini berusaha menghilangkan bidang tata tertib

dari kepanitiaan dan memasukkan fungsinya ke bidang lain, selain itu mereka juga menghilangkan prosesi 'bebek-bebekan' yang dianggap tidak manusiawi karena memperlakukan manusia seperti binatang.

Kontroversi terus berlanjut. Puncaknya polemik yang terjadi di papan aspirasi kampus. Selama hampir setengah semester terjadi perang tulisan dari kedua kubu berkaitan dengan pelaksanaan PMB 2004. Kelompok konservatif tidak menerima angkatan 2004 sebagai bagian dari keluarga besar sedangkan kelompok reformis menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi.

Forum pun digelar. Semula forum diadakan untuk memfasilitasi kedua pihak. Namun, ternyata forum berakhir tanpa akhir yang jelas. Sampai sekarang belum jelas solusi dari kontroversi ini. Mahasiswa baru yang menjadi korban, jelas mereka kebingungan menyikapi kontroversi yang terjadi, padahal kehadiran mereka membutuhkan bimbingan dari semua pihak supaya mampu bersosialisasi secara optimal di lingkungan baru mereka.

Di satu sisi, Saya bersyukur ketika mahasiswa Fakultas Psikologi masih mampu berkonflik tanpa

perseteruan fisik. Namun, Saya khawatir hal ini menjadi wacana abadi, yang berarti konflik abadi. Hal ini juga menyingkap fakta yang selama ini terpendam, bahwa ternyata mahasiswa kita sebagai komunitas belum cukup matang untuk mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri.

Di STPDN, kematian Wahyu Hidayat oleh seniornya memicu kontroversi luar biasa. Kasus tersebut menjadi isu nasional dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Perubahan system pun dilakukan, terutama berkaitan dengan interaksi senior dan junior.

Hal-hal di atas adalah contoh konflik sesama mahasiswa. Ada juga konflik masalah OSPEK antara mahasiswa dengan dekanat/rektorat serta pihak luar seperti yang terjadi di salah satu Sekolah Tinggi Seni di Yogyakarta. Panitia OSPEK menyandera wartawan yang mengabadikan pelaksanaan OSPEK mereka karena takut diketahui public. Hal ini menyebabkan rektorat membubarkan pelaksanaan OSPEK. Mahasiswa marah dan mereka bertindak anarki dengan merusak fasilitas kampus, memecah kaca kelas, merusak kursi dan sebagainya.

## Menuju Perubahan

OSPEK senantiasa menjadi wacana yang memanas setiap awal tahun ajaran. Memang sebenarnya tidak ada yang masih menggunakan nama OSPEK, biasanya sudah berganti nama. Namun, nama OSPEK masih sering disebut. Media sering memberitakan masih adanya perploncoan dalam OSPEK (atau apapun namanya). Hal itu menjadikan orang tua mahasiswa baru cemas melepas kepergian anaknya yang baru berstatus mahasiswa, pihak birokrat kampus mulai berjaga-jaga, Mahasiswa senior berjibaku merancang konsep OSPEK 'ideal', sedangkan mahasiswa baru harap-harap cemas, apakah gerangan yang akan mereka alami di dunia barunya.

Hampir setiap berbicara tentang OSPEK, Saya teringat E M Valley dan Wahyu Hidayat (Praja STPDN yang meninggal korban kekerasan seniornya). Ya, Saya sering teringat mereka setidaknya karena dua hal: *Pertama*, Setahu Saya mereka adalah para 'aktifis' muda yang berpotensi melakukan perubahan-perubahan signifikan di masa yang akan datang. Sungguh sangat sayang mereka harus menemui Rabb-nya sebelum mereka memberikan kontribusi lebih banyak kepada bangsa ini, meski bisa jadi

inilah yang terbaik buat mereka menurut Tuhan Yang Maha Kuasa. *Kedua*, E M Valley dan Wahyu Hidayat telah menjadi stimulant perubahan system, meskipun itu harus ditebus dengan nyawa mereka. Secara tak langsung, mereka telah menjadi inspirator perubahan, terutama bagi kelompok reformis di kalangan mahasiswa atau praja.

Memang perubahan itu belum selesai. Ia masih dalam tahap transisi. Dalam perjalanannya masih bisa jadi mundur ke belakang. Memang tidak semua warisan masa lalu itu jelek, sebagaimana tidak semua hal baru itu pasti bagus untuk diterapkan. Setiap konsep memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Namun, Saya yakin kita sepakat atas satu hal: kita menginginkan yang terbaik. Oleh karena itu kita menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada satu pun kejadian di alam ini yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri.

Mari bersama tuntaskan perubahan....

Selamat jalan Valley .....

Selamat jalan Wahyu .....

Selamat jalan Saudaraku .....

Semoga pengorbananmu tidak sia-sia .....

Semoga namamu mampu menghidupkan asa  
perubahan .....

Semoga.....!!!

Jatinangor, Desember 2004

# UNPAD DI SIMPANG SEJARAH<sup>7</sup>

Oleh : Indra Kusumah

Dunia pendidikan Indonesia hari ini sedang ramai membicarakan RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang sedang memasuki masa uji publik sebelum disahkan maksimal awal Juli 2005. RUU BHP merupakan amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. RUU BHP juga akan dijadikan payung hukum PP 61 tahun 1999 tentang PT BHMN yang selama ini dianggap cacat hukum karena tidak ada payung Undang-Undanganya.

Pro kontra RUU BHP masih terjadi. Namun yang pasti, jika RUU BHP sudah disahkan menjadi Undang-Undang, maka seluruh lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, baik negeri atau swasta, dari pendidikan tinggi sampai Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga sekolah keagamaan. Semua harus mengubah bentuknya menjadi Badan Hukum Pendidikan, termasuk Universitas Padjadjaran.

---

<sup>7</sup> Tulisan ini dibuat menanggapi rencana UNPAD menjadi BHPT

Mahasiswa Universitas Padjadjaran bersama-sama dengan kampus-kampus lain telah, sedang dan akan terus melakukan kajian kritis terhadap RUU BHP tersebut. Mahasiswa juga telah dan akan terus melakukan audiensi dengan komisi X DPR untuk memberikan masukan-masukan konstruktif berkaitan dengan RUU tersebut.

Selain itu, mahasiswa Universitas Padjadjaran akan terus melakukan kajian dan penyikapan atas rencana Universitas padjadjaran menjadi BHPT karena mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan stakeholder terbesar yang akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut apabila BHPT Universitas Padjadjaran justru mengarah ke komersialisasi pendidikan.

## **Masa Transisi**

Hari ini kita dalam masa transisi sehubungan dengan rencana Universitas Padjadjaran menjadi BHPT (Badan Hukum Pendidikan Tinggi). Masa transisi merupakan masa yang sangat menentukan masa depan. Universitas Padjadjaran berada di simpang sejarah antara **komersialisasi** atau **profesionalisasi**. Pilihan-pilihan kita hari ini akan menentukan nasib generasi yang akan datang

karena lembaga pendidikan memiliki tugas kesejarahan merancang masa depan pelaku sejarah Indonesia dan dunia masa depan.

Teramat banyak permasalahan internal Universitas Padjadjaran yang harus segera dibenahi. Mahasiswa sebagai bagian integral dengan kuantitas terbesar di UNPAD berhak dan berkewajiban berkontribusi konstruktif dalam masa transisi ini. Terutama dalam hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan kemahasiswaan.

### **Kondisi Kemahasiswaan**

Terlepas dari UNPAD menjadi BHPT atau tidak, yang pasti semua sepakat dengan satu hal: Universitas Padjadjaran harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya ingin mengemukakan beberapa permasalahan kemahasiswaan yang harus diketahui dan diperbaiki bersama-sama, terutama apabila ingin memberlakukan sistem Badan Hukum Pendidikan Tinggi yang menuntut otonomi (kemandirian), akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip dasar pengelolaan kemahasiswaan adalah **dari, oleh dan untuk** mahasiswa dengan memberikan

peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa (Keputusan Mendikbud RI Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan). Namun, dalam aplikasinya prinsip tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Hal-hal di bawah ini merupakan contoh permasalahan kemahasiswaan yang perlu diperbaiki:

- Pengelolaan dana kemahasiswaan yang tidak transparan Berdasarkan edaran Dirjen Dikti No. 1392/D/T/1986 ditetapkan bahwa 8% dana yang bersumber dari SPP/DPP dipergunakan untuk membiayai kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Sampai saat ini dana 8% SPP/DPP masih dipegang PR 3 dan pengelolaannya belum transparan. Mahasiswa belum mengetahui besaran dana tersebut dan kejelasan alokasi untuk masing-masing lembaga kemahasiswaan.

Sampai saat ini belum ada dana operasional untuk lembaga kemahasiswaan yang jelas, terutama lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas. Dana untuk kegiatan diberikan sebagai “bantuan” dengan besaran yang tidak pasti. Seringkali akhirnya menggunakan uang

pribadi/pinjaman untuk menutupi kekurangan pembiayaan kegiatan.

Bahkan sekarang ada kebijakan (?) yang merugikan kegiatan kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas tidak mendapatkan dana dari dana kemahasiswaan yang dipegang rektorat, kecuali kegiatan yang berskala nasional atau delegasi. Di tingkat Universitas pun demikian, pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dengan tidak mendapatkan dana untuk kegiatan tersebut.

Hal ini menjadikan lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran sulit bertumbuh berkembang. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan beberapa kampus yang sudah lebih baik dalam pengelolaan kemahasiswaannya. Dana kemahasiswaan transparan dalam besar dan pengalokasiannya. Penentuan alokasi tiap lembaga kemahasiswaan ditentukan dalam lokakarya keuangan yang dilaksanakan dengan prinsip **dari, oleh** dan **untuk** mahasiswa.

- Pengambilalihan program-program kemahasiswaan  
Contoh paling nyata adalah program Unit Koperasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran berupa pengadaan

jas almamater, dasi, buku dan sebagainya untuk mahasiswa baru yang diambil alih oleh Tim PR3 mulai tahun 2003. Menurut hemat kami, seperti di kampus-kampus lain, pengadaan barang-barang kebutuhan mahasiswa merupakan hak Koperasi Mahasiswa dan bukan merupakan *area concern* tim ke-PR3-an karena tim ke-PR3-an bukan lembaga bisnis. Pengambilalihan ini merugikan kemahasiswaan karena:

- jelas-jelas menghilangkan sumber keuntungan terbesar KOPMA UNPAD
- menghilangkan kesempatan belajar pengelolaan proyek bagi para aktifis KOPMA UNPAD
- mempersulit akses mahasiswa untuk membeli barang-barang tersebut di waktu lain karena KOPMA tidak menyediakannya. Ketika ada mahasiswa yang akan KKN dan mau membeli jas almamater karena miliknya hilang atau rusak, KOPMA tidak menyediakannya, apakah mahasiswa harus beli ke PR 3?

Hari ini di beberapa kalangan mahasiswa dan karyawan KOPMA tersebar isu KOPMA akan kolaps dan karena hal-hal tersebut, selain itu juga karena usaha KOPMA untuk

pengadaan bis DU-Jatinangor tidak diperbolehkan bisnya masuk kampus Jatinangor sehingga usaha itu pun tidak diteruskan.

Contoh lain adalah mekanisme pendirian UKM yang sampai saat ini masih di tangan rektorat tanpa aturan yang jelas. Di kampus-kampus lain (termasuk fakultas-fakultas di Unpad), mekanisme pendirian UKM(F) baru adalah ditetapkan oleh dalam kongres mahasiswa.

Contoh lain adalah pelaksanaan LKMM tingkat Menengah yang diselenggarakan ke-PR3-an. Awalnya lembaga kemahasiswaan mengirimkan delegasi karena dinyatakan bahwa itu program Dikti yang diselenggarakan Perguruan Tinggi. Namun, ternyata di kampus-kampus lain hal itu diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan, bahkan LKMM Tingkat Lanjut yang levelnya lebih tinggi di Universitas Gadjah Mada diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Di kampus-kampus lain LKMM di kampusnya semua dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan sesuai dengan jenjangnya.

Contoh lain lagi adalah PORMUP. Di kampus-kampus lain tidak dilaksanakan sebagai program PR 3, atau kerja

sama dengan BEM, tapi dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan.

Yang perlu diperhatikan lagi, kegiatan seperti LKMM disinyalir didanai secara full dari dana kemahasiswaan(?), PORMUP juga didanai besar-besaran. Sedangkan kegiatan lembaga kemahasiswaan jarang yang didanai secara penuh, bahkan beberapa di antaranya tidak mendapatkan dana sama sekali seperti PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) yang panitia dari lembaga kemahasiswaan tidak didanai dari dana kemahasiswaan.

- Pelibatan lembaga kemahasiswaan dalam proses pengambilan kebijakan

Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa tidak melibatkan perwakilan mahasiswa. Tiba-tiba ada kebijakan tanpa dikomunikasikan secara dialogis terlebih dahulu. Mahasiswa kurang dipandang sebagai mitra dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater. Meskipun demikian, mulai ada titik cerah perubahan kultur ini ketika PR 2 melakukan dialog dengan perwakilan lembaga kemahasiswaan yang ada berkaitan dengan beberapa kebijakan yang akan digulirkan masalah fasilitas kampus. Terlepas dari kebijakan apa

yang diambil, lembaga kemahasiswaan mengapresiasi budaya dialogis tersebut, apalagi ketika masukan dari mahasiswa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan Universitas. Kami berharap perubahan ini juga terjadi juga di bidang yang lain di semua level, baik Universitas, Fakultas maupun jurusan.

Ternyata sampai saat ini, pengembangan kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran belum semuanya memenuhi pokok-pokok strategi pengembangan kemahasiswaan seperti yang (pernah) tercantum dalam Buku Almamaterku Tercinta, di antaranya:

- Merujuk ciri dan cara masyarakat ilmiah dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang ada
- Mempertimbangkan karakteristik mahasiswa sebagai individu yang tergolong dewasa muda, atau generasi muda bangsa
- Menciptakan iklim atau komunikasi dialogis dalam mengatasi masalah yang dihadapi
- Memandang mahasiswa sebagai mitra dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater masing-masing

- Mengupayakan agar wadah kegiatan kemahasiswaan dapat berfungsi sebagai wahana dan sarana bagi perwujudan aktualisasi diri
- Memegang prinsip **dari, oleh** dan **untuk** mahasiswa dalam penataan organisasi kemahasiswaan dan penyusunan program kemahasiswaan
- Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus masing-masing dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan
- Mengalokasikan sejumlah dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

Kita memahami jika pihak rektorat melaksanakan program-program dan kegiatan kemahasiswaan ketika lembaga kemahasiswaan yang berkaitan tidak ada seperti tahun 1996-2002 ketika tidak ada lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas. Bahkan kami berterima kasih atas hal itu. Namun sekarang lembaga kemahasiswaan tingkat universitas sudah ada dan perkembangannya tergantung dukungan semua pihak. Sudah saatnya masing-masing menjalankan fungsi dan perannya secara optimal, tanpa pembatasan yang menghalangi perkembangannya. Biarkan kuncupnya mekar menjadi bunga!.

## **Simpang Sejarah yang Menentukan**

Informasi tentang BHPT UNPAD simpang siur. Rektor Unpad pada saat silaturahmi dengan Ikatan Alumni Unpad menyatakan bahwa UNPAD menjadi BHP tahun 2006. Tapi beberapa staf di rektorat menyatakan Launching sistemnya September 2005 dan resminya 10 tahun lagi.

Sampai saat ini belum ada sosialisasi yang jelas tentang arah BHPT UNPAD sekaligus sejauh mana kesiapannya. Padahal BHPT UNPAD merupakan simpangan sejarah antara profesionalisasi (yang kita idamkan) atau komersialisasi (yang jelas kita tolak!). Kata kuncinya adalah **kesiapan**. Jika belum siap, maka memaksakan UNPAD menjadi BHPT dalam kondisi seperti itu sama saja dengan bunuh diri.

Membangun kesiapan yang komprehensif dan integral merupakan prasyarat mutlak Unpad yang lebih baik. Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, baik aspek peraturan (Amandemen Statuta Unpad, AD/ART Unpad), kurikulum, fasilitas, Sumber Daya Manusia, Keorganisasian dan sebagainya.

Dalam hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Penyelesaian berbagai permasalahan kemahasiswaan di atas bisa dijadikan barometer keseriusan Universitas Padjadjaran untuk berubah menjadi lebih baik.

Maka ketika keluar kebijakan (?) sebagai prakondisi BHPT UNPAD bahwa lembaga kemahasiswaan Fakultas tidak mendapatkan dana kecuali kegiatan nasional dan delegasi, ini merupakan langkah mundur dalam dunia kemahasiswaan UNPAD.

Maka ketika sampai saat ini rektorat bersikeras tidak mau transparan masalah dana kemahasiswaan. Ini merupakan indikasi kurang positif BHPT UNPAD yang harusnya bersifat transparan.

Maka jika benar informasi yang tersebar bahwa mahasiswa tidak dimasukkan dalam Majelis Wali amanat, jelas ini merupakan indikator Unpad jalan di tempat, bahkan mundur, dalam aspek kemahasiswaan dibandingkan kampus-kampus yang maju.

Maka ketika permasalahan-permasalahan kemahasiswaan lain yang tercantum di atas tidak segera diselesaikan, ini bisa diartikan UNPAD belum siap. Sementara di sisi lain banyak juga permasalahan UNPAD

yang harus dijawab dalam BHPT UNPAD seperti masalah fasilitas, SDM, birokrasi, kurikulum, *quality insurance*, perubahan sistem kepegawaian dan sebagainya.

UNPAD bukan hanya milik sekelompok orang. Ia adalah milik kita semua, termasuk kebanggaan Jawa Barat yang menjadi milik bangsa Indonesia. Kita mencintai Universitas Padjadjaran. Kita tidak akan rela ia berjalan di tempat, apalagi mundur. Karena itu ini lah saatnya mahasiswa Unpad untuk bangkit, bersama-sama dengan seluruh elemen untuk membangun Universitas Padjadjaran.

Bersiap-siaplah wahai mahasiswa UNPAD  
Perjuangan baru dimulai.....

Jatinangor, 18 Mei 2005

# **”DARI, OLEH DAN UNTUK MAHASISWA”**

Oleh : Indra Kusumah

*”Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”*

*(Keputusan Mendiknas No 155/U/1998 pasal 2)*

Jarang sekali aktifis mahasiswa yang mengetahui prinsip pengelolaan lembaga kemahasiswaan tersebut. Sepertinya sepele, namun ketidaktahuan terhadap Keputusan Mendiknas No 155/U/1998 dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan (yang sekarang tidak dicantumkan di Buku “Almamaterku Tercinta”) menjadikan para aktifis mahasiswa kurang memahami konsepsi kelembagaan dalam organisasi kemahasiswaan.

Dampaknya adalah mahasiswa memosisikan diri sebagai subordinat dari rektorat/dekanat/jurusan dan tidak mandiri dalam menentukan program dan kegiatannya. Selain itu tak jarang ada intervensi berlebihan terhadap lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran

sehingga ada kegiatan kemahasiswaan yang diambil alih birokrat kampus. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melahirkan para aktifis berjiwa kerdil dan inferior, kultur organisasi kemahasiswaan yang tidak sehat, pola komunikasi yang tidak elegan dan interaksi yang tidak egaliter dengan birokrat kampus.

Padahal, “dari, oleh dan untuk mahasiswa” adalah prinsip mengelola lembaga kemahasiswaan yang akan menjadikan para aktifis dan lembaganya mandiri dalam menentukan konsepsi kelembagaan, sikap, program dan kegiatannya.

Padahal, derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui **kesepakatan** antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan perguruan tinggi merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi dan/atau yang mengatasmakan perguruan tinggi (pasal 6 SK Mendiknas No 155/U/1998)

Padahal, kedudukan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi merupakan kelengkapan non

struktural pada organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan (pasal 4 SK Mendiknas No 155/U/1998). Jadi ketua lembaga kemahasiswaan tidak bertanggung jawab kepada rektorat atau dekanat, tapi bertanggung jawab kepada mahasiswa sesuai dengan konsepsi kelembagaan yang disepakati dalam forum kongres mahasiswa di kampusnya.

Padahal pula, hubungan dengan rektorat/dekanat dibangun atas dasar prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ini berarti:

- Hal-hal yang merupakan kepentingan rektorat/dekanat/jurusan merupakan hak rektorat/dekanat/jurusan dalam menentukannya, mahasiswa hanya memberikan masukan. Contohnya struktur di rektorat, sistem administrasi dan sebagainya
- Hal-hal yang merupakan kepentingan mahasiswa merupakan hak mahasiswa untuk menentukannya. Rektorat/dekanat/jurusan hanya memberikan masukan. Contohnya konsepsi kelembagaan, struktur organisasi, program kerja dan sebagainya
- Hal-hal yang merupakan irisan kepentingan di antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak. Contohnya waktu Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan/Penerimaan Anggota Baru, dll

Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Strategi Pengembangan Kemahasiswaan. Diantaranya:

1. Merujuk ciri dan cara masyarakat **ilmiah** dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang ada
2. Mempertimbangkan karakteristik mahasiswa sebagai individu yang tergolong **dewasa muda** atau generasi muda bangsa
3. Menciptakan iklim atau komunikasi **dialogis** dalam mengatasi masalah yang dihadapi
4. Memandang mahasiswa sebagai **mitra** dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater masing-masing
5. Memegang prinsip **dari, oleh dan untuk** mahasiswa dalam penataan organisasi kemahasiswaan dan penyusunan program kemahasiswaan
6. Memanfaatkan secara optimal **sarana dan prasarana** kampus masing-masing dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan

7. Mengupayakan terwujudnya prinsip KIS (**Kordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi**) baik antar unit kerja di dalam maupun dengan unit kerja/instansi lain yang terkait dengan program kemahasiswaan di luar kampus
8. Mengalokasikan sejumlah **dana** secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung
9. dll

Apakah di Universitas Padjadjaran sudah terbukti?

Jatinangor, 1 Agustus 2005

# LIBATKAN MAHASISWA!

Oleh : Indra Kusumah

*Memandang mahasiswa sebagai **mitra** dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater masing-masing*  
(Strategi Pengembangan Kemahasiswaan)

Konsep **kemitraan** bagi mahasiswa di kampus bukanlah hal baru yang mengada-ada. Dalam **Pola Pengembangan Kemahasiswaan**, disebutkan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai **mitra para dosen dalam proses belajar mengajar yang dialogis**, tapi juga sebagai **mitra dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater masing-masing**.

Merupakan hal yang tak terbantahkan bahwasanya mahasiswa merupakan unsur yang sangat berkepentingan dengan perguruan tinggi di mana dia belajar. Eksistensinya termasuk faktor desisif harkat dan martabat almamater tercinta. Maka mahasiswa merupakan bagian inheren dari sebuah perguruan tinggi yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan.

Opini yang terbangun selama ini bahwasanya mahasiswa Universitas Padjadjaran kurang memiliki *e'sprit de corps* terhadap almamaternya dan kurang memiliki *sense of belonging* terhadap kampusnya. Terlepas dari setuju atau tidak, setidaknya itulah yang sering Saya temukan: Cukup jarang mahasiswa Unpad yang bangga dengan almamaternya. Ini pandangan subjektif yang Saya sendiri sangat berharap itu salah.

Anggap saja hal itu benar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: “Mengapa hal itu bisa terjadi?”

Pertanyaan tersebut bisa melahirkan berlaksa jawaban. Ketika Saya merenungkan pertanyaan ini, Saya menerka bahwasanya mahasiswa Unpad kurang memiliki *sense of belonging* dan kebanggaan terhadap almamaternya karena selama ini kurang diperlakukan sebagai pemilik syah kampus ini, karena selama ini mahasiswa kurang dilibatkan dalam proses-proses dinamika dan perkembangan kampusnya sendiri, karena mahasiswa kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di Universitas Padjadjaran.

Sejujurnya Saya merasa sedih ketika mendapat informasi ada birokrat kampus yang menyatakan,

“Kalian mahasiswa hanya tamu di Unpad ini!”

“Mahasiswa hanya penumpang di Universitas Padjadjaran”

“Memangnya mahasiswa bisa apa sehingga minta dilibatkan?”

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan paradigma sebagian (besar?) birokrat kampus yang menganggap mahasiswa sebagai anak kecil, tamu dan penumpang di kampusnya sendiri. Seolah-olah mahasiswa tidak memiliki kampusnya sendiri dan tidak perlu terlibat dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, garis demarkasi ini bisa menuju kepada paradigma bisnis dalam pendidikan seperti yang disampaikan salah satu spanduk di Unpad: “Kampus sudah seperti supermarket: Harga sudah ditentukan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi!”. Tidak hanya secara finansial, tapi juga berkaitan dengan kebijakan yang dibuat.

Maka ketika hari ini Tim BHPT UNPAD tidak melibatkan mahasiswa dalam penyusunan konsepnya, dan ketika tersebar informasi dalam AD/ART UNPAD (yang belum disosialisasikan dan diuji publik), mahasiswa tidak

dilibatkan dalam MWA (Majlis Wali Amanat), ini menjadi preseden kurang baik di masa yang akan datang.

Maka ketika proses-proses pengambilan kebijakan masih dilakukan secara tertutup, ini menjadi indikator UNPAD belum berubah ke arah yang lebih baik. Padahal hari ini kita hidup di zaman keterbukaan (tentu saja bukan berarti telanjang).

Terkadang Saya merasa malu ketika berdiskusi dengan kampus-kampus lain.

Ada kampus yang semua mahasiswa memiliki hak suara dalam memilih rektor karena dilakukan pemilihan langsung dan semua elemen kampus memiliki hak suara.

Ada kampus yang mahasiswa bisa menjadi peninjau dalam Sidang Senat Universitas.

Ada kampus yang ketika akan memberlakukan sistem pembayaran baru (yang bisa berdampak terhadap kenaikan biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa), PR III dan PR II nya datang ke sekre BEM dan mendiskusikan konsep baru tersebut.

Ada kampus yang rektornya bisa berbincang-bincang dengan mahasiswa sambil lesehan di taman kampus.

Memang tidak semua kampus seperti itu. Namun kita semua menginginkan perubahan di Universitas Padjadjaran ke arah yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik dari kampus-kampus lain.

Ya, Libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di Universitas Padjadjaran!

Semoga Allah menjadikan Universitas Padjadjaran dipenuhi oleh orang-orang tua yang menyayangi orang muda dan orang-orang muda yang menghormati orang tua. Semoga!

Jatinangor, 1 Agustus 2005

# MAHASISWA UNPAD, BERSATULAH!

Oleh : Indra Kusumah

*Wahai kalian yang rindu kemenangan  
Wahai kalian yang turun ke jalan  
Demi mempersembahkan jiwa dan raga  
Untuk negeri tercinta*

....

Wahai mahasiswa Universitas Padjadjaran....

Indonesia belum berhasil keluar dari masa transisi demokrasi...

Dan Universitas Padjadjaran dalam masa transisi menyongsong konsep baru: BHPT!

Ya, Hari ini kita berada di masa transisi demokrasi, baik level negara maupun di kampus kita tercinta. Kita sedang berada di momentum paling sublim yang akan menentukan masa depan negeri dan kampus kita. Kita sedang memasuki wilayah ketidakpastian, ketidakjelasan dan ketidakmungkinan. Masa-masa yang bisa jadi menjenuhkan sekaligus menggoda.

Sungguh! Kita tidak anti dengan perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan pula adalah sesuatu yang kita tuntut. Tidak ada yang tidak berubah. Tugas kesejarahan kita adalah memastikan perubahan ke arah yang ideal. Perubahan yang menikahkan idealita dengan realita.

Namun memastikan arah perubahan bukan merupakan kerja individu. Ia merupakan ruang sejarah yang hanya bisa dilalui oleh sinergisitas kerja kolektif unsur-unsur bangsa ini, dan elemen-elemen kampus ini. Maka tidak ada kata lain kecuali **Bersatulah!**

Memang sulit menyatukan mahasiswa Unpad, tapi mungkin. Dan diwilayah kemungkinan itu kita bergerak. Memang di sana ada perbedaan-perbedaan di antara mahasiswa Unpad. Di sana pula ada konflik-konflik masa lalu. Hal-hal ini seolah bersatu merintangi bersatunya mahasiswa Unpad.

Maka ketahuilah! Perbedaan itu bukan alasan berpecah belah. Yang membuat berpecah belah bukan karena perbedaan di antara kita, tapi karena penyikapan atas perbedaan tersebut. Konflik-konflik dan dendam itu adalah konflik para pendahulu kita, dan bukan konflik kita.

Mereka telah berbuat yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada zamannya. Dan hari ini, kita memiliki zaman sendiri dengan permasalahan baru yang tersendiri pula dan berbeda dengan masa lalu. Jangan sampai kita menghadapi persoalan sekarang dengan pikiran masa lalu.

Ketika kita memperjuangkan prinsip bernama “**dari, oleh dan untuk** mahasiswa” serta prinsip **kemitraan**, maka kita sedang menjalani suatu masa yang akan menentukan masa depan kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran. Kita sedang memasuki era penegasan identitas dan kepastian jati diri mahasiswa Unpad.

“Benturan” yang terjadi bisa jadi keras, bahkan sangat keras. Tapi insya Allah kita bisa tetap konsisten, persisten dan resisten memperjuangkan prinsip-prinsip kemahasiswaan dan masa depan Unpad. Mungkin terjadi kesalahpengertian, namun kita akan sabar menjalani proses perubahan dengan seluruh dinamika yang terjadi.

Kita tidak perlu menghidupkan Soe Hok Gie, Arif Rahman Hakim, Subhan (Demonstran 1966 yang jadi wakil Ketua MPRS dan mati disinyalir sebagai proyek intelijen karena kritis terhadap Suharto) ataupun korban Tragedi

Semanggi untuk membantu perjuangan kita. Kita bisa bersatu dan mandiri menuntaskan agenda gerakan mahasiswa internal kampus dengan cara-cara yang egaliter, elegan dan nir kekerasan.

Ketika kita bersatu. Maka agenda internal kampus bisa diselesaikan dengan mudah. Dan karena kita telah bersatu, maka kita bisa menjadi unsur perekat bagi bangsa ini yang berpecah belah.

Hingga kehadiran kita menjadi solusi bagi bangsa ini  
Generasi baru yang mempesonakan sejarah

Yang memandu bangsa besar ini keluar dari krisis  
yang bertubi-tubi

Hidup mahasiswa!

Hidup Bangsa Indonesia

*Marilah kawan mari kita kabarkan  
Di tangan kita terenggam arah bangsa  
Marilah kawan mari kita nyanyikan  
Sebuah lagu tentang pembebasan*

Jatinangor, 1 Agustus 2005

## **Mr “J”<sup>8</sup>**

### ***(Sebuah Catatan Komersialiasi Pendidikan)***

Oleh : Indra Kusumah

Sebut saja Mr “J” (Inisial dari nama sebenarnya). Dia adalah calon mahasiswa baru Universitas Padjadjaran yang lulus SPMB ke FMIPA UNPAD. Tinggal di daerah Rancaekek dekat Jatinangor. Namun jangan harap Anda akan melihatnya belajar di kampus yang dicita-citakannya (Universitas Padjadjaran) tahun 2004. Dia memutuskan tidak jadi kuliah di UNPAD karena tidak memiliki biaya. Keluarganya dililit utang sehingga dia tidak mampu bayar uang registrasi.

Bukan dia tidak berusaha. Dia sudah berusaha mendapatkan keringanan pembayaran. Sudah bolak-balik dia mengurus keringanan pembayaran. Namun, prosedur yang berbelit-belit, dipingpong sana sini dan lama menjadikan dia memutuskan tidak jadi kuliah di UNPAD.

---

<sup>8</sup> Tulisan ini dibuat sebagai bagian dari propaganda untuk advokasi mahasiswa baru tidak mampu angkatan 2005. Alhamdulillah setelah melalui perjuangan melelahkan, BEM UNPAD berhasil memperjuangkan sekitar 80 orang mahasiswa tidak mampu untuk bisa kuliah di UNPAD dan memastikan status mereka sebagai mahasiswa

Ketika registrasi dia mengajukan keringanan biaya. Ketika teman-temannya ikut PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) dan PAB (Penerimaan Anggota Baru), dia tidak ikut karena masih mengurus proses keringanan biaya yang berbelit-belit. Ketika teman-temannya mulai kuliah, dia masih mengurus proses keringanan. Ketika teman-temannya hampir UTS, Mr “J” menyerah dan kecewa. Dia memutuskan tidak jadi kuliah di UNPAD.

Ini adalah kisah nyata, bukan rekayasa. Sebenarnya tidak hanya Mr “J”, salah seorang kawan Saya bertemu dengan dua orang mahasiswa baru angkatan 2004 yang mengalami nasib hampir serupa dengan Mr “J” dan sekarang tidak terlihat kuliah di Universitas Padjadjaran (sayangnya kita tidak mendapat nomor kontakunya).

Kasus ini bisa jadi seperti gunung es. Sedikit yang tampak, tapi sebenarnya banyak. Setidaknya berdasarkan pengamatan Saya, beberapa Fakultas mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru yang registrasi setelah kenaikan SPP dan praktikum tahun lalu. Contohnya di Fakultas Psikologi: Biasanya yang masuk sekitar 110-120 orang, tapi angkatan 2004 sekarang jumlahnya di bawah 100. Fenomena ini Saya lihat di fakultas-fakultas lain.

Mengapa hal-hal tersebut di atas terjadi? Di antara berbagai faktor, menurut Saya faktor desisifnya adalah masalah biaya kuliah di UNPAD yang tinggi di tengah kondisi kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia.

Bagaimana tidak. Biaya SPP dan Praktikum di UNPAD angkatan 2004 sekitar 1,2 juta sampai 1,4 juta. Padahal di UPI yang sudah PT BHMN biaya SPP dan Praktikum angkatan 2004 sekitar Rp.750.000,00. Padahal di IPB yang sudah PT BHMN, biaya SPP dan Praktikum angkatan 2004 sekitar Rp.750.000,00. Jadi biaya kuliah di UNPAD hampir dua kali lipat kampus yang sudah BHMN seperti UPI dan IPB, dan beda sedikit dari ITB dan UI yang angkatan 2004 harus bayar 1,5 juta untuk SPP dan praktikum. Padahal UNPAD belum BHMN!!!!

Saya melihat ini termasuk Komersialisasi Pendidikan, yakni ketika seleksi finansial menentukan seseorang bisa kuliah di UNPAD atau tidak. Padahal mereka sudah lulus SPMB atau ujian seleksi di UNPAD yang (katanya) sulit. Memang ada beberapa mahasiswa baru yang dibebaskan, dikurangi atau ditangguhkan pembayarannya, tapi prosedurnya lama dan berbelit-belit.

Anehnya pula, ketika audiensi dengan rektorat (PR1, PR3, PR4, PR 5) mereka menyatakan bahwa untuk tahun ini mahasiswa baru harus bayar meskipun tidak mampu. Meja kasus ditiadakan. Kalaupun ada yang seperti Mr “J”, BEM melaporkan langsung ke PR 1 dan BEM harus bertanggung jawab atas akurasi datanya. Seolah-olah mahasiswa yang harus menerima pengaduan, menyeleksi data dan sebagainya. Padahal seharusnya itu menjadi prosedur yang inheren dalam proses registrasi dengan prosedur yang jelas dan cepat. Mahasiswa hanya memastikan prosedur itu berjalan semestinya.

Rektorat juga tidak mau seperti salah satu kampus yang mempublikasikan jaminan bagi mahasiswa tidak mampu tapi cerdas untuk bisa masuk ke kampus tersebut di media massa. Katanya, kalau ada publikasi bahwa mahasiswa baru yang tidak mampu dijamin bisa kuliah di UNPAD karena khawatir banyak yang mengaku miskin. Bahkan salah seorang di Bidang Kemahasiswaan melarang mahasiswa membuat posko pengaduan mahasiswa baru.

Kita sepakat bahwa bantuan harus tepat sasaran. Namun jika tanpa publikasi, bisa jadi mahasiswa baru yang tidak mampu tidak mengetahui haknya dan membatalkan

niatnya sejak awal ketika melihat biaya yang harus dibayar selangit!

Rekan-rekan mahasiswa. Apakah kita akan membiarkan ada Mr “J” lagi di tahun ini? Relakah kita ada anak bangsa yang cerdas (lulus SPMB dan ujian masuk lainnya) terjegal hak mereka untuk mendapatkan pendidikan karena masalah finansial?

Tidak!!!! Kita tidak akan membiarkannya sampai kapanpun.

Saatnya kita bergerak, kawan.....!!!!

Jatinangor, 2 Agustus 2005

# QUO VADIS REKTOR UNPAD?

Oleh : Indra Kusumah

Merupakan sebuah keniscayaan bagi semua institusi di dunia saat ini untuk menyiapkan diri menghadapi masa persaingan global agar tetap *survive* bahkan *leading*. Regenerasi organisasi yang konstruktif merupakan salah satu di antara rahasia keberhasilan institusi supaya mampu bertumbuh dan berkembang di tengah situasi kompetisi yang semakin mendunia.

Universitas Padjadjaran sebagai institusi pendidikan tinggi kebanggaan Jawa Barat yang besar dan disegani di Indonesia hari ini sedang menjalani hajatan besar yang akan menentukan wajah Universitas Padjadjaran di masa depan, yakni Pilrek (Pemilihan Rektor) periode 2006-2010. Sekarang Senat Guru Besar Unpad telah memilih tiga kandidat yang diajukan ke Mendiknas untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor Universitas Padjadjaran, namun berbagai isu dan wacana seputar pemilihan rektor masih menjadi pembicaraan hangat keluarga besar Universitas Padjadjaran. Berbagai lobi-lobi masih dilakukan masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Pergerakan

mahasiswa Universitas Padjadjaran pun sempat mengadakan demonstrasi dan terus mengawal keseluruhan proses yang terjadi sampai ditetapkannya Rektor definitif.

Pemilihan Rektor ini memang memiliki makna penting bagi segenap keluarga besar Universitas Padjadjaran setidaknya disebabkan dua hal:

*Pertama*, Jabatan Rektor merupakan jabatan puncak di kampus dengan tingkat kewenangan yang luas dan akan memiliki dampak signifikan terhadap maju mundurnya Universitas Padjadjaran di masa depan. Berbagai kebijakan strategis di Universitas Padjadjaran menjadi kewenangan seorang Rektor. Kesalahan kebijakan yang diambil bisa merugikan ribuan karyawan dan lebih dari 40000 mahasiswa, bahkan bisa berdampak terhadap masyarakat dan dunia pendidikan di Indonesia. Demikian pula, kebijakan yang tepat akan dirasakan manfaatnya oleh keluarga besar Universitas Padjadjaran, masyarakat, Indonesia, bahkan dunia.

*Kedua*, Momentum transisi Pemilihan Rektor Universitas Padjadjaran kali ini terjadi ketika Universitas Padjadjaran sebagai sebuah institusi pun sedang

mengalami masa transisi menuju BHPT (Badan Hukum Pendidikan Tinggi). Unpad sedang mengalami pencarian bentuk final BHP yang sesuai dengan jati dirinya, apakah ia akan menjadi kampus kerakyatan atau kampus komersialisasi pendidikan?. Di setiap institusi, masa-masa transisi merupakan masa yang menentukan arah masa depan. Dan dalam setiap masa transisi, kepemimpinan merupakan faktor desisifnya.

Dengan urgensi pemilihan rektor Unpad seperti ini, Saudara Oky membuat sebuah tulisan berjudul 'Tantangan Rektor Unpad di Masa Depan' yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat tanggal 12 Agustus 2006. Sayangnya tulisan tersebut kurang menggambarkan Refleksi Kepemimpinan Rektor saat ini secara objektif dan kurang menggambarkan jaminan arah kepemimpinan Unpad di masa yang akan datang supaya lebih baik.

### **Refleksi Era Kepemimpinan Prof Himendra Wargahadibrata**

Ketika membuat sebuah rancangan masa depan, maka refleksi dan evaluasi masa lalu, dan analisis SWOT hari ini harus dilakukan secara terpadu. Mimpi tentang

Universitas Padjadjaran masa depan harus disandingkan pula dengan evaluasi Universitas Padjadjaran sebelumnya sampai hari ini, terutama di era kepemimpinan Prof. Himendra Wargahadibrata.

Sebagian besar masa kepemimpinan Prof. Himendra terjadi di masa ketika Indonesia mengalami transisi demokrasi di era reformasi. Di zaman ini reformasi pendidikan digaungkan berbagai pihak demi terciptanya pendidikan Indonesia yang lebih baik. Berbagai produk peraturan dan perundangan yang lahir dan terkait reformasi pendidikan menuntut Universitas Padjadjaran untuk menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi secara tepat.

Di antara produk peraturan yang mengubah wajah pendidikan tinggi di Indonesia adalah PP No 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, PP No 61 tahun 1999 yang terkait dengan PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara), UU No 20 tentang Sisdiknas, dan RUU BHP (Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan) yang sekarang dalam pembahasan di DPR. Menyikapi peraturan tersebut, keputusan Rektor Universitas Padjadjaran untuk menolak tawaran menjadi *pilot project*

PT BHMN sebagai konsep baru dalam pendidikan Indonesia merupakan keputusan yang tepat karena ternyata sebagian besar kampus yang menjadi *pilot project* PT BHMN mengalami lebih banyak masalah dibandingkan keuntungan karena belum siap, selain tentunya disebabkan belum adanya peraturan perundangan yang jelas dan kuat terkait PT BHMN.

Sikap hati-hati dan lebih mengutamakan persiapan merupakan kebijakan yang diambil Prof. Himendra sebagai Rektor Universitas Padjadjaran. Kebijakan ini dalam perjalanannya ternyata memiliki manfaat positif, namun dalam beberapa hal mengundang pertanyaan dan kritik berbagai pihak.

Dari aspek jaringan, hari ini Universitas Padjadjaran memiliki koneksi internasional. Hal ini adalah dampak dari *road show* yang dilakukan Rektor Universitas Padjadjaran ke berbagai Universitas terkemuka di berbagai negara Asia dan Eropa. Universitas Padjadjaran membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai kampus terkemuka di dunia dengan posisi setara.

Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi tinggi mulai dikembangkan di Universitas Padjadjaran.

Hanya saja hal tersebut belum diaplikasikan secara optimal sehingga pelayanan prima belum dirasakan oleh semua mahasiswa Universitas Padjadjaran.

Dalam hal finansial, Universitas Padjadjaran menyatakan sudah siap untuk otonomi kampus dengan menjadi BHPT (Badan Hukum Pendidikan Tinggi). Memang dalam masalah finansial sepertinya Universitas Padjadjaran termasuk yang paling siap dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya. Hanya saja, hal ini terjadi disebabkan beberapa kebijakan yang menjadi kritik dan sorotan berbagai pihak, terutama mahasiswa Universitas Padjadjaran.

Kesiapan secara finansial ini disebabkan total pembiayaan yang harus dibayar mahasiswa Universitas Padjadjaran tiap semester hari ini hampir menyaingi beberapa kampus yang sudah berstatus PT BHMN, bahkan ada beberapa fakultas yang secara nominal pembiayaan per semester lebih besar dibandingkan dengan kampus-kampus yang sudah PT BHMN. Selain itu, pembukaan berbagai jalur di luar SPMB yang mematok harga tinggi di awal masuk (untuk Fakultas Kedokteran sampai Rp.120.000.000,00) menjadi sumber pemasukan yang

melimpah. Dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri lain yang belum PT BHMN, pembiayaan di Universitas Padjadjaran hari ini tergolong tinggi.

Meskipun demikian, Rektor memberikan jaminan kepada mahasiswa tidak mampu untuk bisa menikmati pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan kebijakan subsidi silang. Jaminan Rektor ini sangat membantu bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hanya saja, mekanisme dan prosedur sebagai realisasi jaminan Rektor ini belum tersosialisasikan secara merata sehingga setiap tahun masih ada saja mahasiswa yang kebingungan untuk meneruskan kuliah disebabkan kekurangan biaya.

Usaha peningkatan fasilitas terlihat dengan pengadaan peralatan-peralatan pendidikan serta pembangunan beberapa gedung baru di Jatinangor dan Dipatiukur. Sayangnya peningkatan fasilitas terkesan didominasi fakultas-fakultas tertentu dan belum merata di semua fakultas. Masih muncul keluhan mahasiswa yang kuliah berdesak-desakan sampai meluber ke luar kelas serta belum terpenuhinya peralatan praktikum secara

optimal. Angkutan dalam kampus mulai ada yang gratis namun masih ada juga yang dikomersilkan.

Di bidang kemahasiswaan, periode kepemimpinan Prof Himendra Wargahadibrata mulai mengakomodir aspirasi mahasiswa dengan berdirinya Kema Unpad (Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran) sebagai lembaga kemahasiswaan yang menaungi semua lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran setelah hampir sewindu mahasiswa Universitas Padjadjaran tidak memiliki lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas seperti kampus lainnya di Indonesia.

Namun, pelaksanaan prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa” dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan masih terkesan setengah hati karena belum mencakup pengelolaan dana kemahasiswaan dan masih ada kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan rektorat bidang kemahasiswaan.

### **Rektor Unpad Ideal**

Refleksi di atas lebih menggambarkan peta pemikiran dan perasaan mahasiswa Unpad tentang kondisi kampusnya hari ini dengan segala kelebihan dan

kekurangannya di era kepemimpinan Prof Himendra Wargahadibrata. Refleksi ini semoga menjadi masukan bagi Rektor Universitas Padjadjaran periode yang akan datang siapapun yang terpilih.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Prof Himendra telah membuat fondasi untuk Universitas Padjadjaran di era reformasi. Itulah tuntutan sejarahnya. Itulah momentum kepahlawanannya. Namun kerja belum selesai, harus ada penerus yang tidak memulai lagi dari awal dan siap bekerja secara konstruktif dengan mempertahankan dan meningkatkan aspek-aspek positif periode sebelumnya dan mengeliminasi aspek-aspek negatifnya.

Dibutuhkan Rektor yang kuat dan visioner karena ia akan bekerja di sebuah masa transisi yang sangat rawan dan menentukan. Kemampuan *future analisys* sekaligus manajemen perubahan yang handal mutlak diperlukan Rektor Universitas Padjadjaran yang akan datang. Selain itu, *social skill* pun wajib dimiliki demi membangun komunikasi yang cerdas, elegan dan egaliter dengan semua pihak yang terkait dengan Universitas seperti dosen, karyawan dan mahasiswa yang berjumlah lebih dari 40000

orang. Rektor yang bekerja untuk kemajuan Universitas, dan bukan untuk kemajuan fakultas asalnya saja, karena ia milik keluarga besar Universitas Padjadjaran.

Apapun kebijakan strategis yang diambil Rektor akan berdampak luas. Karena ia adalah representasi dari Universitas Padjadjaran di masyarakat Indonesia, bahkan di dunia internasional. Hari ini Universitas Padjadjaran sedang bermetamorfosis, dunia sedang menunggu wajah Unpad yang sebenarnya di bawah kepemimpinan Rektor baru, apakah ia kampus kerakyatan ataukah kampus komersialisasi pendidikan?

### **Kontrak Sosial**

Masih ada jarak terbentang antara idealita dan realita. Masih ada ketidakpastian tentang masa depan Universitas Padjadjaran. Keluarga besar Universitas Padjadjaran, terutama mahasiswa sebagai mayoritas seyogyanya bergerak menikahkan idealita dengan realita demi kemajuan Unpad di masa yang akan datang.

Mahasiswa Universitas Padjadjaran berhak untuk mengajukan tawaran konsep dan agenda reformasi Unpad kepada para calon Rektor Unpad. Bahkan, seyogyanya hal

itu tertuang dalam sebuah kesepakatan tertulis atau yang biasa disebut kontrak sosial. Hal ini dilakukan supaya rektor terpilih tidak hanya diberi cek kosong, tapi sejak awal mengetahui keinginan dan aspirasi mahasiswa.

Agenda reformasi Unpad ini seharusnya mencakup aspirasi mahasiswa kepada calon rektor. Isinya bisa terkait dengan demokratisasi kampus, transparansi, pelayanan prima, konsistensi pelaksanaan prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa” dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan, komitmen budaya elegan dan egaliter, dan lain-lain.

Kontrak sosial ini bisa diajukan oleh mahasiswa sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki hak suara dalam pemilihan rektor. Bahkan, ketika sekarang sudah terpilih tiga calon dan diajukan ke Departemen Pendidikan Nasional, mahasiswa pun bisa mengajukan tuntutan kepada Presiden RI dan Mendiknas untuk menetapkan Rektor yang komitmen dengan agenda reformasi Unpad yang diajukan mahasiswa.

Kontrak sosial agenda reformasi Unpad tersebut bisa menjadi bukti komitmen rektor terpilih, tingkat kedekatan dengan mahasiswa dan dokumentasi yang

menjawab sebuah pertanyaan besar di kepala keluarga besar Unpad hari ini: **quo vadis Rektor Unpad?**

# REFLEKSI AKHIR TAHUN BEM UNPAD<sup>9</sup>

Oleh : Indra Kusumah

Perjalanan Sang waktu menyadarkan semua insan bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini akan berakhir. Maka tinggallah kenangan yang memenuhi ruang memori kita, tentang apa yang sudah kita pikirkan, katakan, dan kerjakan dalam mengisi sang waktu. Tentu saja dengan segala nilai, makna dan penghayatan yang menyertai semua itu.

Kepengurusan BEM KEMA UNPAD periode 2005-2006 hampir berakhir. Dan sebuah pertanyaan kembali hadir, apa yang telah kita lakukan selama satu tahun ini? Apa manfaat yang telah dirasakan mahasiswa dan masyarakat dengan keberadaan BEM KEMA UNPAD?

Tiba-tiba perjalanan satu tahun kembali terbayang, bak film yang kembali diputar. Tampak jelas sejelas mentari di hari yang cerah. Mari kita biarkan ia menceritakan kisah singkatnya.....

---

<sup>9</sup> Tulisan ini dimuat di koran kampus Interval edisi April 2006. Dibuat sebagai resume aktifitas selama setahun yang layak diketahui publik sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas amanah menjadi Presiden BEM KEMA UNPAD 2005-2006

Saya dilantik sebagai Presiden BEM UNPAD di Kongres KEMA UNPAD pada tanggal 27 Februari 2005. Open Recruitment pun dilakukan dengan menyewa tim dari mahasiswa Fakultas Psikologi dengan prosedur yang terbuka tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, fakultas dan sebagainya. Pendaftar sekitar 500 orang, jumlah yang berlipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, setelah melalui tes dan interview, dengan berat hati kita hanya menerima sekitar 150an mahasiswa Unpad untuk menjadi pengurus di KABINET PROGRESIF BEM KEMA UNPAD.

Raker dilaksanakan awal Maret 2005 di Balatkop Lembang. Di sana disusun program kerja selama setahun berdasarkan Visi dan Misi Presiden BEM ketika kampanye, GBHK hasil kongres dan sesuai JAMU (Jajak Aspirasi Mahasiswa Unpad) yang kita sebar ke sekitar 4000 mahasiswa Unpad.

Hasil raker disosialisasikan dalam Launching BEM KEMA UNPAD di PSBJ. Acara tersebut dilaksanakan pertama kali di BEM UNPAD, acaranya adalah sosialisasi Pengurus BEM UNPAD dan program kerja selama satu tahun kepada mahasiswa Unpad. Perwakilan lembaga

kemahasiswaan dan mahasiswa lain yang hadir sangat antusias, apalagi acara juga disertai Bedah Novel Politik dan disediakan buku gratis untuk 100 pengunjung pertama.

Setelah itu, Perjalanan waktu mengisahkan kabar tentang pengurus BEM Unpad yang berjiwaku untuk melaksanakan berbagai program yang telah dirancang. Hampir tiap pekan ada kegiatan. Mereka mengorbankan waktu-waktu istirahatnya, tenaga dan finansial untuk kegiatan BEM KEMA UNPAD. Saya yakin tidaklah mereka semua melakukan itu, kecuali karena rasa cinta yang mengharu biru terhadap mahasiswa Unpad dan bangsa Indonesia ini. Namun, Sang waktu pun menceritakan tentang pengurus BEM yang memiliki *commitment organizational* yang berbeda-beda sehingga sampai suatu masa diambil keputusan untuk rasionalisasi pengurus BEM UNPAD.

Hari demi hari pun menjadi saksi aktifitas tiap Departemen. Departemen Penalaran mengadakan kegiatan Studium General, Bedah Film, J-SKI (Jelajah Semesta Karya Ilmiah), Penyuluhan Avian Influenza, PADUFAIR yang kegiatannya bermacam-macam seperti UGS (Unpad Goes to School), LKTI (Lomba Karya Tulis

Ilmiah), Lomba Debat, Seminar tentang Pornografi dan pornoaksi, dan lain sebagainya.

Departemen Kesejahteraan Mahasiswa mengadakan kegiatan JEF (Job Education Fair), advokasi masalah mahasiswa baru yang tidak mampu, advokasi masalah angkutan kampus, penyusunan data base alumni, Beasiswa, GACK (Gerakan Aku Cinta Kampus) dan sebagainya.

Departemen PSDMO (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi) mengadakan kegiatan PAB (Penerimaan Anggota Baru), Kajian Rohani, Newsletter internal, PPK (Pelatihan Paska Kampus), PEKAT (Pelatihan Kepemimpinan Alam Terbuka), BBTL (BEM Breaking The Limit), Assessment Organisasi, dan lain sebagainya.

Departemen Minat dan Bakat mengadakan Turnamen Futsal Mahasiswa Se-Bandung Raya, Konser Musik (digabungkan dengan GACK) dan sebagainya. Sayangnya karena satu dan lain hal, Rapat Kerja tengah tahun memutuskan agenda Olimpiade Mahasiswa dicancel.

Departemen Dalam Negeri mengadakan RFT (Road to Faculty), Road to UKM, FKSU (Forum Komunikasi Se

Unpad), Advokasi permasalahan-permasalahan internal kampus, Launching BEM KEMA, Mentoring Sospol dan lain sebagainya.

Departemen Luar Negeri mengadakan Seminar Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat, Seminar Anti Liberalisasi Pendidikan, Road to BEM, Kajian-Kajian Sospol, Aksi Advokasi dan sebagainya.

Departemen Media dan Informasi membuat buletin Padjadjaran Moeda dan Koran Interval, mengelola website KEMAUnpad, mengadakan kegiatan Road to Media, Seminar Sehari Bersama Pers, Pemasangan Pakom dan lain sebagainya.

Departemen Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan SKU (Silaturahmi Keluarga Unpad), Oh Desaku (Program Desa Binaan di daerah Cililin yang kegiatannya bakti sosial, pelatihan-pelatihan, Lomba Cerdas Cermat dan sebagainya), Siaga Bencana (Pengiriman Relawan ke Nias/Aceh, pengiriman bantuan banjir dan Longsor di beberapa daerah dsb), Peduli Pendidikan Jatinangor, dan sebagainya.

Departemen Sekretaris BEM mengelola masalah-masalah administratif, menyelenggarakan Raker, RTA

(Raker Tengah Tahun), REAT, menyambut kunjungan lembaga lain, dan sebagainya. Tidak lupa pula Departemen Keuangan mengelola masalah-masalah terkait finansial di BEM UNPAD.

Hal-hal di atas sebagian di antara program-program yang dilaksanakan di kepengurusan BEM UNPAD 2005-2006.

### **Advokasi : Kata Kunci Kerja BEM KEMA UNPAD 2005-2006**

Ruh dari kegiatan-kegiatan di BEM Unpad 2005-2006 adalah advokasi. Pergerakan mahasiswa yang dibangun pun dengan ruh advokasi, maka setahun kepengurusan BEM UNPAD dipenuhi dengan aura perjuangan untuk perbaikan di dalam kampus maupun di negeri ini.

Advokasi yang dilakukan di dalam kampus di antaranya:

- Advokasi mahasiswa yang tidak mampu.  
BEM Unpad melakukan publikasi di media, penjangkaran dan penyeleksian untuk memastikan mahasiswa baru 2005 yang tidak mampu. Alhamdulillah sekitar 80 orang

maba 2005 yang tidak mampu berhasil diadvokasi sehingga mereka bisa menikmati pendidikan di Universitas Padjadjaran. Jumlah maba teradvokasi empat kali lipat dari maba teradvokasi tahun sebelumnya yang sekitar 20 orang. Selain maba, sekitar 20 orang mahasiswa angkatan 2004 ke atas berhasil diadvokasi sehingga mereka tetap bisa kuliah di Universitas Padjadjaran. Jadi ada sekitar 100 mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial di Unpad berhasil di advokasi.

- Angkutan Kampus

Semula Rektorat menyediakan angkutan kampus di Jatinangor dan mahasiswa harus bayar. Setelah negosiasi dan loby, alhamdulillah keluar SK Rektor No: 73/J06/Kep/KP/2006 tertanggal 9 Januari 2006 tentang Penyediaan Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional untuk Angkutan di dalam Kampus Jatinangor Unpad. Dalam point (6) tercantum bahwa “Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran”. Namun dalam kenyataan di lapangan, dari empat angkutan kampus Unpad yang ada hanya dua yang kemudian gratis, yaitu yang lewat jalur gerbang

Unpad baru. Dua unit lainnya yang melalui gerbang Unpad lama masih tetap bayar. Menurut informasi, dua unit angkutan yang bayar itu adalah milik POMA UNPAD. Kita mengusahakan supaya angkutan POMA UNPAD juga gratis. Mohon do'a dan dukungannya.

- **Beasiswa**

BEM KEMA UNPAD juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang membutuhkan. Dana berasal dari saldo kegiatan BEM UNPAD. Ada sekitar 6 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari BEM UNPAD. Kita juga terus menagih janji PT Danareksa yang berjanji memberi beasiswa (bahkan living cost) untuk mahasiswa Aceh korban Tsunami. Kita sudah mengirim surat dan beberapa kali mengirim orang ke PT Danareksa, namun seiring pergantian Direksi, sepertinya Direktur Utama yang baru kurang peduli dengan masalah Aceh dan masalah pendidikan di Indonesia. Kita sangat kecewa dengan perusahaan yang berorientasi profit an sich dan melupakan tanggung jawab sosialnya.

- BHPT UNPAD

Ketika pada tanggal 4 Januari 2006 harian Pikiran Rakyat memuat berita bahwa Universitas Padjadjaran dipastikan menjadi PT BHMN bulan Februari 2006, BEM UNPAD bersama BEM Fakultas melakukan penyikapan. Setelah melalui audiensi dan sebagainya, UNPAD tidak menjadi PT BHMN bulan Februari 2006 karena UU BHP juga belum ada serta ada kesepakatan antara Komisi X DPR RI dan Mendiknas bahwa sebelum UU tersebut disahkan, tidak ada perguruan tinggi yang berubah status jadi BHPT/PT BHPMN. BEM UNPAD juga bersama dengan BEM Fakultas menyusun CLD (Counter Legal Drafting) RUU BHP sebagai RUU tandingan versi Mahasiswa Unpad.

- PATUMA

Pertemuan BEM UNPAD dengan BEM Fakultas menyepakati PATUMA (Empat Tuntutan Mahasiswa) yaitu:

- Tolak Komersialisasi Pendidikan di Universitas Padjadjaran

- Laksanakan prinsip “dari, oleh dan untuk mahasiswa” dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan
- Optimalkan pelayanan terhadap mahasiswa (fasilitas dll)
- Libatkan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di Universitas Padjadjaran

BEM KEMA UNPAD menyampaikan PATUMA ke rektorat dan dalam perkembangannya PATUMA menjadi Panca Tuntutan Mahasiswa, dengan tambahan satu point, yaitu:

- Wujudkan profesionalisme dalam pengelolaan Universitas Padjadjaran

Gerakan PATUMA ini memang belum tuntas, namun dampaknya mulai terasa. Beberapa fasilitas mulai dibenahi, Mahasiswa mulai dilibatkan meski masih dalam area yang terbatas, dan sebagainya. PATUMA ini diharapkan tetap menjadi ruh perjuangan BEM KEMA UNPAD yang akan datang dalam tataran internal kampus.

- Dan lain-lain

Advokasi masalah kemasyarakatan dan bangsa di antaranya:

- Penyikapan terhadap Kepala Desa Cilayung yang diduga korupsi

Masyarakat Cilayung meminta dukungan BEM UNPAD terkait dengan kepala desa yang diduga korupsi. Hanya saja mereka lebih memilih penyelesaian politik daripada penyelesaian hukum. BEM UNPAD pun melakukan advokasi dengan melakukan penyikapan melalui DPRD Kabupaten Sumedang dan Audiensi dengan Bupati Sumedang. Informasi terakhir, kepala desa bersangkutan mengembalikan sekitar 20 juta dari dana yang diduga dikorupsi olehnya.

- Penyikapan masalah JTS (Jatinangor Town Square) dan Padjadjaran Plaza

BEM KEMA UNPAD menyikap pendirian JTS dan PP yang ternyata belum memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan menuntut mereka untuk tidak menyelenggarakan aktifitas maksiat yang bertentangan dengan ruh Jatinangor sebagai Daerah Pendidikan. BEM UNPAD terlibat aktif dalam audiensi

dengan DPRD Kab Sumedang berkaitan dengan masalah ini.

- Jawa Barat Bebas Judi 2005

BEM Unpad bersama BEM Se Bandung Raya, Perguruan Silat, LSM, Ormas, OKP dan Tokoh Agama mengadakan Seminar dan Deklarasi 'Jawa Barat Bebas Judi 2005'. BEM UNPAD juga menjadi Ketua Delegasi dalam audiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan menuntut Gubernur untuk menandatangani Deklarasi Jawa Barat Bebas Judi. Selain Gubernur, Kajati Jabar dan Ketua DPRD Jabar juga menandatangani deklarasi tersebut. Anehnya, Kapolda pada saat itu, Irjen Edi Darnadi, tidak bersedia menandatangani deklarasi. Maka BEM Unpad bersama BEM Se Bandung Raya melakukan dialog dengan Komjen Sutanto sebelum dilantik menjadi Kapolri dan menuntut beliau untuk komitmen dengan pemberantasan judi. Hal itu terbukti, di awal kepemimpinannya Jenderal Sutanto melakukan gerakan pembersihan judi di Indonesia.

- Pendidikan

BEM KEMA UNPAD bersama BEM Se Bandung Raya melakukan aksi-aksi terkait dengan masalah pendidikan

terkait dengan penyikapan masalah RUU BHP, Realisasi 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, dan menjadikan pendidikan sebagai leading sector dalam pendidikan di Indonesia. Dalam menyikapi RUU BHP versi Juni 2005, BEM KEMA UNPAD memimpin aksi BEM Se-Indonesia yang dihadiri Ketua-ketua BEMnya di Gedung Sate untuk menolak RUU BHP versi Juni 2005. BEM UNPAD pun telah merumuskan CLD (Counter Legal Drafting) bersama BEM Fakultas. Terkait dengan realisasi 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, alhamdulillah Mahkamah Konstitusi memenangkan Judicial Review yang dilakukan PGRI. Hal itu tak lepas dari dukungan semua pihak atas terwujudnya hal itu, dan BEM UNPAD di antaranya.

- **Korupsi**

Korupsi merupakan extraordinary crime sehingga harus dilakukan extraordinary action untuk memberantasnya. BEM UNPAD mengadakan Seminar anti korupsi, audiensi dan aksi delegasi, aksi-aksi pemberantasan korupsi dan lain-lain. BEM UNPAD menyikapi kasus-kasus korupsi tingkat nasional dan juga regional Jawa Barat seperti kavling gate, jalak harupat gate dsb. BEM

UNPAD bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kapolri dan sebagainya untuk pemberantasan korupsi. Dalam dialog dengan Komjen Sutanto, BEM UNPAD menuntut reformasi kepolisian dan pemberantasan korupsi di tubuh POLRI. Berita terakhir mengabarkan pengusutan korupsi yang sampai melibatkan jenderal bintang tiga. Ini termasuk prestasi monumental karena baru pertama kali dalam sejarah, ada jenderal bintang tiga diusut serius masalah korupsi

- Perburuhan

BEM KEMA UNPAD beberapa kali aksi bersama SP FKK PTDI, SPN (Serikat Pekerja Nasional) dan sebagainya. BEM KEMA UNPAD juga melakukan pendampingan sebagai bentuk dukungan dalam aksi-aksi SP FKK PTDI, termasuk mempertanyakan masalah mereka dalam dialog dengan SBY di Bandung. BEM UNPAD juga mendukung aksi konvoy SP FK PTDI ke Jakarta. Alhamdulillah berita terakhir perjuangan mereka berhasil dan uang pesangon mereka dibayar 40 milyar, sisanya disepakati dalam berbagai bentuk

seperti penyisihan laba PTDI, bantuan unit usaha untuk mantan karyawan PTDI dan sebagainya

- TPST Bojong

BEM KEMA UNPAD mendukung perjuangan warga Bojong Kabupaten Bogor yang menolak kehadiran TPST di wilayahnya karena tempat yang sangat dekat dengan pemukiman, berbagai kebohongan yang menyertai proses administratif pendirian TPST, kedekatan dengan sungai yang jadi sumber air warga ketika kemarau, tindak kekerasan dan anarki yang dilakukan aparat terhadap warga dan lain sebagainya. Semua itu menyatukan tekad untuk menolak keberadaan TPST Bojong. Alhamdulillah sampai sekarang TPST Bojong tidak dioperasikan.

- Pencegatan SBY dan Dialog dengan RI-1

Pada tanggal 12 Juli 2005, BEM KEMA UNPAD bersama BEM Se Bandung Raya berhasil mencegah SBY dalam perayaan Hari Koperasi di Gasibu, depan Gedung Sate Jawa Barat. Mahasiswa berhasil menembus ring 1 pengamanan Presiden dan Presiden BEM UNPAD menyerahkan Surat Terbuka dari

Mahasiswa yang diserahkan oleh Presiden BEM KEMA UNPAD.

Pada tanggal 3 Januari 2006, Presiden BEM UNPAD menjadi Ketua Delegasi dialog mahasiswa Bandung dengan Presiden Republik Indonesia yang bertempat di RM Sari Sunda, Jl Sukarno Hatta, Bandung. Mahasiswa berdialog dengan Presiden terkait dengan berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, pendidikan, perburuhan, BBM, revitalisasi intelijen, kasus formalin dsb. Diskusi sempat memanas karena ada mahasiswa yang mengkritik dengan pedas, namun dialog bisa berjalan lancar. Beberapa point aspirasi yang disampaikan mahasiswa direalisasikan SBY, namun sebagian besar belum terlaksana. Dialog tersebut memiliki makna khusus dalam sejarah karena terakhir kali ketua-ketua lembaga mahasiswa berdialog dengan Presiden RI sekitar tahun 1972 ketika Ketua-Ketua Dewan Mahasiswa bertemu Presiden Soeharto, pertemuan itu berakhir dengan panas dan Soeharto marah kepada mahasiswa yang kemudian rezim orde baru memberlakukan NKK BKK untuk membungkam suara kritis mahasiswa.

- **BBM dan TDL**

BEM KEMA UNPAD juga menolak kenaikan BBM dan TDL. BEM KEMA UNPAD bersama yang lain melakukan aksi-aksi menentang kenaikan BBM di Bandung, bahkan beberapa kali kita juga melakukan aksi di depan istana negara bersama ribuan mahasiswa dari BEM Se Indonesia. Dalam aksi G30S/TK-BBM (Gerakan 30 September Tolak Kenaikan BBM), bahkan kita melakukan aksi sampai malam hari di sekitar istana negara menjelang pengumuman kenaikan BBM yang luar biasa (luar biadab?). BEM KEMA UNPAD juga melakukan aksi penolakan kenaikan TDL. Dalam aksi tanggal 9 Februari 2006, kita menyuarakan penolakan kenaikan TDL pada saat kedatangan SBY ke Bandung. Aksi damai mahasiswa, buruh, pers dan LSM tersebut memang dibubarkan oleh OKP dan ORMAS yang anarkis. Dua orang aktifis BEM UNPAD diamankan polisi yaitu Suratno (Menlu BEM KEMA UNPAD) dan Johan Khan (Wapres Bidang Polkum BEM UNPAD). Alhamdulillah mereka bisa dikeluarkan pada hari itu juga, dan bahkan aspirasi mahasiswa dan elemen-

elemen lainnya didengarkan oleh SBY: TDL pun tidak jadi naik akhir Maret 2006.

- Reformasi Kejaksaan

Dari hasil audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kita menyimpulkan perlu segera dibentuk dan dilantiknya Komisi Kejaksaan sebagaimana bidang kehakiman memiliki Komisi Yudisial. Sebenarnya komisi kejaksaan sudah terbentuk, hanya saja entah mengapa berbulan-bulan tidak dilantik oleh SBY. BEM UNPAD dan BEM Se Bandung Raya mengajukan tuntutan kepada SBY untuk segera melantik Komisi Kejaksaan sebagai bagian dari reformasi kejaksaan di Indonesia. Alhamdulillah akhirnya Komisi Kejaksaan dilantik oleh SBY pada bulan Maret 2006.

Advokasi yang dilakukan BEM UNPAD dilakukan secara seimbang dan proporsional antara dalam dan luar kampus. Aksi-aksi jalanan BEM UNPAD tahun ini berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hanya saja BEM UNPAD sekarang berusaha melakukan metode pergerakan yang lebih intelektual melalui seminar, kajian, diskusi dan aksi-aksi delegasi serta audiensi ke komisi DPR (seperti komisi VII, komisi X, komisi XI), pimpinan DPR, DPD

(Dewan Perwakilan Daerah), Presiden RI, Jubir Kepresidenan, Menteri-menteri, Ketua MPR, Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, Bupati Sumedang, DPRD Sumedang, Sekda Kota Bandung, Rektor, Tim BHPT Unpad dan sebagainya.

BEM KEMA UNPAD 2005-2006 hampir berakhir. Namun segala kenangan dan memori yang menghimpun semua cerita, cinta, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan, persaudaraan, tawa dan tangis yang menyertainya tak kan pernah berakhir. Karena sebenarnya kekuatan inti BEM UNPAD ada pada spirit dan idealisme yang mewarnainya, maka perjuangan itu tidak akan pernah mati.

Memang, fakta berbicara bahwa apa yang terjadi di BEM UNPAD selama satu tahun tidak semuanya sesuai ekspektasi. Keinginan dan harapan kita jauh lebih besar dibandingkan kemampuan kita yang terbatas. Namun, sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, maka ia menjadi bagian dari perbaikan Universitas Padjadjaran dan bangsa yang kita cintai.

*“Betapa inginnya kami agar umat ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang telah mengharu biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusan”*

*(Hasan Al Banna)*

**Jatinangor, April 2006**

**MAHASISWA  
DAN  
NEGARA**

## **Permasalahan Akut Bangsa Ini**

Oleh : Muhammad Ikhlas Thamrin

Coba anda ulang baca koran-koran, atau majalah-majalah dan bahkan media elektronik baik TV maupun radio akhir-akhir ini, maka anda akan menemukan berita seperti ini : sengketa Blok Cepu yang akhirnya dimenangkan Exxon sebagai “komandan” pengelolaannya, ribuan seniman Solo menggelar aksi menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi, ribuan rakyat Papua melakukan aksi menentang segera dibatakkannya kontrak karya PT. Freeport bahkan baru saja tiga polisi tewas mengenaskan di kampus Universitas Cendrawasih oleh mahasiswa, rencana kenaikan TDL oleh pemerintah, atau bahkan rencana kenaikan gaji anggota DPR, dan yang paling memilukan adalah koruptor dana BLBI trilyunan rupiah bertamu ke Istana Negara, sampai pada menteri Sekteris Kabinet yang diduga telah memberikan surat sakti untuk memuluskan tender salah satu perusahaan. Tulisan ini ingin menguraikan, sesungguhnya rentetan berita tersebut sebenarnya menyiratkan suatu permasalahan bangsa ini.

Penulis mengidentifikasi ada empat permasalahan akut bangsa selama ini yang jika tidak tertangani dengan baik dan serius maka yang akan terjadi adalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang tak berdaulat, tak memiliki masa depan yang cerah. Pertama tentang kemandirian, jika dulu Soekarno pernah mengatakan dengan berani *Go to Hell Amerika*, atau politik berdikari-nya (Politik Berdiri di atas Kaki sendiri dengan segenap potensi dan kemampuan), maka saat ini yang terjadi adalah hal itu tak nampak di tubuh pemerintahan saat ini. Kasus Blok Cepu yang sesungguhnya merupakan asset bangsa yang sangat kaya yang sebenarnya harus dikelola oleh bangsa ini sendiri ternyata diberikan pengelolaannya kepada perusahaan Amerika Serikat (Exxon) dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penyumbang dana kampanye Bush dulu. Dan kini, selama 30 tahun yang akan datang perusahaan Amerika tersebut mempunyai hak untuk mengeksploitasi kekayaan alam bangsa ini.

Tak hanya itu, bagaimana perusahaan Amerika melalui Freeportnya yang telah memulai cengkraman eksploitasi di tanah Papua sejak tahun 1969 atau telah 37 tahun dan kini kontrak karya tersebut masih terus

diperpanjang. Sungguh tanah Papua tersebut menyimpan kekayaan alam yang sangat berlimpah, tapi ironis justru masyarakat Papua tak mendapat apa-apa, lingkungan menjadi rusak, yang terjadi adalah kemiskinan menimpa Papua, bahkan diisukan perusahaan ini telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi APBN-nya Amerika atau dengan kata lain Indonesia menjadi penyumbang dana bagi pembangunan di Amerika. Maka jika seperti ini kemarahan Papua melalui mahasiswa dengan tewasnya tiga polisi seakan menjadi puncak kemarahan, wujud protes!

Penguasaan asset bangsa ini oleh asing sesungguhnya berawal dari kuatnya intervensi berupa penetrasi modal maupun keuntungan legitimasi politik pejabat lokal. Seperti pengakuan Jhon Perkins dalam bukunya Preman Ekonomi bahwa, dia dulu pernah ditugaskan untuk merayu pejabat Indonesia agar meminjam dana dari Amerika untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Tidak hanya itu perusahaan-perusahaan yang nantinya akan “membantu” adalah perusahaan Amerika, atau artinya sesungguhnya perputaran uang tetap berada di Amerika. Sebenarnya pikiran intinya adalah

bagaimana menjadikan Indonesia terperangkap utang dan setelah itu maka intervensi politik menjadi sebuah kepastian yang dilakukan oleh Amerika. Skenario Jhon Perkins (dia mengaku dan menyebut dirinya sebagai preman ekonomi) saat ini sudah menjadi kenyataan, Indonesia tak bernyali ketika sudah diancam oleh Amerika dan pejabat pemerintahan kita juga seolah tak bisa berbuat apa-apa, yang pasti rakyatlah yang akan dirugikan dengan kebijakan yang pro Amerika. Kedatangan Menteri Luar Negeri AS semakin menguatkan fakta ini, sehari sebelum kedatangannya Exxon telah ditetapkan sebagai komandan eksploitasi Blok Cepu dan selama 30 tahun kita akan menyaksikan trilyunan rupiah akan dilarikan ke Amerika. Menyebalkan!

Kedua, maraknya praktek prostitusi, pergaulan bebas dengan ditandai maraknya seks bebas dikalangan remaja dan pemuda, merebaknya industri pornografi dan sejenisnya telah memberikan makna sesungguhnya bahwa permasalahan akutnya adalah memburuknya wajah moralitas bangsa. Kita bisa menyaksikan bagaimana para pelajar SMU melakukan adegan seks dan direkam di ponsel mereka, yang paling menyeramkan itu dilakukan di

Sekolah! Atau pelajar di Kota Solo ini pernah terjaring oleh aparat karena telah menyewa kamar di salah satu villa di Tawangmangu di saat jadwal sekolah. Saya sangat meyakini bahwa para pelajar dan pemuda melakukan itu semua karena memang ada penetrasi budaya permisif dan sangat sistematis oleh industri seks seperti maraknya tabloid, CD, atau layanan model bugil yang terus dipasarkan oleh industri tersebut dan memang yang menjadi sasarannya adalah pelajar dan pemuda karena ketika pelajar dan pemuda moralnya hancur maka masa depan bangsa akan hancur pula. Proyek budaya permisif ini merupakan proyek berjangka panjang karena tergetnya adalah memandulkan potensi para pemuda Indonesia.

Lalu kegelisahaan ini dicoba untuk diantisipasi oleh Wakil Rakyat kita dengan merumuskan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Sebuah niat mulia tentunya, tetapi yang terjadi muncul banyak protes, ada yang beralasan menghambat kreatifitas seni, terlalu menyudutkan perempuan, akan menghambat laju bisnis, terlalu kental warna islamnya, sampai pada ancaman jika RUU ini tetap akan disahkan maka akan keluar dari wilayah NKRI. Tetapi jika kita merenung dengan akal dan nurani

yang tulus, tentunya RUU ini merupakan sebuah keniscayaan. Amerika saja yang liberal sekalipun memiliki aturan tentang pornografi, lalu Indonesia yang dikenal dengan adat timurnya dengan ciri khasnya adalah mengedepankan nilai, etika dan moralitas tak mengatur tentang ini, maka tentunya Indonesia telah sangat liberal dibandingkan dengan Amerika sekalipun dan ini akan menghilangkan jati diri bangsa ini. Persoalan bangsa tentang memburuknya wajah moralitas bangsa ini merupakan persoalan akut karena jika rusak moral maka nilai-nilai tentang hubungan sosial, tentang bernegara juga akan rusak.

Ketika nilai-nilai itu telah lenyap, maka yang akan terjadi adalah hilangnya rasa malu, dan jika rasa malu telah hilang maka manusia yang telah dianugrahi akal untuk berpikir yang hal ini menjadi kelebihannya dengan binatang, akan turun derajatnya. Manusia akan lebih rendah dari binatang, lihat saja bagaimana kasus diawal tadi, seks bebas telah merebak, direkam dan disebar, atau praktek korupsi karena telah hilang rasa malu, pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru merampok, membangkrutkan Negara, atau seperti para koruptor yang

bertamu ke istana Negara dan di terima dengan “karpet merah” oleh pejabat Negara semuanya sudah tak punya rasa malu. Menyebalkan!

Permasalahan ketiga adalah hilangnya kepekaan, sensitifitas, atau simpati dari pejabat Negara kita. Hal ini bisa disaksikan ketika rakyat sudah terhimpit krisis, pemerintah justru menaikkan harga BBM setinggi langit Oktober lalu. Disisi lain anggota dewan kita dan pejabat eksekutif pemerintahan ini mengeluarkan aturan menaikkan gaji mereka sendiri. Tidak berhenti sampai disini, belum reda dampak akibat kenaikan harga BBM, pemerintah kembali berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik dan sekali lagi anggota dewan kita juga rencananya akan menaikkan gaji mereka, alasannya ini untuk tunjangan komunikasi. Suryama anggota dari FPKS yang membocorkan rencana itu justru akan dilaporkan ke badan kehormatan.

Busung lapar terjadi, wabah flu burung, sampai pada gizi buruk, ditanggapi oleh para menteri yang dikoordinatori oleh Aburizal Bakrie justru menjawab tak ada masalah. Lalu partai Politik kita yang sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari rakyat sibuk sidang untuk suksesi kepemimpinan, tak sedikit yang berakhir dengan konflik,

semuanya ingin meraih kekuasaan. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dengan agendanya masing-masing. Pemerintah yang seharusnya merangkul komponen bangsa untuk bersama-sama mengatasi krisis ini justru menjadi pemicu masalah, rakyat seakan tak percaya akan janji perubahan. Semuanya persoalan ini berangkat dari hilangnya kepekaan dari diri semua komponen bangsa., semua sibuk dengan agenda masing-masing, sudah tak peduli dengan sesama, semua bertarung untuk mendapatkan target-target politiknya. Memprihatinkan!

Permasalahan keempat adalah hilangnya keberanian untuk mengatakan benar, berani untuk menjadi yang terdepan demi harkat dan martabat bangsa. Hal ini ditimbulkan karena masih memandang kekuasaan yang diperoleh haruslah tetap dipertahankan dengan segala cara karena dengan kekuasaan maka kekayaan bisa diraih, pengaruh bisa ditangan. Tentunya SBY layak meniru Hugo Chavez Presiden Venezuela walaupun kualitas kehidupan berbangsa masih di bawah Indonesia tetapi Chavez sangat lantang untuk menyatakan menolak atau bahkan melawan siapa saja yang akan menggaggu negaranya. Atau

Ahmadinejad Presiden Iran juga melakukan keberanian itu, dan terakhir kemenangan HAMAS dalam pemilu yang langsung di balas oleh Israel dan AS dengan memboikot tidak mengucurkan dananya padahal Palestina sangat tergantung dengan kucuran dana tersebut, tetapi di jawab oleh HAMAS dengan berani bahwa kemerdekaan Palestina tidak bisa digantikan dengan uang!

Lalu Indonesia, sangat jauh dengan situasi keberanian ini. Yang terjadi adalah seakan-akan para pejabat kita tunduk, dan tak mempunyai harga diri. Harus ditegaskan bahwa kedaulatan sebuah Negara sangat ditentukan oleh sejauhmana kedaulatan dari sang pemimpin Negara. Jika Pemimpin sudah tak mempunyai harga diri, keberanian maka Negara ini akan menjadi Negara yang tak berdaulat. Rasa-rasanya kenyataan ini sudah nampak dan terasa saat ini.

Hilangnya kemandirian, merosotnya moralitas bangsa, lenyapnya sensitifitas dan pudarnya keberanian dari bangsa dan khususnya para pemimpin negeri ini menjadikan Indonesia saat ini sedikit demi sedikit kehilangan kewibawaannya. Maka jika ini terus ada dalam diri para pemimpin bangsa ini maka saya sangat yakin

Indonesia akan lenyap dari peta dunia dan yang ada adalah Negara Jawa, Negara Sulawesi dan sebagainya, karena semua rakyat tak puas akan kepemimpinan nasional maka yang ada adalah memisahkan diri dari NKRI. Tak ada lagi Indonesia yang bersatu dan berdaulat.

Maka jika kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan satu-satunya jalan adalah bangkitkan nilai-nilai itu ada dalam setiap diri kader bangsa, bahwa kita harus mandiri, kita harus memiliki moralitas dan integritas, kepekaan dengan sekitar dan tentunya berani untuk mengatakan yang benar walaupun jiwa menjadi pertaruhannya.

Saya kira inilah rahasianya mengapa para pejuang dulu berhasil meraih dan mempertaruhkan kemerdekaan walaupun dengan bambu runcing karena di dadanya ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dengan tulus dan berwibawa, tak mau tunduk. Saya sangat yakin kita tak akan mengkhianati perjuangan para pejuang bukan?

**Solo, Mei 2006**

# **AGENDA GERAKAN DI MASA TRANSISI<sup>10</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

*Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan  
Kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan  
Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan  
Sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia*

## **AGENDA GERAKAN**

Kawan-kawan mahasiswa ...

Hampir sewindu gerakan reformasi ternyata Indonesia tidak berubah ke arah yang lebih baik. Reformasi mati suri: KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) merajalela, penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat masih terjadi di mana-mana. Teramat banyak masalah kebangsaan yang membutuhkan partisipasi dan kontribusi mahasiswa untuk menyelamatkan bangsa ini untuk segera keluar dari masa transisi demokrasi.

---

<sup>10</sup> Tulisan ini dimuat di Koran Kampus Interval edisi khusus Agustus 2005 untuk menyambut mahasiswa baru 2005

Tidak hanya itu, di Universitas Padjadjaran pun bukan berarti sepi dari masalah. Rencana UNPAD menjadi BHPT merupakan masalah krusial yang perlu disikapi. UNPAD-pun sedang dalam masa transisi yang akan sangat menentukan masa depan almamater tercinta, apakah menuju profesionalisme lembaga atau justru komersialisasi pendidikan?

Oleh karena itu, kita perlu menyusun Agenda Gerakan Mahasiswa UNPAD di masa transisi ini, baik dalam skala makro maupun skala mikro. Setidaknya ada beberapa tawaran agenda utama Gerakan Mahasiswa Universitas Padjadjaran:

### **Agenda Nasional, Regional dan Lokal**

Agenda ini berkaitan dengan permasalahan Nasional maupun level Jawa Barat dan Kota/Kabupaten sekitar Universitas Padjadjaran

- Revolusi Pemberantasan Korupsi  
Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary*, maka langkah-langkah yang dilakukan pun harus langkah-langkah yang tidak biasa. Berikut ini adalah beberapa tawaran konsep yang bisa dilakukan:

- Asas Pembuktian Terbalik  
Konsep ini pernah diusulkan oleh Abdurrahman Wahid saat menjadi Presiden. Konsep ini pun bukan hal yang baru karena pernah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan mengaudit kekayaan semua pejabat, jika ada harta yang diragukan serta sang pemilik tidak bisa membuktikan kehalalan sumbernya, maka harta tersebut disita dan dimasukkan kas negara. Dalam waktu sekitar dua tahun korupsi disikat habis dan rakyat menjadi makmur sejahtera
- Perlindungan Saksi Pelapor  
Indonesia belum memiliki UU Perlindungan Saksi. Maka tak jarang pelapor justru dianggap bersalah karena dianggap mencemarkan nama baik. Kasus Khairiyansyah, Lindu Novo dan lain-lain menjadi pemicu dan pemacu pentingnya keberadaan UU Perlindungan Saksi.
- Tuntutan ganda dengan *Money Laundry*  
Pendekatan *money laundry* merupakan pendekatan baru. Selama ini koruptor hanya dituntut dengan UU Korupsi dan seringkali uang

yang dikorupsi sudah menghilang terlebih dahulu sehingga sulit dibuktikan. Apabila tuntutan disandingkan dengan *money laundry*, maka rekening tersangka bisa dibekukan dan hukumanpun bisa berlipat ganda: pasal pidana korupsi dan pasal pidana pencucian uang sekaligus.

- Reformasi Birokrasi

Kultur birokrasi yang korup membutuhkan reformasi birokrasi dengan melakukan rasionalisasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan PNS dan sebagainya

- Hukuman berat bagi koruptor

Hukuman yang berat tidak hanya kepada sang koruptor, tapi juga keluarganya yang tahu dan membiarkan bahkan menikmatinya. Ada berbagai cara memberi hukuman berat untuk koruptor. Kalau perlu dihukum cambuk, terus dihukum seumur hidup dan setelah itu baru dihukum mati... (he...he....)

- Revolusi Pendidikan Indonesia
  - Realisasi min 20% APBN dan APBD untuk pendidikan
 

UUD 1945 hasil amandemen mengamanatkan anggaran APBN dan APBD minimal 20% untuk pendidikan, di luar biaya pendidikan kedinasan dan gaji pendidik. Namun faktanya sekarang masih jauh di bawah 10%. Realisasi atas amanat UUD 1945 tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya
  - Tolak RUU BHP yang sarat nuansa komersialisasi
 

RUU BHP merupakan aturan yang akan mengubah wajah pendidikan Indonesia. RUU BHP versi terakhir (versi 24 Juni 2005) masih sarat nuansa komersialisasi pendidikan dan berbagai permasalahan lain yang bersifat prinsipil. Selama masalah-masalah tersebut berada di dalam RUU tersebut, maka tiada kata lain kecuali: Tolak!!
  - Pendidikan sebagai Leading Sector pembangunan Indonesia

Hari ini pendidikan dianaktirikan dalam pembangunan. Padahal, jika ingin merekonstruksi bangsa yang sedang terpuruk ini, maka seharusnya pendidikan menjadi prioritas pertama dan utama dalam pembangunan

- Tolak Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum menyimpan potensi kedzaliman yang sangat berbahaya bagi hak-hak dasar warga. Pemerintah bisa mengambil alih tanah warga atas nama kepentingan umum, padahal kenyataannya untuk kepentingan komersial

- Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Gerakan mahasiswa juga gerakan moral yang peduli dengan pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba, perjudian dan sebagainya.

### **Agenda Kampus**

Agenda ini berkaitan dengan masalah internal kampus UNPAD. Pertemuan BEM UNPAD dan BEM Fakultas Se-Universitas Padjadjaran menyepakati Empat

Tuntutan Mahasiswa yang menjadi Agenda Internal Gerakan Mahasiswa Universitas Padjadjaran:

- Tolak Komersialisasi Pendidikan di Universitas Padjadjaran

Komersialisasi pendidikan di sini terjadi ketika kualitas pendidikan terabaikan dikarenakan kuantitas dan mengejar finansial. Komersialisasi pendidikan juga terjadi ketika kapasitas finansial lebih menentukan keberlangsungan pendidikan seseorang dibandingkan kapasitas intelektual.

- Laksanakan Prinsip **"Dari, Oleh dan Untuk Mahasiswa"** dalam pengelolaan Lembaga Kemahasiswaan

Prinsip **"Dari, Oleh dan Untuk Mahasiswa"** merupakan prinsip pengelolaan lembaga kemahasiswaan yang seringkali terlupakan oleh para aktifis lembaga kemahasiswaan dan belum terealisasi dalam aktifitas lembaga kemahasiswaan di Universitas Padjadjaran. Masih sering ada intervensi berlebihan terhadap pengelolaan lembaga kemahasiswaan.

- Optimalkan Pelayanan terhadap kebutuhan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Fasilitas dll)

“Selamat Datang di Kampus Minim Fasilitas”. Beberapa tahun lalu spanduk dengan tulisan tersebut terpampang di gerbang Unpad. Sepertinya ruh dari tulisan tersebut masih relevan untuk hari ini. Seringkali mahasiswa mempertanyakan fasilitas yang minim di Universitas Padjadjaran. Tentunya jangan sampai hal ini menjadi wacana abadi tanpa perubahan kongkret.

- Libatkan Mahasiswa dalam pengambilan kebijakan di Universitas Padjadjaran

Mahasiswa adalah stakeholder terbesar dari kampus. Mahasiswa juga adalah pemilik kampus yang menjadi mitra dalam menjunjung tinggi harkat martabat kampus. Hari ini tak sedikit kebijakan(?) berkaitan dengan mahasiswa yang muncul dengan tiba-tiba dan proses yang tidak transparan. Sebagai contoh, penyusunan konsep BHPT UNPAD berlangsung dengan tertutup dan tidak transparan. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi logis prinsip kemitraan dalam pola relasi mahasiswa dan birokrat kampus (rektorat, dekanat, jurusan).

## **Agenda Insidental**

Agenda ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan baru yang perlu disikapi oleh mahasiswa sebagai wujud advokasi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, diantaranya:

- **Tolak Pengoperasian TPST Bojong**  
Kasus TPST Bojong sebenarnya sudah lama (sejak 2001). Kasus tersebut kembali mencuat ketika ada rencana bulan Agustus 2005 dilakukan uji coba TPST Bojong yang ditentang warga. Dari berbagai aspek, pengoperasian TPST Bojong memang tidak layak. Bahkan, DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Jawa Barat, DPR RI, Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup, BPPT semuanya merekomendasikan supaya TPST Bojong direlokasi. Namun, Bupati Kabupaten Bogor, Gubernur DKI dan PT WGS tetap memaksakan upaya pengoperasian TPST
- **Masalah pendirian Mall di kawasan Pendidikan (Jatinangor Town Square dan Padjadjaran Plaza)**  
Jatinangor Town Square dan Padjadjaran Plaza telah dibangun padahal belum memiliki AMDAL. Selain itu ada dampak-dampak sosial yang mungkin terjadi

karena pendirian mall di kawasan pendidikan. Ini merupakan masalah yang perlu disikapi secara kritis oleh mahasiswa.

- Dan lain-lain

Kesadaran yang komprehensif, soliditas dan sinergisitas berbagai elemen merupakan prasyarat kesuksesan agenda-agenda di atas. Mari kita himpun potensi terserak. Bersatu sehati tuntaskan perubahan....

Wahai mahasiswa Universitas Padjadjaran....

Perjuangan telah dimulai.....

Salam revolusi.....!!!!

Jatinangor, 1 Agustus 2005

# **POROS BARU PERGERAKAN MAHASISWA**

Oleh : Indra Kusumah

## **Menggugat Mitos Pergerakan Mahasiswa Indonesia**

*“Pergerakan mahasiswa hangat di Yogyakarta, panas di Jakarta dan mati di Bandung”.*

Demikianlah mitos yang berkembang di beberapa aktivis mahasiswa melihat kondisi pergerakan mahasiswa di Bandung beberapa tahun terakhir ini yang kurang terlihat dinamika pergerakannya dalam percaturan lokal maupun nasional. Mitos itu pun sepertinya tidak terlalu salah tatkala kita melihat gerakan mahasiswa selama ini yang mencuat namanya sering dimotori oleh wilayah Jakarta dengan UI-nya, dan Yogyakarta dengan UGM-nya.

Poros pergerakan mahasiswa yang terpusat pada UI dan UGM ini masih terlihat sampai akhir 2002. Seperti biasa, setiap akhir tahun gerakan mahasiswa mengadakan Refleksi Akhir Tahun untuk mengevaluasi kondisi bangsa sekaligus merancang langkah perjuangan ke depan. Momentum Akhir Tahun ini menarik untuk dicermati karena dengannya bisa tergambarkan peta pergerakan mahasiswa

di Indonesia sekaligus isu utama dan pertama yang akan diangkat pada tahun selanjutnya.

Refleksi Akhir Tahun 2002 Pergerakan Mahasiswa diselenggarakan oleh berbagai elemen gerakan. Namun, Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan besar-besaran dan cukup menggambarkan peta pergerakan mahasiswa adalah berikut ini:

*Pertama*, Refleksi Akhir Tahun 2002 yang diselenggarakan oleh BEM Se-Jabotabek di Jakarta, dan oleh BEM UGM di Yogyakarta akhir Desember 2002 yang keduanya mendapat dukungan dari elemen-elemen intrakampus, ekstrakampus dan tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Mega-Hamzah.

Refleksi Akhir Tahun ini menilai bahwasanya Pemerintah telah gagal mengemban amanat reformasi karena telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat sehingga tidak layak dipertahankan. Refleksi Akhir Tahun ini pun tampaknya menjadi momentum bersatunya elemen-elemen mahasiswa yang selama ini terpolarisasi karena sekat-sekat ideologi, isu yang dihasilkan disepakati berbagai elemen baik elemen kanan, kiri, maupun moderat.

*Kedua*, Refleksi Akhir Tahun 2002 yang diselenggarakan di Bali oleh beberapa elemen ekstra kampus. Refleksi ini dilaksanakan dengan para pembicara utama dari kalangan pemerintahan seperti Laksamana Sukardi, Yusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono dan lain-lain. Acara ini digelar berdekatan dengan perayaan ulang tahun Taufik Kiemas di Bali yang mengundang anggota DPR RI dan menghabiskan dana miliaran rupiah.

Namun, ada isu tak sedap berkaitan dengan acara Refleksi Akhir Tahun di Bali ini. Majalah Forum Keadilan no 42, 23 Februari 2003, memberitakan bahwa acara yang digelar cukup mewah ini –setidaknya untuk ukuran mahasiswa- disinyalir dibiayai pula oleh Taufik Kiemas. Selain itu, tersebar berita di beberapa media massa bahwasanya beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang hadir di sana mendapatkan dana pula dari Taufik Kiemas. Tentu saja kita berharap hal itu benar-benar hanya sebuah isu.

Meski demikian, isu tersebut ternyata mengundang konflik internal beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang hadir di Bali. Bahkan, acara di Bali menjadi salah satu di antara pemicu konflik dalam tubuh

HMI yang menyebabkan ketua umum PB HMI hasil kongres, Cholis Malik, “dipecat” dari jabatannya. Acara di Bali ini pun membuka konflik antara beberapa ketua organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan dengan redaksi salah satu koran nasional yang memberitakan isu dana Taufik Kiemas untuk organisasi-organisasi yang hadir dalam acara di Bali tersebut.

Menjelang pelaksanaan dua Refleksi Akhir Tahun di atas, beberapa ketua BEM di Bandung mengadakan beberapa pertemuan untuk menyikapi undangan menghadiri refleksi akhir tahun yang diadakan kedua belah pihak. Beberapa BEM di Bandung yang mulanya akan menghadiri Refleksi Akhir Tahun di Bali membatalkan rencana demi melihat format acaranya. Mereka menggagas diadakannya acara Refleksi Akhir Tahun sendiri dengan format yang berbeda, jika di Bali pembicara utamanya dari pihak pemerintah dan di Jakarta pembicara utamanya adalah tokoh-tokoh kritis terhadap pemerintahan, maka di Bandung diadakan Seminar Rakyat dengan pembicara utama adalah rakyat dari elemen pedagang kaki lima, ketua RW, pengamen jalanan dan Pegawai Negeri

Sipil yang diwakili guru, sementara para pejabat hanya menjadi pendengar.

Seminar rakyat ini berhasil diselenggarakan. Para pembicara yang merepresentasikan rakyat semuanya hadir dan secara jujur mengungkapkan penderitaan yang langsung mereka alami diselingi dengan lagu-lagu kritik sosial dari para pengamen jalanan. Sayangnya, tidak ada satu pejabat pun yang hadir, baik dari anggota DPRD Jawa Barat, maupun dari Pemprov Jawa Barat. Padahal, mereka diundang dan acaranya diselenggarakan tepat di depan gedung sate dan gedung DPRD!.

Ternyata, pertemuan-pertemuan serta Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Bandung menjadi cikal bakal terbentuknya BEM Se-Bandung Raya yang di kemudian hari menjadi poros baru pergerakan mahasiswa di Indonesia dengan aksi-aksi yang mengagetkan berbagai kalangan pemerhati pergerakan mahasiswa: Ternyata, ada sebuah kekuatan baru yang muncul di Bandung dan layak diperhitungkan di tataran nasional!.

## **BEM Se-Bandung Raya: Membangun Gerakan Permanen dan Ekstensifikasi Jaringan**

Mulanya, pertemuan-pertemuan ketua BEM di Bandung tersebut berlangsung secara informal dan hanya di hadiri beberapa ketua BEM, seperti dari Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Islam Bandung. Namun, manakala mereka menyadari adanya kesamaan pandangan dalam menyikapi permasalahan bangsa ini, mereka bersepakat menghimpun diri dalam wadah pergerakan permanen dan mengajak BEM-BEM yang lain.

Maka dideklarasikanlah BEM Se-Bandung Raya sebagai wadah permanen pergerakan mahasiswa. Kehadiran BEM Se-Bandung Raya ternyata disambut hangat oleh BEM-BEM yang lain di daerah Bandung. Tercatat puluhan BEM yang bergabung, di antaranya dari Unpad, ITB, UPI, Unpar, STT Telkom, Unisba, STHB, Unpas, Uninus, Unjani, Unbar, UNB, STT Tekstil, STSI, STMIK Bandung, STMIK MI Widyaloka, STMIK Padjadjaran, IAIN SGD, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Pos, Politeknik Ganesha, Unikom, STDI,

Politeknik Manufaktur, IKOPIN, ST INTEN, STMIK LIKMI, ARS International School dan lain-lain.

Aksi-aksi yang dilakukan BEM Se-Bandung Raya mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Hal ini terbukti dengan eskalasi yang semakin masif dari hari ke hari, aksi yang awalnya hanya puluhan orang, terus bertambah. Bahkan, akhir-akhir ini BEM Bandung Raya mampu memobilisasi sekitar 20.000 masa yang terdiri atas organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus, organisasi buruh dan elemen-elemen masyarakat lainnya di Jawa Barat, sebuah angka yang fantastis untuk ukuran sebuah gerakan yang baru muncul.

Aksi-aksi BEM Se-Bandung Raya mendapat simpati karena dilakukan dengan cara yang elegan dan damai, meskipun beberapa kali harus menghadapi tindakan represif aparat kepolisian seperti kasus 26 Februari 2003 di Bandung dan 25 Juli 2003 di Jakarta. Tindakan represif aparat ternyata tidak mematikan semangat anak-anak muda ini, justru melipatgandakan semangat yang bertalutalu dalam dada mereka, mengundang simpati publik dan menyebabkan semakin membuminya isu-isu yang diusung gerakan mahasiswa. Sang waktu menghantarkan BEM Se-

Bandung Raya semakin besar dan matang dalam pergerakannya.

Sungguh, masyarakat memiliki harapan besar semakin menguat serta sinergisnya kekuatan-kekuatan pro reformasi yang memperjuangkan aspirasinya demi masa depan yang cemerlang, sebuah peran yang selama ini dimainkan oleh Poros Baru Pergerakan Mahasiswa Indonesia: BEM Se-Bandung Raya.

Selamat berjuang Mahasiswa Indonesia!

Jatinangor, Juli 2003

# **GERAKAN MAHASISWA DAN PEMILU 2004**

Oleh : Indra Kusumah

## **Quo Vadis Gerakan Mahasiswa?**

Ada yang menarik dengan gerakan mahasiswa hari ini. Isu yang beberapa waktu lalu berkembang bahkan mampu melahirkan gerakan cukup masif tiba-tiba seolah mati. Masyarakat masih mengingat beberapa waktu lalu mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan BBM, TDL dan Telepon, penolakan terhadap kebijakan privatisasi BUMN sampai isu turunkan Megawati dan Hamzah Haz.

Ironinya, hari ini isu-isu tersebut tidak lagi bergema. Ada apa dengan gerakan mahasiswa? Padahal BBM, TDL dan Telepon senantiasa mungkin naik kembali saat-saat ini, privatisasi BUMN terus berjalan hingga hari ini (seperti penjualan PLN dalam waktu dekat), dan elit-elit politik pun masih terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Ada apa dengan gerakan mahasiswa? Apakah mahasiswa telah kehabisan energi? Apakah mahasiswa menyerah? Apakah mahasiswa merasa bahwa isunya

ternyata tidak mendapat simpati masyarakat? Atau apakah mahasiswa merasa ada isu lain yang hari ini lebih mengena dengan masyarakat dan bisa menjadi titik tolak perubahan Indonesia, yakni Pemilu 2004?.

Tidak! Mahasiswa tidak akan pernah kehabisan energi karena sumber energinya adalah nurani keprihatinan atas penderitaan masyarakat yang tidak akan pernah habis. Mahasiswa pun tidak akan menyerah karena mereka generasi muda yang memiliki gairah perjuangan yang tidak mengenal kamus menyerah. Maka agenda-agenda advokasi masyarakat serta perlawanan terhadap otoritarianisme kekuasaan akan tetap menjadi agenda abadi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa pun senantiasa mendapat simpati rakyat, meskipun dalam kondisi tertentu mahasiswa mendapat antipati dari masyarakat yang justru dibelanya karena ketidaktahuan mereka, itu merupakan konsekuensi perjuangan.

Sepertinya, stagnasi gerakan mahasiswa hari ini lebih disebabkan dinamika politik mutakhir menuntut mahasiswa untuk melakukan evaluasi gerakan yang telah dibangun sekaligus melakukan reorientasi strategi untuk merespon perkembangan sosial politik Indonesia yang luar

biasa, terutama berkaitan dengan isu besar yang beberapa bulan ke depan akan menjadi wacana utama bagi seluruh anak bangsa: Pemilu 2004!.

Gerakan mahasiswa memasuki momentum yang sangat rentan dan sublim. Pemilu 2004 menyimpan harapan sekaligus jebakan untuk eksistensi gerakan mahasiswa serta masa depan Indonesia. Pemilu 2004 merupakan instrumen demokrasi yang bagi sebagian orang dianggap solusi paling rasional untuk perubahan bangsa, sementara sebagian lain menganggap pemilu 2004 menyimpan potensi kerusakan lebih dahsyat untuk masa depan Indonesia.

Sikap dari elemen-elemen gerakan mahasiswa bermacam-macam terhadap pemilu 2004, baik elemen ekstra kampus maupun intra kampus. Sikap elemen gerakan mahasiswa ekstra kampus biasanya tidak jauh beda dengan organisasi masa atau organisasi politik yang menjadi induknya karena kedekatan ideologis, historis, visi, misi dan kepentingan. Berbeda dengan intra kampus yang lebih disebabkan kekuatan atau arus pemikiran yang dominan di kampus bersangkutan, sehingga lebih bisa

dianggap representasi sikap mahasiswa secara umum di kampus tersebut.

## **Sikap Gerakan Mahasiswa dan Perkembangan Pemilu 2004**

Sikap gerakan mahasiswa senantiasa merupakan hasil kajian kritis para aktifisnya terhadap wacana yang akan digulirkan, maka sikap-sikap yang dihasilkan sangat dipengaruhi dinamika yang terjadi seputar masalah tersebut. Sikap gerakan mahasiswa terhadap pemilu 2004 pun sangat dipengaruhi dengan penilaian terhadap dinamika yang menyertai terselenggaranya pemilu 2004, mulai dari proses penetapan peraturan dan perundangan pemilu 2004, klausul-klausul di dalamnya, kesiapan pelaksanaan pemilu, sistem pemilu serta kondisi-kondisi riil mutakhir berkaitan dengan pemilu 2004.

Studi kritis mahasiswa melihat banyak hal yang menjadikan pelaksanaan pemilu 2004 berada dalam kondisi kritis. Hal-hal berikut cukup menjadi pertimbangan:

1. Penetapan Undang-Undang Pemilu yang menyediakan rentang waktu sangat singkat untuk

- pembentukan perangkat-perangkat pemilu dan sosialisasinya
2. Klausul-klausul kontroversial dalam UU Pemilu yang dianggap menodai rasa keadilan masyarakat dan menyebabkan banyak pihak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi
  3. Kekurangsiapan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU pusat sampai daerah karena mereka menjadi korban sistem baru yang diberlakukan selain keterbatasan dana dan masalah teknis lainnya
  4. Sistem pemilu yang baru sehingga membutuhkan sosialisasi dalam waktu cukup lama, terutama berkaitan dengan pemilihan presiden secara langsung serta sistem dua pintu yang diberlakukan sehubungan dengan mulai adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  5. Informasi intelijen tentang adanya usaha-usaha pemboikotan pemilu 2004 yang dikemukakan panglima TNI.

6. Pro kontra masalah ketidaksiapan masyarakat (atau ketidaksiapan elit politik?) terhadap pemberlakuan sistem baru. Dan lain-lain.

Hal-hal di atas menjadi pertimbangan para aktifis gerakan mahasiswa dalam memformulasikan sikap dan menentukan pola gerakan ke depan. Sampai saat ini berbagai diskusi dan kajian kritis terus dilakukan diantara para aktifis gerakan mahasiswa berbagai kampus untuk membangun kesamaan sikap sekaligus aliansi strategis menghadapi pemilu 2004. Aliansi strategis ini diharapkan mampu menghasilkan kesatuan gerakan yang berlangsung lebih masif dibandingkan sebelumnya.

Pada dasarnya ada tiga arus besar penyikapan pemilu 2004 di kalangan aktifis gerakan mahasiswa, yaitu:

1. Mendukung Pemilu 2004 dan bertekad mengamankannya

Sikap ini dimotori oleh BEM UI, BEM UNJ, BEM UNSYIAH NAD, serta lembaga intra kampus lain, terutama yang tergabung dalam BEM Se-Jakarta Raya. Mereka percaya pemilu 2004 menjanjikan harapan dan peluang perubahan di masa depan sehingga harus diselamatkan. Bahkan, mereka berencana terlibat

dalam sistem dengan menjadi pengawas pemilu yang diakui KPU.

## 2. Menolak Pemilu 2004

Sikap ini dimotori oleh BEM UNPAD, BEM ITB, BEM UPI dan lembaga intra kampus lain, terutama yang beraliansi dengan BEM Se-Bandung Raya. Kelompok ini menyatakan bahwa menolak pemilu 2004 bukan berarti menolak pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi karena pemilu merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi aspirasi rakyat yang diakui semua pihak. Namun, penolakan ini khusus pemilu 2004 yang lebih disebabkan karena teramat banyak kejanggalan dan ketidakberesan dalam berbagai aspeknya. Pemilu 2004 disinyalir sebagai *pseudodemocraton* dan itu hanya merupakan permainan kekuatan-kekuatan anti reformasi untuk mempertahankan status quo. Karena itu, penolakan pemilu ini pun tidak mesti identik dengan golput ataupun boikot pemilu, meskipun hal tersebut sangat mungkin menjadi alternatif bentuk penolakan. Berkaitan dengan wacana menjadi pengawas pemilu, walaupun membentuk lembaga pengawas pemilu, kelompok ini cenderung di luar sistem.

### 3. Netral

Sikap ini dimotori oleh KM UGM dan beberapa lembaga kemahasiswaan intra kampus di Yogyakarta. Kelompok ini tidak menolak dan tidak juga mendukung, namun terus mengikuti perkembangan isu ini secara kritis. Kalaupun membentuk lembaga pengawas pemilu, kelompok ini cenderung di luar sistem.

Meskipun terdapat perbedaan sikap dasar berbagai elemen gerakan mahasiswa intra kampus yang direpresentasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa tiap kampus, berbagai diskusi dan kajian di antara mereka mulai menemukan titik temu berkaitan dengan masalah *voter education*, pengawasan pemilu, *black list* partai dan calon-calon anggota dewan yang tidak memiliki kredibilitas serta kapabilitas yang layak dikarenakan anti reformasi, KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), cacat moral dan sebagainya.

Perbedaan sikap diatas sangat mungkin terjadi perubahan tergantung perkembangan dan dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia maupun dinamika lembaga kemahasiswaan di masing-masing kampus. Namun, kesamaan isu-isu yang mulai terjadi sepertinya akan

semakin menguat dan semakin masif seiring dengan komunikasi yang hari-hari ini terus dijalin secara intensif oleh para aktifis gerakan mahasiswa berbagai kampus.

Semakin banyak titik temu antar berbagai elemen gerakan mahasiswa dalam menyikapi pemilu dan agenda gerakan mahasiswa lainnya, maka kekuatan reformasi akan semakin menguat. Manuver-manuver berani yang akan dilakukan dalam pemilu 2004 seperti *voter education*, pengawasan pemilu, *black list* partai serta calon anggota dewan yang tidak layak, tentunya akan membuat kekuatan anti reformasi kebakaran jenggot. Artinya pemilu 2004 akan menjadi pertarungan dahsyat antara mahasiswa sebagai pengawal reformasi dengan kekuatan-kekuatan anti reformasi.

Inilah pertarungan antara reformasi vs status quo, pembaharuan vs konservatif, demokrasi sejati vs otoriterianisme kekuasaan, kekuatan rakyat vs dominasi elit.

Dan pertarungan itu semakin dekat.....

Jatinangor, Januari 2004

# KONTRAK POLITIK DAN 100 HARI PEMERINTAHAN SBY<sup>11</sup>

Oleh : Indra Kusumah

*Pemilihan Umum telah memanggil kita  
Semua rakyat dipaksa gembira  
Dibawah undang-Undang Rekayasa  
Kita menuju ke Penipuan Umum*

Lagu plesetan di atas tiba-tiba menjadi populer di kalangan sebagian aktifis pergerakan mahasiswa dalam aksi-aksi sebelum dan pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum 2004. Lagu itu merupakan symbol kekhawatiran kecurangan dan kejahatan politik dalam pelaksanaan pemilu menyeruak di kalangan masyarakat. Bahkan, sebagian aktifis pergerakan mahasiswa menolak pelaksanaan Pemilu karena merasa pesimis terjadinya perubahan signifikan mengingat peraturan tampak dibuat untuk mempertahankan status quo.

---

<sup>11</sup> Tulisan ini dimuat di Koran Kampus Interval 21 Universitas Padjadjaran edisi 3/Tahun II/November 2004

Pesimisme para aktifis pergerakan mahasiswa tersebut ternyata telah menjadi stimulan munculnya kekritisian dan keberanian masyarakat. Pesimisme itu seolah menggedor struktur kesadaran masyarakat yang memiliki harapan perubahan sangat besar terhadap pemilu. Masyarakat mulai menyadari harapan mereka akan sia-sia jika kecurangan, teror dan kejahatan politik benar-benar terjadi.

Pesimisme aktifis dan harapan masyarakat itu bertemu menjadi sikap proaktif dan antisipatif. Tiba-tiba, mereka berkolaborasi membangun gerakan penyelamatan dengan mengangkat wacana penolakan terhadap politisi dan partai busuk, serta penolakan terhadap kejahatan politik dalam pemilu (seperti money politic, teror politik dsb). Lebih dari itu, masyarakat semakin berani menuntut haknya dengan meminta para kandidat anggota legislative dan calon presiden untuk melakukan kontrak politik sebagai bentuk komitmen tertulis para kandidat.

Fenomena tersebut menunjukkan meningkatnya kekritisian dan keberanian masyarakat dalam mengantisipasi pengkhianatan para kandidat terhadap janjinya selama kampanye. Masyarakat tidak percaya

begitu saja dengan janji selama kampanye, mereka tidak mau lagi memberi cek kosong terhadap wakil rakyat. Mereka pun kemudian meminta “garansi” dengan mengajukan kontrak social politik kepada para kandidat.

Para aktifis pergerakan dari kalangan mahasiswa, LSM, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan lain-lain ternyata mampu menangkap fenomena seperti ini, maka mereka tampil menjadi juru bicara nurani masyarakat dengan mengajukan kontrak politik secara kelembagaan sebagai perpanjangan tangan masyarakat.

Sayangnya, isu kontrak politik ini disambut dingin para politisi dan partai politiknya. Sebagian besar merasa ketakutan. Calon anggota legislative dan partai politik yang berani melakukan kontrak politik bisa dihitng dengan jari. Bahkan, untuk calon presiden hanya satu orang yang berani melakukan dialog dengan mahasiswa sekaligus menekan kontrak politik yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.

Ketakutan para politisi terbukti pula ketika KM ITB mengundang partai-partai politik untuk mengadakan kontrak politik sebelum pelaksanaan pemilu. Partai politik

yang hadir sangat minim, mahasiswa pun terpaksa gigit jari menyaksikan kelemahan “political will” dari partai politik.

Gerakan mahasiswa tidak berputus asa. Mereka terus mengejar para politisi untuk melakukan kontrak politik, bahkan setelah mereka terpilih. Tiada jalan lain kecuali aksi. Media massa dan media elektronik pun memberitakan aksi-aksi pergerakan mahasiswa bersama elemen masyarakat lain dalam setiap pelantikan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di seluruh Indonesia. Mereka kembali menuntut kontrak politik, dan kembali pula harus merasakan kekecewaan terhadap sikap para politisi.

Khusus calon presiden, para aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa mengajukan dialog kontrak politik yang berbunyi:

#### KONTRAK POLITIK CAPRES RI 2004-2009

Sebagai seorang calon pemimpin bangsa ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI periode 2004-2009 akan menjalankan dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab tujuh tuntutan rakyat dan mahasiswa".

Tujuh tuntutan itu adalah:

1. mengadili Soeharto

2. menegakkan supremasi hukum
3. menolak militerisme
4. menghapuskan budaya KKN
5. pendidikan murah dan berkualitas
6. menurunkan harga sembako/BBM/listrik dan meningkatkan kesejahteraan buruh/tani/nelayan/guru
7. kemandirian bangsa dan tegaknya budaya demokrasi yang egaliter

Tuntutan di atas sebenarnya memiliki ruh yang sama dengan 6 Visi Reformasi yang telah dicanangkan mahasiswa pasca runtuhnya tirani orde baru tahun 1998 dan sebagiannya telah diundangkan oleh DPR-MPR. Namun kembali masyarakat dikecewakan dengan penolakan para capres untuk menandatangani kontrak politik tersebut. Hanya satu orang yang berani, itu pun kalah di putaran pertama.

Pasca pemilihan Presiden putaran kedua yang menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama pilihan rakyat secara langsung, para aktifis pergerakan mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan konsolidasi di Bandung. Dalam

acara Seminar Nasional Indonesia Baru yang digagas BEM KEMA UNPAD tersebut, para aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berdiskusi merumuskan strategi perjuangan ke depan.

Diskusi para aktifis ini juga menghasilkan rumusan kontrak politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono untuk 100 hari pemerintahannya. Namun sayang, sampai sekarang kontrak politik tersebut belum jelas tindak lanjut dari para perumusny. Padahal, di tengah pesimisme publik terhadap susunan kabinet SBY, hari-hari ini masyarakat sedang menyaksikan usaha SBY dan kabinetnya untuk melakukan gebrakan dalam 100 hari pemerintahannya.

### **Kontrak Politik dan 100 Hari Pemerintahan SBY**

Konsep kekuasaan dalam praktiknya sangatlah sentral pada pemegangnya. Untuk itu masyarakat perlu memiliki bargaining position yang equal, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan wakil mereka. Dalam konteks kehidupan social, masyarakat berhak mengajukan kontrak politik dengan calon anggota legislative dan calon presiden. Hal ini dalam rangka menjaga posisi seimbang antara penguasa dengan rakyat.

Kontrak politik yang berisi kesepakatan kandidat dengan konstituen sepertinya merupakan wacana baru dalam perpolitikan di Indonesia. Meskipun demikian, ia bisa dijadikan indikator positif meningkatnya demokratisasi di Indonesia karena ia merupakan wujud ketergugahan moral dan politik masyarakat Indonesia. Sayangnya, sistem hukum di Indonesia belum mengenal perikatan berbentuk kontrak politik seperti ini, sehingga sampai saat ini belum memiliki konsekuensi yuridis.

Alih-alih memiliki konsekuensi yuridis, kontrak politik seperti ini berpotensi hanya sekedar menjadi macan kertas. Kalaupun ada konsekuensi hanya sekedar konsekuensi moral, karena tak sedikit point-point yang diajukan dalam kontrak politik berbentuk normative sehingga tidak bisa diukur.

Gerakan Kontrak Politik tampaknya telah menjadi gerakan nasional, namun pengaruhnya belum signifikan. Memang ia merupakan wacana baru, namun ketika para pengusungnya memiliki konsistensi, persistensi dan resistensi dalam memperjuangkannya, maka di masa yang akan datang Saya yakin isu seperti ini akan memiliki efek signifikan.

Gagasan kontrak politik ternyata masih memiliki permasalahan serius. Masalah tersebut sepertinya bisa terwakili dalam tataran nasional, ketika sampai saat ini presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mayoritas anggota DPR tidak berani menandatangani kontrak politik yang diajukan mahasiswa dan rakyat Indonesia. Bahkan, dalam aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia pada saat pelantikan anggota DPR, hanya sekitar 4 (empat) orang yang berani menandatangani kontrak politik, itupun didominasi salah satu partai politik.

Menyaksikan realitas seperti itu sebenarnya cukup ironis. Namun, para aktifis pergerakan ekstra parlementer tidak boleh menyerah hanya karena mereka tidak mau menandatangani kontrak politik sehingga merasa tidak memiliki bukti otentik tertulis dari janji para kandidat yang suatu saat bisa ditagih. Isu kontrak politik tidak akan basi karena tahun-tahun ke depan bangsa ini akan merasakan pemilihan kepala daerah (Bupati dan gubernur) secara langsung sehingga melalui isu kontrak politik bisa dibangun eskalasi gerakan yang semakin massif. Gerakan yang dibangun untuk memastikan setiap kandidat kepala daerah melakukan kontrak politik jelas dan bermaterai dengan

rakyat, serta meningkatkan kekuatan yuridis kontrak politik dengan memasukkannya ke dalam peraturan dan undang-undang sebagai syarat kepala daerah.

Adapun untuk SBY dan para anggota DPR serta DPD sekarang, masih ada bukti-bukti dari janji mereka yang bisa ditagih oleh masyarakat. Hanya saja para aktifis pergerakan harus memiliki data base lengkap meliputi kliping poster, rekaman pidato, kutipan media, rekaman wawancara televisi dan lain sebagainya yang memberitakan janji-janji para kandidat yang sekarang terpilih.

Berdasarkan data dan fakta itulah masyarakat disadarkan untuk tetap melakukan kontrol terhadap penguasa supaya para penguasa melaksanakan janji-janjinya. Di sini, para aktifis pergerakan mahasiswa dan masyarakat pun dituntut untuk merumuskan mekanisme penagihan janji yang mampu memberikan effective pressure terhadap penguasa.

Proses pengontrolan tersebut harus dilaksanakan sejak sekarang, terutama dalam waktu 100 hari pemerintahan SBY. Mengapa seratus hari? Bukannya presiden memerintah selama 5 (lima) tahun? Memang tidak

ada alasan rasional munculnya angka seratus, yang pasti berdasarkan konvensi ia merupakan masa awal yang cukup singkat dan dianggap layak oleh masyarakat untuk menjadi gambaran miniatur perubahan yang akan terjadi selama pemerintahan SBY. Selain itu, bangsa Indonesia sering mengalami amnesia politik terhadap janji-janji para penguasa, sehingga janji tersebut harus segera dilaksanakan sebelum masyarakat lupa dan kembali dibohongi.

Tentu saja masa 100 hari tersebut bukan hanya sekedar menonton SBY dan kabinetnya bekerja tanpa dukungan dan partisipasi konstruktif seluruh elemen masyarakat. Pembangunan negeri ini merupakan tanggung jawab semuanya termasuk mahasiswa. Hanya saja pergerakan mahasiswa memiliki posisi dan peran tersendiri dalam bentuk partisipasinya. Ia memiliki fungsi sebagai social control sekaligus sebagai social pressure yang efektif ketika penguasa menyimpang.

Tantangannya adalah bagaimana pergerakan mahasiswa sebagai *Agent of Change* memainkan posisi, fungsi dan perannya secara dewasa, elegan, konstruktif dan solutif. *That's difficult but possible!*

Yakinlah, kita bisa melakukannya! *You can if you think you can!*

Jatinangor, Nopember 2004

# **SURAT TERBUKA UNTUK PAK PRESIDEN<sup>12</sup>**

Bandung, 12 Juli 2005

Kepada Yth

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Republik Indonesia

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh  
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik  
dan hidayahnya kepada kita dan bangsa yang kita cintai  
ini.....

Pak Presiden.....

Surat ini adalah suara hati mahasiswa yang lahir dari  
tragedi kebangsaan paling memilukan dan memalukan  
dalam sejarah bangsa ini. Ini adalah teriakan jiwa

---

<sup>12</sup> Surat Terbuka ini diserahkan oleh para aktifis BEM Se Bandung Raya ketika berhasil mencegat Presiden SBY di Gasibu Bandung dalam peringatan Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2006. Surat Terbuka ini dibuat oleh Saya, Indra Kusumah, berdasarkan hasil keputusan Rapat BEM Se Bandung Raya.

menyaksikan bangsa yang besar ini sedang berada dalam titik nadzir kekelaman sejarahnya.

Reformasi mati suri! Teramat banyak fakta yang menunjukkan hal ini. Padahal reformasi bergulir dengan perjuangan keringat, air mata, darah bahkan nyawa mahasiswa untuk menjatuhkan rezim diktator. Kini, hampir sewindu reformasi ternyata reformasi yang diharapkan telah mati.

### **Korupsi dan Supremasi Hukum**

Korupsi hari ini semakin menjadi-jadi. Megakorupsi terjadi di berbagai instansi dan tingkatannya. Memang hari ini beberapa kasus korupsi besar terkuak, namun terkesan formalitas dan ternyata tak sedikit yang koruptor yang justru dibebaskan seperti kasus Nurdin Halid. Realitas ini pun menunjukkan supremasi hukum di Indonesia masih utopis.

Korupsi berdampak terhadap berbagai hal, Contoh kasus kelangkaan BBM hari ini. Selain menunjukkan sistem birokrasi yang kacau dalam tubuh PT Pertamina, kelangkaan BBM juga menunjukkan indikasi korupsi sistemik dan akut di PT Pertamina.

## **Pendidikan**

Dunia pendidikan hari ini menangis! Sebuah fakta memalukan sekaligus memilukan terbentang: Hasil riset dua lembaga internasional, Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPABE) dan Global Campaign for Education (GCE) menunjukkan Pendidikan Indonesia mendapat nilai E jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang mendapat nilai A. Bahkan dalam indikator pendidikan bermutu dan gratis, Indonesia mendapat nilai F (Republika, 30 Juni 2005).

RUU BHP yang diajukan pemerintah syarat bernuansa komersialisasi pendidikan dan kapitalisasi pendidikan. Pemerintah terkesan berlepas tanggung jawab masalah pendidikan. Sampai saat ini, alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan masih belum terbukti.

Potret buram pendidikan Indonesia tidak hanya itu, siswa sekolah melakukan bunuh diri karena tidak mampu bayar biaya sekolah. Sekitar delapan ratus ribu siswa tidak lulus UAN dan lain sebagainya yang menunjukkan keajaiban ironis dalam dunia pendidikan Indonesia.

## **Penyakit Masyarakat**

Penyakit masyarakat seperti Perjudian, Pelacuran, Pornografi dan Narkoba semakin meraja lela. Kami mengapresiasi dan mendukung gerakan pemberantasan narkoba yang digulirkan oleh Presiden SBY. Namun, jangan dilupakan penyakit masyarakat lain yang memiliki dampak dahsyat bagi bangsa ini.

BEM Se Bandung Raya bersama elemen masyarakat telah mengadakan deklarasi “Jawa Barat Bebas Judi 2005”. Deklarasi ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Anehnya, Kapolda Jawa Barat sampai saat ini tidak bersedia menandatangani deklarasi “Jawa Barat Bebas Judi 2005”, padahal itu merupakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang.

Hari ini rakyat Indonesia ingin melihat konsistensi Kapolri baru yang telah menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menutup perjudian dalam waktu satu minggu, terhitung mulai tanggal 11 Juli 2005 (Tempo Interaktif, 11 Juli 2005).

## **Busung Lapar**

Fenomena busung lapar merupakan realitas tak terbantahkan. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam masalah gizi dan kesehatan. Jika tidak segera diatasi, maka masa depan generasi muda Indonesia tidak lebih baik dari hari ini.

## **GERAKAN REVOLUSIONER!**

Pak Presiden.....

Fakta di atas bukan kenyataan sekedar sebuah tontonan, tapi sebuah realitas yang harus diubah. Oleh karena itu Badan Eksekutif Mahasiswa Se Bandung Raya dengan ini menuntut Presiden Republik Indonesia untuk:

1. **Revolusi Pemberantasan Korupsi:** Tegakkan supremasi hukum! Usut tuntas semua kasus korupsi! Lakukan Asas pembuktian terbalik untuk mengungkap korupsi! Hukum mati para koruptor!
2. **Revolusi Pendidikan Indonesia:** Relisasikan Alokasi 20% APBN untuk pendidikan! Tolak komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan!
3. **Selesaikan Masalah Busung Lapar Secepatnya!**

#### 4. **Berantas Penyakit Masyarakat:** Wujudkan Gerakan Indonesia Bebas Judi!

Hari ini rakyat merindukan pemimpin seperti Umar bin Khatab yang sederhana dan siap terjun langsung ke masyarakat dan berbaur dengan mereka. Pemimpin yang tegas dalam kebenaran dan sangat takut berkhianat terhadap amanah yang diembannya. Pemimpin yang seringkali sulit tidur karena memikirkan permasalahan rakyatnya.

Atau seperti Umar bin Abdul Aziz yang sukses dalam melakukan revolusi pemberantasan korupsi. Para pejabat diaudit publik dengan asas pembuktian terbalik, jika ada harta yang tidak jelas langsung dimasukkan ke kas negara untuk rakyat. Dalam waktu singkat dia berhasil mengubah negara yang mulanya dalam kondisi krisis menjadi negara makmur, sampai-sampai sulit untuk menemukan orang miskin.

Kompleksitas permasalahan yang luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa. Oleh karena itu harus dilakukan langkah-langkah dan gerakan revolusioner untuk melakukan perubahan. Di tengah krisis keberanian

dan keteladanan, bangsa Indonesia berharap banyak terhadap Presiden sekarang.

Jika harapan masyarakat ini disia-siakan dan dikhianati, maka bersiaplah Anda untuk dihancurkan oleh doa-doa orang yang terdzalimi. Ingatlah! Amanah sebagai Presiden harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga kepada lebih dari dua ratus juta rakyat Indonesia!

*“Betapa inginnya kami agar umat ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang telah mengharu biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik*

*umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada  
kehinaan dan pasrah oleh keputusan”  
(Hasan Al Banna)*

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

**BEM SE BANDUNG RAYA  
BEM UNPAD – KM ITB – BEM UPI – BEM STT TEKSTIL  
– BEM STT TELKOM – BEM POLTEKES BANDUNG –  
BEM POLBAN**

# **RUU BHP: TSUNAMI PENDIDIKAN INDONESIA<sup>13</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

Dunia pendidikan Indonesia hari ini sedang harap-harap cemas. RUU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang akan mengubah wajah Pendidikan Nasional Indonesia telah diajukan oleh Pemerintah kepada DPR melalui komisi X DPR. Pengajuan RUU BHP ini merupakan amanat dari UU No. 20 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 53 yang menyebutkan Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. UU Sisdiknas mengamanatkan ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

RUU BHP ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan karena ia akan dijadikan payung hukum

---

<sup>13</sup> Tulisan ini dibuat pasca lokakarya Nasional di UI. RUU BHP yang dimaksud di sini adalah yang dikeluarkan per Desember 2004. Dalam RUU BHP per 31 Maret 2005, masukan dan kritik dari mahasiswa sebagian besar diakomodir dalam RUU BHP tersebut, meskipun masih ada yang harus dikritisi

beberapa PP (Peraturan Pemerintah) yang telah dikeluarkan sebelumnya tentang Pem-BHMN-an enam kampus negeri yang sebenarnya PP tersebut cacat hukum karena tidak ada payung Undang-Undang.

Selain itu, RUU BHP ini berkaitan erat dengan 14 PP (Peraturan Pemerintah) yang harus dibuat pemerintah sebagai konsekuensi UU No. 20 tentang Sisidiknas. Dari 14 PP yang harus dibuat, 5 buah RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sekarang sedang dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan Komisi X DPR, yaitu RPP Wajib Belajar, RPP pendidikan Sekolah Usia Dini, RPP Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah), RPP Dikti (Pendidikan Tinggi) dan RPP Standar Nasional Pendidikan.

Sekarang RUU BHP sedang memasuki masa uji publik. Kemungkinan pengesahannya sekitar bulan Juni, namun pro kontra mulai bermunculan dari berbagai pihak seperti Asosiasi BP BTSI (Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), para pemerhati pendidikan, para aktifis pergerakan mahasiswa dan sebagainya.

Kajian Kritis terhadap RUU BHP mengindikasikan akan terjadinya Tsunami Pendidikan di Indonesia jika

sampai RUU tersebut ditetapkan seperti ajuan pemerintah. Teramat banyak kerancuan di dalam RUU BHP tersebut yang dampaknya sangat fatal untuk keberlangsungan dunia pendidikan Indonesia, diantaranya:

1. RUU BHP memuat nuansa kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan yang sangat kental sehingga memperkecil kemungkinan orang miskin ikut sekolah. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan Pendidikan merupakan hak asasi yang harus dirasakan semua warga negara tanpa diskriminasi
2. Pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab masalah pendanaan pendidikan, kecuali dalam bentuk hibah dan sumbangan. Hal ini jelas melanggar UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang menegaskan Pemerintah harus mengalokasikan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan di luar biaya Sekolah Kedinasan dan diluar gaji pendidik. Bahkan pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2 UU No. 20 tentang Sisdiknas). Sampai hari ini APBN Indonesia baru mengalokasikan

sekitar 4-9% APBN, padahal Malaysia menganggarkan 26% APBN, Singapura 26% APBN dan Jerman 40% APBN untuk pendidikan

3. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat yang berarti dari, oleh dan untuk masyarakat bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan Indonesia menganut “Negara Kesejahteraan Sosial” yang berarti pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah seperti di Jerman, Skandinavia, Perancis, Saudi Arabia dan lain-lain. Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan sistem yang dianut Amerika, Inggris dll yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar.
4. RUU BHP menganut sistem pendidikan secara korporasi yang bersifat nirlaba. Di satu sisi positif dari aspek profesionalitas, namun membuka peluang besar terjadinya komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan.
5. Kerancuan secara hukum, apakah boleh satu Subjek hukum dalam bentuk badan hukum dikuasai oleh badan hukum yang lain? Selain itu penggunaan kata-kata dalam RUU tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundangan, terutama

dalam penggunaan terminologi, seperti penggunaan kata bangkrut yang tidak dikenal dalam istilah hukum, seharusnya menggunakan kata Pailit

6. Pelaksanaan Pilot Project PT BHMN terhadap enam PTN (ITB, UPI, UI, IPB, UGM dan USU) terbukti gagal dengan terjadinya komersialisasi pendidikan dan bukan profesionalisasi seperti yang diharapkan, tapi pemerintah malah ngotot untuk memberlakukan hal tersebut kepada semua PTN dan PTS bahkan sampai tingkat SD!
7. Jika sampai RUU BHP diberlakukan seperti ajuan pemerintah sekarang, maka kemungkinan lebih dari 60% sekolah akan tutup karena tidak mampu memenuhi persyaratan. Hal ini termasuk yang dikhawatirkan Ketua Komisi X DPR RI, Bapak Heri Akhmadi. Hal ini bisa jadi bencana sedahsyat Tsunami bagi bangsa Indonesia
8. Walau bagaimanapun, RUU BHP tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi, sosial dan politik yang berkembang. RUU BHP yang hakikatnya pencabutan subsidi pendidikan memiliki pola yang sama dengan pencabutan subsidi BBM dan privatisasi BUMN. RUU

BHP merupakan implementasi tekanan dari IMF dan lembaga kreditur (bukan lembaga donor) lainnya

### **Sikap Pergerakan Mahasiswa**

Para aktifis pergerakan mahasiswa memandang RUU BHP merupakan masalah krusial yang akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari para aktifis melakukan kajian dan analisis terhadap RUU BHP yang diajukan Pemerintah kepada komisi X DPR. Kemungkinan RUU BHP ini akan menjadi agenda gerakan mahasiswa di tahun 2005.

Seminar, lokakarya dan berbagai kajian telah dilakukan oleh mahasiswa di berbagai Universitas. Terakhir, MPM Universitas Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Pendidikan Nasional di kampus UI Depok pertengahan Februari 2005 yang hasilnya langsung disampaikan ke Komisi X DPR. Lokakarya tersebut diselenggarakan sebagai studi kritis atas RUU BHP dari berbagai aspek secara komprehensif, baik tinjauan paradigmatis maupun tinjauan pasal perpasal. Selain itu juga dilakukan analisis melalui tiga aspek hukum yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Langkah-langkah strategis dan taktis terus dirancang oleh para aktifis untuk menyikapi masalah pendidikan nasional. Isu ini diharapkan akan kembali menjadi common issue semua elemen pergerakan mahasiswa yang hari ini terpolarisasi. Masalah pendidikan nasional merupakan tantangan besar bangsa Indonesia untuk segera keluar dari transisi demokrasi yang hari ini terkatung-katung.

Pendidikan nasional seharusnya menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah sebagai prasyarat pertama dan utama keluar dari krisis multidimensi. Namun, hal itu bisa jadi hanya sekedar mimpi tak berwujud manakala kita semua tidak memperhatikan secara seksama kondisi pendidikan nasional yang semakin hari semakin terpuruk.

Kinilah saatnya semua anak bangsa bersatu padu membangun sistem pendidikan nasional yang profesional, adil, merata dan tidak ada diskriminasi. Masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan sistem pendidikan yang akan diberlakukan di Indonesia.

Masih ada waktu untuk mengkritisi secara konstruktif terhadap RUU BHP. Publik harus mengetahui dan terlibat

secara aktif dalam keseluruhan proses dan tahapan menjadi produk Undang-Undang.

Kapan lagi kalau bukan sekarang?

Jatinangor, Februari 2005

# UMI-KU SAYANG UMI-KU MALANG

Oleh : Indra Kusumah

*“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”*

*(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 5)*

## **Makasar, 24 April 1996**

Demonstrasi itu telah berjalan tiga hari. Isunya tetap sama: menolak SK Walikota tentang “penyesuaian” tarif angkutan yang besarnya melanggar ketentuan Menteri Perhubungan. Hari itu demonstrasi melibatkan berbagai kampus di Makasar dan setiap hari mahasiswa yang ikut berdemonstrasi semakin masif.

Namun, sore hari itu menjadi saksi tragedi April dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia. Demonstrasi ribuan mahasiswa yang telah berlangsung sejak pagi-pagi tiba-tiba berubah menjadi kerusuhan yang berbuntut ‘pembantaian’ mahasiswa. Pasukan Armed dan Yon Kavaleri tiba-tiba bergerak memburu mahasiswa

sampai ke kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia), IKIP Ujung Pandang dan Universitas '45.

Tentara bergaya bak pemburu tikus dengan senjata di tangan. Tikus itu bernama mahasiswa. Darah berceceran di kampus, 6 buah mobil rusak, 245 motor mahasiswa hancur, ruang-ruang kuliah berantakan, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit, beberapa masuk ICU, bahkan 3 orang mahasiswa UMI (Universitas Muslim Indonesia) meninggal dunia.

UMI-pun berduka.....

UMI-ku sayang, UMI-ku malang.....

### **Makasar, 1 Mei 2004**

Saya hampir tak berkedip menyaksikan berita televisi itu:

Universitas Muslim Indonesia kembali bergolak. Mahasiswa 'menyandera' seorang polisi perintis bernama Briptu Sudirman. 'Penyanderaan' ini dilakukan mahasiswa untuk membebaskan 26 rekan mereka yang ditahan polisi pada saat aksi solidaritas untuk Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.

Polisi pun berusaha membebaskan Briptu Sudirman. Aparat mendesak dan merangsek mahasiswa sampai ke

dalam kampus. Suara tembakan menggelegar, mahasiswa pun berlarian ke dalam kampus. Namun, polisi malah memburu mahasiswa sampai ke ruang-ruang kuliah. Mahasiswa yang tak berdaya dipukuli, ditendang dan disiksa hingga berdarah-darah.

Darah berceceran di lantai kampus UMI Makasar, tembok dan pohon mengabadikan bekas-bekas peluru tajam polisi. Dua dosen dan puluhan mahasiswa dibawa ke kantor polisi, puluhan mahasiswa lainnya masuk rumah sakit dengan tiga di antaranya luka tembakan peluru tajam di kepala dan kaki.

Penyiksaan terhadap mahasiswa itu ditayangkan dengan begitu jelas di beberapa stasiun polisi. Masyarakat terhenyak menyaksikan keganasan tersebut. Tiba-tiba semua orang berteriak mengutuk: mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi solidaritas, para politisi mengecam, masyarakat marah, bahkan mereka menuntut Kapolri jenderal Da'i Bachtiar untuk mundur.

Sementara itu, lantai-lantai kampus Universitas Muslim Makasar masih membisu menyaksikan darah-darah para mahasiswa membasahi dirinya sebagaimana tahun 1996 lantai itu digenangi darah mahasiswa. Seolah mereka

bertanya keheranan, “Mengapa manusia mau mengulang sejarah kebodohan?”

## **Mahasiswa vs Polisi**

Sejarah negeri ini seolah belum menemukan catatan hubungan harmonis antara polisi dengan mahasiswa. Hubungan di antara kedua elemen ini seperti Tom and Jerry dalam siaran televisi. Di jalanan, mereka tak pernah akur, saling mencurigai dan saling bermusuhan. Tak sedikit berita demonstrasi mahasiswa berakhir dengan pentungan dan peluru aparat.

Memang dalam masalah ini perlu evaluasi total dari kedua belah pihak, baik dari aparat maupun dari mahasiswa. Masing-masing punya kontribusi dalam terjadinya tragedi demi tragedi kemanusiaan yang memilukan dan memalukan antara mahasiswa dengan aparat keamanan dalam bentuk bentrokan di antara keduanya.

Dari sisi aparat, jelas kepolisian harus bertanggung jawab, terutama Kapolri Jendral Da’I Bachtiar karena dalam masa kepemimpinannya penanganan represif terhadap demonstran mahasiswa maupun rakyat biasa masih kerap

terjadi di berbagai tempat di Indonesia, seperti insiden berdarah 21 Juli di Bulukumba, Penangkapan dan penganiayaan sewenang-wenang mahasiswa dan rakyat sipil pada tanggal 3 oktober 2003, Kekerasan aparat terhadap demonstran BEM Bandung Raya dalam peristiwa Februari 2003 Kelabu, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Para pelaku penganiayaan di Universitas Muslim Indonesia harus mendapatkan hukuman berat karena jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM terhadap mahasiswa, bahkan dosen yang tidak terlibat dalam aksi mahasiswa. Hukuman berat itu juga dimaksudkan sebagai shock therapy bagi polisi yang lain sehingga mereka lebih menggunakan pendekatan persuasive daripada pendekatan represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa dan rakyat Indonesia.

Kepolisian juga harus melakukan reformasi menyeluruh (imparsial) atas mekanisme kerja dan profesionalisme di tubuh POLRI. Reformasi POLRI ini tidak hanya dalam tataran konsep, tapi yang lebih penting adalah realitas di lapangan.

Fakta kinerja POLRI yang menyedihkan ini merupakan bukti nyata kegagalan sistem pendidikan di

kepolisian. Oleh karena itu, hal yang tak kalah penting adalah melakukan penataan ulang (rekonstruksi) kurikulum pendidikan kepolisian. Kurikulum sekarang disinyalir lebih memprioritaskan penguasaan senjata dan penanganan fisik dalam pengamanan dibandingkan dengan kesadaran tentang Hak Asasi Manusia. Pelajaran HAM disampaikan diakhir setelah calon polisi terbiasa dan terlatih dengan penanganan represif terlebih dahulu.

Dari sisi mahasiswa juga perlu melakukan evaluasi atas pergerakan yang dilakukan selama ini. Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral intelektual yang didasari nilai-nilai universal. Gerakan mahasiswa sejati juga merupakan gerakan nirkekerasan (tanpa kekerasan). Oleh karena itu, dalam demonstrasinya mahasiswa dituntut untuk menunjukkan kadar intelektualnya dan kualitas moral yang mumpuni, serta tanpa kekerasan sehingga gerakan yang dibangun mampu menyedot simpati publik. Saya yakin, mahasiswa mampu menampilkan etika demonstrasi sebagai ekspresi demokrasi secara elegan.

Merupakan pemahaman yang perlu direvisi ketika menyangka bahwa kekerasan dan anarkisme pergerakan mahasiswa bisa menyelesaikan permasalahan dan mampu

menarik simpati masyarakat sebagai basis perjuangan mahasiswa. Pemahaman seperti itu menjadikan sebagian elemen mahasiswa menganggap bentrokan dengan aparat sebagai sebuah “kewajiban”. Rasanya tampak gagah kalau berhasil bentrok dengan aparat, bahkan dalam paradigma aksi yang terbangun, rasanya bukan aksi jika tidak terjadi bentrokan dengan aparat.

Kekerasan yang terjadi memang sering diprovokasi dan dilakukan oleh aparat keamanan, tapi tak jarang provokasi muncul diinisiasi pihak mahasiswa dengan mengeluarkan kata-kata tak sopan atau menghina kepolisian di luar batas kewajaran. Padahal, polisi sendiri adalah kelompok yang dibela oleh mahasiswa karena ia juga bagian dari masyarakat Indonesia yang biasa juga disebut sebagai buruh yang dipersenjatai.

Kalau saja mahasiswa memandang kepolisian sebagai bagian dari rakyat yang dibela. Di sisi lain, seandainya polisi pun menganggap dirinya adalah aparat keamanan yang merupakan bagian integral dari rakyat dan bukan alat kekuasaan, polisi juga memiliki kesadaran HAM dan memperlakukan demonstran secara persuasive, maka saya yakin bentrokan di antara keduanya bisa diminimalisir.

Perubahan sudah tidak sabar menunggu waktu, tinggal kita semua yang memilih, apakah semua elemen (mahasiswa dan kepolisian) memiliki niat baik untuk berubah atau tidak? Apapun pilihan kita, jelas akan menentukan kualitas kedewasaan dan kematangan berdemokrasi di negeri bernama Indonesia.

Yang pasti, darah telah tertumpah dan nyawa telah melayang. Dengarlah suara lantai berdarah Universitas Muslim Indonesia, “Jangan jadikan semua sia-sia dengan mengulang sejarah kebodohan itu.....!”

UMI-ku Sayang....

UMI-ku malang...

Jatinangor, Mei 2004

# **TUTUP TPST BOJONG!**

Oleh : Indra Kusumah

Rencana uji coba TPST Bojong di Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, kembali menjadi wacana hangat di masyarakat. Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Bogor dan PT Wira Guna Sejahtera hendak menjadikan Desa Bojong sebagai "keranjang sampah" sekitar 6000 ton sampah per hari dari Jakarta. Setelah beberapa kali rencana uji coba dan gagal, Pemkab Bogor mengumumkan kembali rencana uji coba TPST Bojong antara tanggal 25-27 Juli 2005 dan TPST akan dioperasikan secara penuh pada awal Agustus.

Masyarakat bereaksi keras menentang rencana uji coba tersebut. Mereka mengadakan tabligh Akbar dan mimbar bebas pada tanggal 24 Juli 2005 yang dihadiri ribuan masyarakat anti TPST Bojong beserta tokoh masyarakat, LSM dan elemen mahasiswa. Tabligh akbar ini sebagai wujud penolakan uji coba TPST Bojong sekaligus jawaban atas statemen Pihak PT WGS yang menyatakan bahwa orang yang menolak TPST Bojong tinggal sekitar 120 orang.

Karena respon penolakan masyarakat tersebut, uji coba tidak jadi dilakukan di akhir Juli 2005. Namun, informasi terakhir uji coba akan dilaksanakan di awal Agustus 2005 dengan menghadirkan konsorsium ahli dari beberapa perguruan tinggi seperti UNPAD, ITB, UI dan IPB.

Mengapa terjadi penolakan yang sangat besar dari berbagai elemen terhadap pengoperasian TPST Bojong? Teramat banyak data dan fakta yang menunjukkan TPST Bojong memang tidak layak dioperasikan dan harus direlokasi ke tempat lain. Diantaranya:

1. Kebohongan Publik

*Kebohongan pertama*, Informasi yang diterima masyarakat pada mulanya adalah akan dibangun pabrik keramik di desa Bojong. Maka mereka pun menyetujui dan memberikan tanda tangan karena dijanjikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang memang banyak pengangguran. Masyarakat marah dan merasa dibohongi ketika ternyata justru di tempat tersebut dibangun untuk dijadikan Tempat Pengolahan Sampah.

*Kebohongan kedua*, Surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor atas pembangunan TPST Bojong disinyalir palsu karena beberapa anggota dewan

merasa tidak pernah ada pembahasan dalam sidang. Kasus pemalsuan tanda tangan anggota dewan ini dilaporkan ke polisi, namun tidak pernah ada tindak lanjut. Bahkan pimpinan DPRD yang diduga bertanggung jawab atas kasus ini bisa dengan tenang melenggang menjadi anggota DPR Pusat.

*Kebohongan ketiga*, Dalam surat perizinan pendirian TPST Bojong disebutkan luas wilayah adalah 20 hektar. Ketika TAWB (Tim Advokasi Warga Bojong) melakukan pengukuran, ternyata luas yang digunakan diperkirakan sekitar 30-35 hektar.

## 2. Pelanggaran Hukum

*Pelanggaran pertama*, SK Bupati No 591/31/Kpts/Huk/2001 Pemberian izin lokasi pembangunan TPST Bojong yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Bogor serta SK Pimpinan DPRD kabupaten Bogor No. 41 Tahun 2002 tentang persetujuan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT WGS, bertentangan dengan Perda No. 27 tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor yang menegaskan kawasan daerah tersebut sebagai kawasan pengembangan

permukiman, pengembangan pariwisata dan pertanian, dan bukan sebagai tempat pengolahan sampah

*Pelanggaran kedua*, SK Bupati No 591/31/Kpts/Huk/2001 dan SK Pimpinan DPRD kabupaten Bogor No. 41 Tahun 2002 di atas juga bertentangan dengan UU No. 42 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan: "Setiap orang berkewajiban menaati Tata Ruang yang telah ditetapkan."

### 3. Masalah AMDAL

*Masalah pertama*, Jika ditinjau dari aspek lingkungan hidup, maka lokasi TPST Bojong sangat tidak layak karena berdekatan dengan tempat pemukiman penduduk di sekeliling TPST. Bahkan ada rumah penduduk yang bagian belakangnya sangat berdekatan dengan benteng TPST (sekitar 5-10 meter), padahal dalam peraturan seharusnya jarak antara TPST dengan pemukiman minimal 300 meter

*Masalah kedua*, Jarak TPST dengan pemukiman penduduk yang sangat dekat memungkinkan bau sampah akan sangat mengganggu masyarakat. Sebagai contoh TPST Bantargebang baunya tercium

sampai 10 kilo meter. Padahal dalam radius tersebut, TPST Bojong dikelilingi oleh pemukiman, perumahan dan real estate yang tersebar di beberapa desa.

*Masalah ketiga*, Di belakang TPST Bojong ada sungai Cikarang yang menjadi sumber air bagi kebutuhan penduduk sekitar, terutama pada waktu musim kemarau sungai tersebut menjadi sumber utama air penduduk. Jika sungai tersebut sampai tercemar, maka akan merugikan masyarakat di beberapa kecamatan sekitar TPST Bojong.

*Masalah keempat*, Jalan yang akan dilalui truk-truk sampah kurang layak dilalui kendaraan-kendaraan besar apalagi jumlahnya mencapai ratusan truk sampah dalam sehari semalam. Selain itu, ratusan truk sampah yang akan melalui jalan tersebut biasanya menjatuhkan air sampah yang bau seperti pada waktu uji coba sebelumnya. Hal ini jelas mengganggu warga yang tinggal di sepanjang jalan tersebut.

*Masalah kelima*, Sampah yang menggunung bisa menyebabkan pencemaran air dan udara. Ini bisa menyebabkan penyakit TBC, Asma, penyakit kulit dan sebagainya

4. Masalah teknologi yang digunakan

*Masalah pertama*, Dalam tiga kali uji coba pertama, ternyata mesin yang digunakan gagal. Hal ini menunjukkan teknologi yang digunakan belum benar-benar teruji dan tidak bisa diandalkan.

*Masalah kedua*, Kapasitas mesin yang hanya mampu mengolah sampah sekitar 300 ton sampah setiap hari. Dengan jumlah mesin yang hanya tiga buah (informasi terakhir hanya satu yang berfungsi) berarti dalam satu hari hanya mampu mengolah sampah 900 ton sampah. Jika diasumsikan dari 6000 ton sampah ada sekitar 1500 ton sampah anorganik setiap hari, maka setiap hari terjadi penumpukan 600 ton sampah. Belum lagi jika terjadi listrik mati atau ada kerusakan pada mesinnya, maka penumpukan sampah bisa berkali lipat. Berdasarkan perhitungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), jika terjadi penumpukan sampah 600 ton dan luas TPST betul-betul 20 hektar, maka TPST hanya mampu digunakan maksimal selama 114 hari. Padahal, dalam izinnya selama lima tahun

5. Premanisme dan Kekerasan

Masyarakat yang menolak kehadiran TPST Bojong mendapatkan intimidasi dan teror. Rumah pimpinan FK MPL (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan) dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, ancaman bertebaran menakutkan warga sekitar TPST. Pihak kepolisian pun ternyata terlibat melakukan kekerasan terhadap warga yang dituduh merusak TPST pada tanggal 22 November 2005.

6. Penolakan berbagai elemen

Tidak hanya masyarakat sekitar yang menolak pengoperasian TPST Bojong, tapi juga LSM (WALHI, YLBHI, PBHI, KONTRAS dll), Organisasi Pergerakan Mahasiswa (BEM UNPAD, BEM IPB, KAMMI Bogor, FAM UI, LSADI dll), dan Organisasi Kemasyarakatan (KAHMI, Pemuda Muhammadiyah dsb). Bahkan DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Jawa Barat, DPR RI, Departemen Lingkungan Hidup, BPPT, Gubernur Jawa Barat dan lain-lain pun semuanya sepakat bahwasanya TPST Bojong harus ditutup.

Sebenarnya permasalahan ini sangatlah jelas dan terang, seterang mentari di siang hari. TPST Bojong sangat tidak layak untuk dioperasikan ditinjau dari berbagai aspeknya. Namun anehnya, Gubernur DKI, Bupati Kabupaten Bogor dan PT WGS masih bersikeras untuk melakukan uji coba dan mengoperasikan TPST Bojong.

Pemaksaan kehendak yang ditentang berbagai pihak ini bisa jadi menimbulkan konflik sosial yang besar dan akan merugikan semua pihak. Sebaiknya Gubernur DKI Jaya, Bupati Kabupaten Bogor dan PT WGS merelokasi TPST Bojong secepatnya ke tempat lain yang lebih tepat dan cocok.

Kasus ini juga merupakan tantangan bagi semua pihak untuk merumuskan konsep terpadu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan tidak menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.

Jatinangor, 1 Agustus 2005

# **TOLAK KENAIKAN HARGA BBM...!<sup>14</sup>**

Oleh : Indra Kusumah

Di tengah berbagai bencana yang menimpa masyarakat Indonesia: gempa, tsunami, kecelakaan, banjir, longsor dan sebagainya, sebuah ironi sejarah kebangsaan terjadi. Tanggal 1 Maret 2005 telah menjadi saksi lahirnya ketidakbijakan pemerintahan SBY-JK dengan tetap menaikkan harga Bahan Bakar Minyak meskipun tanpa persetujuan DPR.

Di tengah berbagai demonstrasi masyarakat menentang rencana kenaikan tersebut, SBY dengan tenang menyatakan, "I don't care with my popularity!". SBY lupa, ia menyamakan popularitas politisi seperti popularitas aktris. Padahal, popularitas politisi berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan ia terpilih karena popularitas. Jika SBY siap tidak populer, artinya siap untuk tidak dipercaya. Artinya pula, ia siap untuk dicabut mandatnya sebagai Presiden Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> Tulisan ini dibuat berkaitan dengan aksi demi aksi menolak kenaikan BBM tanggal 28 Februari 2005 yang dilakukan rezim SBY-JK. SBY tidak bersedia bertemu dengan mahasiswa dalam audiensi di Istana Negara, 19 April 2005, mahasiswa diterima oleh Andi Mallarangeng

Penolakan atas ketidakbijakan tersebut masih terus berlangsung dari berbagai elemen pergerakan mahasiswa, buruh, sopir angkot, dan elemen masyarakat lainnya. Berbagai bentuk aksi dilakukan, dari mogok makan, sabotase mobil tanki minyak, blokade SPBU, bakar ban, aksi jalan mundur sampai pawai rakyat menolak kenaikan BBM. Namun, SBY seolah masih berkata dengan tenang, “I don’t care....!”

Banyak yang bertanya tentang alasan aksi-aksi berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Tak sedikit masyarakat yang tertipu oleh iklan pemerintah yang dibintangi Bajuri tentang kenaikan harga BBM, ditambah pula dengan pernyataan Freedom Insitute yang seolah menjadi legitimasi ilmiah atas ketidakbijakan tersebut.

Banyak pengamat termasuk komisi VII DPR menganggap iklan Bajuri tentang kenaikan BBM tersebut menyesatkan. Dengan cerdiknya pemerintah menggunakan Bajuri sebagai maskot wong cilik, padahal wong cilik lah yang akan merasakan dampak kenaikan BBM. Hal ini disadari oleh istri Bajuri, “Oneng”, yang tidak mau menjadi bintang iklan tersebut karena “Oneng” dengan

kecerdasannya memang menolak kenaikan BBM. Hidup Oneng☺!!

Berkaitan dengan pernyataan Freedom Institute, sebagian akademisi menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah “pelacuran intelektual” untuk menjadi tukang stempel apa pun yang datang dari pemerintah. Kalaulah itu benar, maka ini merupakan tragedi keilmuan di sebuah negeri bernama Indonesia.

Lalu, apa alasan para aktifis pergerakan mahasiswa sehingga mereka turun aksi untuk menolak ketidakbijakan SBY-JK? Sebagiannya memiliki alasan ideologis sebagai perlawanan terhadap neoliberalisme di Indonesia, sebagiannya lagi alasan moral karena pembelaan nurani atas jeritan masyarakat yang sebelum kenaikan harga BBM juga sudah merasakan penderitaan berlipat-lipat.

Alasan-alasan berikut ini setidaknya mewakili apa yang ada di benak para demonstran penolak kenaikan harga BBM. Yakni:

1. Pencabutan subsidi BBM yang berkonsekuensi kenaikan harga BBM merupakan agenda IMF dan Washington untuk liberalisasi ekonomi Indonesia. Pencabutan subsidi BBM merupakan tekanan IMF

sebagai prakondisi masuknya perusahaan-perusahaan asing dalam perdagangan migas di Indonesia. Sedangkan liberalisasi ekonomi bertentangan dengan UUD 1945

2. Kenaikan harga BBM di internasional sebenarnya merupakan rezeki nomplok untuk Indonesia karena dengan itu Indonesia mendapat keuntungan. Contoh seperti Mei 2004 ketika harga BBM naik menjadi 41 dollar AS/barel, pemerintah mendapatkan peningkatan keuntungan 21,5 trilyun. Kenaikan tersebut juga memang menaikkan subsidi yang harus ditanggung pemerintah menjadi sekitar 15,5 trilyun. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah masih untung 6 trilyun. Namun pemerintah menganggap selisih keuntungan yang harusnya lebih besar dianggap sebagai kerugian (Revrisond Baswir, Pengamat ekonomi)
3. Sampai saat ini perhitungan selisih antara ekspor dan impor migas Indonesia menunjukkan Indonesia masih mengalami surplus dari penjualan minyak ke luar negeri. Perbandingan ekspor dan impor migas Indonesia tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: US\$ 12,0 milyar

dan US\$ 6,0 milyar (2002), US\$ 15,2 milyar dan US\$ 7,8 milyar (2003), US\$ 19,6 milyar dan US\$ 11,5 milyar (2004). Pendapatan ekspor Indonesia senantiasa lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran impor migas setiap tahunnya sekitar 6-8 milyar dollar Amerika (Revisond Baswir, Pakar Ekonomi)

4. Tidak ada jaminan kompensasi BBM akan tepat sasaran. Pemerintah belum memiliki data tunggal masyarakat miskin ditambah lagi struktur yang masih belum bersih dari KKN membuka peluang penyimpangan penyaluran kompensasi BBM. Tahun 2003 yang tepat sasaran hanya sekitar 15-30% saja.
5. Kenaikan harga BBM memiliki efek domino kenaikan harga-harga lain. Bahkan informasi terakhir, Dirut PLN mau menaikkan harga listrik disebabkan kenaikan harga BBM. Hal ini jelas memberatkan rakyat kecil
6. Pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM membebani APBN. Faktanya justru yang sebenarnya paling membebani APBN adalah pembayaran pokok dan bunga utang yang besarnya sampai 30% APBN, padahal itu merupakan subsidi terhadap konglomerat hitam pengemplang BLBI yang berjumlah ratusan trilyun

7. Harga minyak dalam negeri tidak harus sama dengan luar negeri karena paradigmanya berbeda. Ke dalam negeri paradigmanya adalah pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, sedangkan ke luar negeri paradigmanya adalah bisnis. Jadi merupakan hal yang wajar apabila harga dalam negeri lebih murah dari harga internasional
8. Jika harga BBM dalam negeri lebih murah, bukannya justru mengundang investor karena biaya produksi lebih murah?
9. Pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM dinikmati mayoritas oleh orang kaya, padahal ini disebabkan oleh struktur ekonomi Indonesia yang masih timpang. Dalam struktur ekonomi yang timpang, semua jenis subsidi akan dinikmati mayoritas oleh orang kaya
10. Kompensasi dana BBM berimplikasi terhadap perubahan APBN. Sedangkan menurut UU No 36 tahun 2005, perubahan APBN harus mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah belum mendapatkan persetujuan DPR, ini jelas merupakan pelanggaran terhadap UU No 36 tahun 2005

- 11.**Kenaikan BBM menyebabkan kenaikan 2% rakyat miskin. Akan terjadi peningkatan jumlah rakyat miskin dari 37,43 juta jiwa menjadi 40 juta jiwa (Analisis Biro Pusat Statistik). Ini jika dihitung dengan standar kemiskinan dari BPS yang standarnya penghasilan kurang dari Rp.5000,00/hari. Jika dihitung dengan standar World Bank yang menetapkan kemiskinan jika penghasilan kurang dari 2 US\$ (Rp.19.000,00)/hari maka kemiskinan rakyat Indonesia menjadi jauh di atas 60% rakyat Indonesia!!!
- 12.**Merupakan sebuah keajaiban jika Pertamina yang melakukan monopoli penjualan BBM mengalami kerugian. Sudah merupakan rahasia umum, Pertamina mengalami inefisiensi luar biasa. Sampai sekarang Pertamina belum pernah diaudit publik
- 13.**Kenaikan harga BBM menunjukkan kemalasan pemerintah untuk mencari solusi-solusi cerdas untuk menutupi defisit APBN. Pemerintah lebih memilih cara paling mudah tapi paling memberatkan rakyatnya sendiri. Padahal, masih ada cara lain yang bisa dilakukan seperti peningkatan pajak, efisiensi Pertamina, Pemberantasan korupsi (tahun 2003

menurut BPK, kebocoran APBN sekitar 150 trilyun), dan lain-lain.

Perubahan yang dijanjikan SBY memang terbukti, tapi baru perubahan harga-harga menjadi lebih mahal, pengangguran meningkat, drop out sekolah meningkat, kemiskinan meraja lela dan sebagainya. Di sisi lain bencana seolah tak henti menimpa bangsa ini. Apakah ini bukti ketidakberkahan negara yang dibiayai oleh utang penuh riba? Naudzu billah!

Perjuangan belum usai!

Bangkit! Lawan! Hancurkan Tirani!

Jatinangor, Maret 2005

# **DETASEMEN 88 VS HAM DI INDONESIA<sup>15</sup>**

Oleh : M. Ikhlas Thamrin dan Mulyanto

Tentunya dunia tidak akan lupa dengan tragedi 11 September 2001 ketika gedung megah WTC di Amerika Serikat ditabrak oleh pesawat komersil yang mengakibatkan gedung tersebut hancur. Presiden AS langsung mengatakan bahwa pelaku tindakan tersebut adalah jaringan teroris Al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden, maka di deklarasikanlah perang melawan teroris sampai detik ini dengan AS sebagai panglima perangnya.

Tragedi peledakan ternyata juga dialami oleh Indonesia pada tahun 2002 dengan Bali yang menjadi sasarannya. Dunia pun mengutuk tindakan tersebut, maka waktu itu Presiden Megawati menjadi sorotan dan mengalami intervensi yang semakin kuat dari dunia internasional. Akhirnya pada Rezim ini Perppu di keluarkan

---

<sup>15</sup> Judul dan isi dari artikel ini merupakan ikhtisar dari karya tulis berjudul Korelasi Antara Kinerja Detasemen 88 Dalam Menangkap Tersangka Teroris Dengan Perkembangan HAM di Indonesia yang diikutsertakan dalam lomba karya tulis HAM “Munir Award” Tingkat Nasional Di Unibraw dan menjadi Juara 1.

yang mengatur tentang anti Teroris. Tetapi keberadaan Perppu ini ternyata belum mampu untuk memberangus para teroris, bahkan intensitas terror semakin meninggi, sebutlah Bom Marriot, Bom Bali 2 dan serentetan bom-bom yang lain. Bersamaan dengan itu, Polri berhasil menangkap para pelaku Bom Bali hingga akhirnya didasarkan pada dua hal yakni masih rawannya tindakan teroris di Indonesia dan “keberhasilan” Polri dalam menangkap pelaku pemboman Bali 1 maka AS menyediakan bantuannya dan bekerjasama dengan Polri untuk membentuk pasukan khusus langsung dibawah Polri yang bernama Pasukan Detasemen 88.

Tugas utama dari Detasemen 88 ini adalah menangani ancaman bom hingga penangkapan teroris, dan salah satu prestasi terbesar tentunya kita masih ingat dengan berhasil membunuh Dr. Azhari yang disebut-sebut sebagai gembong teroris Indonesia. Tetapi di balik kesuksesan tersebut ternyata keberadaan pasukan khusus ini mengalami pendapat pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro keberadaan pasukan ini adalah untuk mengantisipasi adanya terror lebih dini dan bagi kalangan yang kontra keberadaan pasukan ini menggelisahkan karena penangkapan tanpa prosedur yang benar,

penangkapan dilakukan mirip dengan penculikan, sampai pada gaya-gaya orde baru.

Kasus ini mungkin akan memberikan penjelasan tentang pendapat yang kontra tadi yang diambil dari data dari Front Perlawanan Penculikan (FPP) Surakarta, ada 11 orang diambil paksa oleh Detasemen 88 yang keberadaannya tidak jelas. Seorang korban bernama Heri Sutopo, yang telah ditangkap dan kemudian dilepas lagi mengaku sempat dipukuli dan diancam akan dibunuh jika tidak bisa menunjukkan keberadaan seseorang (TEMPO, 1 Juli 05). Ada lagi seperti Jejen Ahmad Jaelani, dan Fahrudin warga Jakarta Utara ditangkap Detasemen 88 sehubungan wajahnya yang mirip dengan Dr. Azahari bin Husin. Penangkapan Jejen hampir berubah menjadi amuk massa, dan akhirnya rumah digeledah dan hanya menemukan dua tas berisi pakaian. Pihak keluarga Jejen merasa sangat terkejut dan yakin Jejen bukan jaringan teroris, akhirnya terbukti bahwa Jejen bukanlah Dr. Azahari bin Husin (Liputan6.com. tanggal 14 November 2005).

Dari dua kutub pendapat ini maka dapat menyimpulkan bahwa adanya pasukan Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris ada dua kemungkinan

yang akan terjadi, pertama adalah jika terbukti maka pasukan ini mencetak suatu prestasi, tetapi jika tak terbukti dari kasus yang ada dilepas begitu saja dan bagi detasemen 88 hal ini tidak ada persoalan, tetapi jika dilihat dari korban maka yang akan ditimbulkannya adalah stigma negatif dari masyarakat, orang tersebut tidak diajak bergaul oleh masyarakat setempat sehingga cenderung dijauhi.

Hal inilah yang akan dikaji dalam perspektif HAM dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti ini : apakah kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris melanggar HAM? Adakah upaya dari detasemen 88 untuk merehabilitasi tersangka teroris yang tak terbukti? Dan bagaimana korelasi antara kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris dengan perkembangan HAM di Indonesia?

Sebelumnya, penulis akan menerangkan dulu tentang landasan pijak dalam menjawab tiga pertanyaan tersebut diatas. Detasemen 88 adalah suatu unit antiteroris dibawah Polri yang bertugas mengatasi gangguan teroris, berkekuatan sekitar 400 personel, keanggotaan bersifat rahasia, pembentukan di seluruh Polda, dilatih CIA, FBI, dan Secret Service. Tidak hanya itu menurut majalah *Far*

*Eastern Economic Review(FEER)* edisi 13 November 2003 pasukan ini setara dengan Paskhas (TNI AU), Kopassus (TNI AD) dan Marinir ( TNI AL). Biaya yang dihabiskannya adalah sekitar Rp. 150 milyar yang dibantu sepenuhnya oleh AS mulai dari pendanaan, pelatihan hingga penyediaan peralatannya. Dana yang didapat dari AS tersebut di gunakan untuk pembelian properti berupa peralatan komunikasi anti radar, kamera yang dapat menembus kegelapan serta senjata model Heckler dan Koch Mp5 dan Remington 700. Untuk mobilitas, unit khusus ini dilengkapi sebuah pesawat angkut khusus jenis C-130 (Kompas 12 November 2003). Sempat diusulkan pembentukan unit khusus ini dengan biaya sepenuhnya dari AS karena Polri telah berhasil menangkap pelaku Bom Bali 1 tetapi Mabes Polri membantah isu ini.

Lalu dinamakan Detasemen 88 karena memiliki filosofinya tersendiri, seperti diambil dari jumlah korban bom Bali yang tewas terbanyak yakni 88 warga Australia (1 negara), angka "88" tidak terputus dan terus menyambung dimana pekerjaan Detasemen 88 terus dan tidak kenal berhenti, dan angka "88" menyerupai borgol artinya Polri

serius menangani kasus terorisme. (Kompas 27 Agustus 2004)

Tentang definisi terorisme, ternyata sampai detik ini belum ada kesepakatan internasional definisi yuridis kata terorisme. Tetapi menurut Kardjito Dolopo unsur-unsur terorisme adalah kegiatan teror luar biasa terhadap masyarakat luas, kegiatan direncanakan terlebih dahulu, kegiatan bermotif politik bukan kriminal biasa, ditujukan kepada warga sipil bukan militer, oleh kelompok nonpemerintah dan bukan tentara negara. Tetapi jika kita melihat sejarah terorisme ternyata usianya sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Istilah terorisme pertama kali digunakan pada tahun 1795 pada masa revolusi Prancis yakni pemerintahan teror dengan penggunaan Pisau guilotin untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membantai musuh-musuhnya. Jadi disini semua orang berpeluang untuk melakukan tindakan terror dan bukan pada golongan agama tertentu seperti yang saat ini stigma teroris selalu diidentikan dengan islam.

Tentang Hak Asasi Manusia, menurut UU 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada intinya HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati,

universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Sehingga HAM tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun termasuk negara dalam hal ini detasemen 88, karena Adnan Buyung Nasution pernah mengatakan bahwa HAM merupakan tujuan negara yakni negara ada untuk manusia bukan manusia untuk Negara karenanya HAM sama dengan substansi UUD seperti pada ungkapkan metafora, kalau UUD diibaratkan sebuah sungai, maka HAM merupakan air yang mengalir di dalamnya, tanpa air maka sungai itu sekedar menjadi parit yang panjang dan berliku-liku.

Perkembangan HAM di Indonesia kita bisa mencermati sejak reformasi 1998 isu mengenai HAM berkembang pesat dan sering menjadi objek penelitian berbagai Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah oleh Paguyuban Hak Asasi manusia (PAHAM) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang berkesimpulan bahwa perkembangan HAM di Indonesia mengalami masa pasang surut (Bagir Manan, 2001: 222)

Setelah penulis menguraikan landasan pijak, kita akan memasuki pembahasan tentang pertanyaan pertama yakni Kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris dari Perspektif HAM. Prosedur penangkapan dalam Pasal 1 butir 14 dan butir 20 KUHAP : Perintah penangkapan tidak boleh sewenang-wenang, adanya surat perintah tersendiri yang dikeluarkan sebelum penangkapan. Karena Tindak Pidana terorisme merupakan Tindak pidana khusus maka berlaku asas *lex specialist derogate lege generale* sehingga yang digunakan adalah regulasi pada Pasal 25 Ayat (1) UU No.15/2003 : *bahwa, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.*

Jika kita menyimak realitas yang ada, penangkapan tersangka teroris oleh Detasemen 88 memiliki dua kemungkinan, yang pertama setelah ditangkap lalu terbukti maka akan ada proses yang lebih lanjut. Tetapi jika setelah ditangkap lalu tak terbukti yang dilakukan oleh Detasemen 88 di lepas begitu saja. Jika dikontekskan dengan HAM, maka kinerja yang dilakukan oleh Detasemen 88 dalam

melakukan penangkapan tersangka teroris mengarah pada pelanggaran HAM. Indikatornya seperti pada kasus diawal tadi yakni adanya penangkapan mengedepankan unsur praduga bersalah, dilakukan mirip penculikan tanpa surat penangkapan, terdapat pemukulan dan ancaman. Dari indikator ini maka terjadi pelanggaran terhadap HAM yakni hak bebas dari kekerasan sebagaimana Pasal 33 UU 39 Th 1999 tentang HAM *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman perlakuan yg kejam, tdk manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”*

Menjawab pertanyaan kedua tentang upaya Detasemen 88 dalam merehabilitasi tersangka Teroris yang tak terbukti, penulis akan menampilkan salah satu kasus yang terjadi: ada seorang guru ngaji ditangkap Detasemen 88 yg dilakukan secara tidak professional karena aktivitas mengajar itu dicurigai sebagai aksi terorisme. Kapolda Maluku Brigjen Pol Adityawarman mengakui, aparatnya telah salah menangkap warga yang dicurigai sebagai teroris. Padahal, dalam masyarakat orang itu terkenal berperilaku baik dan suka mengajar anak-anak tentang

agama Islam. Ironisnya, setelah diperiksa, ternyata tidak terbukti dan akhirnya dilepas begitu saja ([www.malra.org](http://www.malra.org) )

Dari kasus diatas tadi, Detasemen 88 jika salah menangkap tersangka teroris ternyata dilepas begitu saja dan tak ada proses rehabilitasi. Hal ini sangat fatal karena ini akan berdampak pada diri korban seperti stigma negative, efek psikologis, hampir dihajar massa karena mirip teroris, dan tentunya melanggar HAM korban. Jadi, Rehabilitasi dari Detasemen 88 berdasarkan data yang diperoleh terhadap beberapa kasus yang ada tidak ditemukan rehabilitasi yang dilakukan pihak Detasemen 88 selaku aparat penegak hukum.

Menjawab pertanyaan yang ketiga tentang tentang analisis korelasi antara kinerja Detasemen 88 dalam menangkap teroris dengan perkembangan HAM di Indonesia penulis menemukan dua indikator, yang pertama kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris mengarah pada pelanggaran HAM, karena penangkapan dilakukan dengan mengedepankan unsur praduga bersalah, dilakukan mirip dengan penculikan, terdapat pemukulan dan ancaman tanpa disertai surat penangkapan dalam prosedur penangkapan. Indikator kedua adalah tidak

adanya upaya dari Detasemen 88 untuk merehabilitasi tersangka teroris yang tak terbukti.

Jadi, korelasi antara kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris dengan perkembangan HAM di Indonesia ialah bahwa ketidakprofesionalan kinerja Detasemen 88 berimplikasi negatif terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Hal ini memberikan makna bahwa selama ini Detasemen 88 cenderung melukai HAM di Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris mengarah pada pelanggaran HAM khususnya hak bebas dari kekerasan yakni setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Upaya Detasemen 88 untuk merehabilitasi tersangka teroris yang tak terbukti berdasarkan data yang diperoleh terhadap beberapa kasus, tidak ditemukan sama sekali, selama ini bagi yang tak terbukti dilepas begitu saja. Dan korelasi antara kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris dengan perkembangan HAM di Indonesia ialah bahwa ketidakprofesionalan kinerja

detasemen 88 berimplikasi negatif terhadap perkembangan HAM di Indonesia

Maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran seperti berdasarkan kesimpulan poin pertama, maka kinerja Detasemen 88 dalam menangkap tersangka teroris harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghormati nilai-nilai HAM khususnya hak bebas dari kekerasan, disertai surat penangkapan yang prosedural sehingga ke depan tidak lagi ditemukan model perlakuan yang merendahkan martabat manusia; Perlu adanya upaya dari pihak Detasemen 88 untuk memberikan rehabilitasi kepada tersangka teroris yang salah tangkap dengan melakukan publikasi ke masyarakat setempat dan media massa sehingga korban tersebut tidak dicap sebagai teroris; Mengingat rapor HAM Indonesia masih dinilai negatif, jangan sampai kehadiran Detasemen 88 justru memperparah keadaan, sehingga dibutuhkan pengoptimalan kinerja, dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan menjunjung tinggi HAM.

**Solo, Mei 2006**

# **MENCINTAI KEMBALI INDONESIA**

Oleh : Muhammad Ikhlas Thamrin

Papua membara, Australia berulah dengan memberikan visa kepada 42 warga Papua dan diikuti dengan membuat karikatur SBY yang disimbolkan sebagai anjing yang memperbudak yang diduga sebagai orang Papua.

Bersamaan dengan itu pemerintah dengan APINDO melalui ketuanya Sofyan Wanandi menginginkan revisi UU Ketenagakerjaan sebagai bentuk upaya untuk memancing investor asing sehingga jika para investor dapat masuk ke Indonesia maka lapangan kerja akan semakin terbuka lebar. Begitu kira-kira logika yang digunakan oleh Sofyan Wanandi dan juga disepakati Wapres Jusuf Kalla.

Tidak hanya itu, tentu kita masih ingat bagaimana blok Cepu yang menyimpan asset kekayaan bangsa ini trilyunan rupiah ternyata hak pengelolaannya dikuasai oleh Exxon yang merupakan perusahaan asing. Di Papua PT Freeport yang telah beroperasi sejak tahun 1968 telah mengeruk kekayaan alam negeri ini.

PT Newmont juga tak ketinggalan dalam mengeruk kekayaan alam ini walaupun rakyat telah banyak yang melakukan protes tetapi tetap saja sepertinya keadilan belum berpihak kepada pribumi.

Tidak sekedar kekayaan alam yang dieksploitasi, perusahaan-perusahaan milik Negara yang sifatnya strategis seperti telekomunikasi, perbankan, sampai pada maskapai penerbangan akan dijual. Bahkan dalam kasus penyehatan perbankan yang sempat mengalami krisis saat moneter dahulu, pemerintah mengucurkan dana sebesar 600 trilyun.

Ironisnya seperti dikatakan oleh SBY hanya kurang lebih 20 persen saja yang kembali ke kas negara, selebihnya dikorupsi. Tetapi kebijakan yang diambil justru menganakemaskan pengemplang utang dengan memberikan waktu sampai akhir tahun untuk melunasi utangnya padahal seperti kita ketahui sudah berungkali pemerintah memberikan waktu tetapi dikhianati.

Khusus untuk persoalan privatisasi BUMN, ambisi pemerintah telah semakin kuat dengan mencantumkan bab khusus pada UU No 19/2003 tentang BUMN yang berisi privatisasi BUMN. Lihatlah BUMN strategis yang telah

berhasil dijual sejak tahun 2002: Pupuk Kaltim, Kimia farma, Telkom, Indosat, Angkasa Pura, Semen Gresik, dan Indocement.

Tragisnya hasil penjualan BUMN tersebut ternyata tak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan untuk menyetor. Sebutlah contoh BCA, pemerintah mengucurkan yang bunga pertahunnya saja mencapai Rp. 10 trilyun tetapi transaksi penjualan BCA hanya Rp5,6 trilyun. Dan lebih tragis lagi keluarga Salimlah yang menguasai kembali saham BCA padahal keluarga Salim adalah orang yang sudah tidak diperbolehkan mengelola bisnis perbankan dan harus bertanggungjawab atas krisis dan skandal KKN yang membangkrutkan BCA. (Marwan Batubara dalam artikelnya Neoliberalisasi dan masa depan ekonomi Indonesia)

Ulah segelintir yang merupakan perpaduan pejabat dan konglomerat hitam telah menghasilkan struktur lapisan social yang sangat timpang. Ini bisa dilihat dari data seperti ini : jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari US\$2/hari masih meliputi 60% penduduk. Sebaliknya deposito dengan volume terkecil Rp. 5milyar,

yang meliputi 95% jumlah seluruh deposito, diperkirakan hanya dimiliki oleh 14.000 orang terkaya di Indonesia.

Yang semakin menyedihkan adalah struktur APBN kita ternyata hampir sepertiganya hanya untuk membayar utang yang jika dilihat dari tahun 2004 misalnya sekitar 140 trilyun digunakan untuk membayar utang tersebut yang sesungguhnya merupakan subsidi terselubung pula kepada sekitar 14.000 pemilik deposito seperti yang disinggung diatas. Utang tersebut terutama disebabkan oleh bantuan pemerintah untuk kebutuhan BLBI dan rekapitulasi bank. Sederhananya sesungguhnya yang membangkrutkan negara ini adalah ulah dari oknum bangsa ini terutama pejabat dan pengusaha hitam itu.

Ternyata ulah oknum hitam bangsa ini sebenarnya adalah pelaksana saja dilapangan karena sesungguhnya yang menyiapkan desainnya adalah kekuatan asing di bawah komando AS. Lihatlah produk UU yang berhasil digolkan: UU No 22/2001 tentang Migas yang didanai USAID dan Bank Dunia(*Energy Sector Governance Strengthened*, US\$4juta), UU No. 20/2002 tentang kelistrikan didanai Bank Dunia dan ADB (*Power Sektor Restructuring*, US\$450juta), UU No 19/2003 tentang BUMN

didanai oleh Price Waterhouse Coopers, UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air didanai Bank Dunia (*water structural Adjustment Loan* US\$350juta, UU tentang Persaingan Usaha didanai oleh Bank Dunia (Marwan Batubara:idem).

Tidak hanya pada sektor ekonomi dan politik dari bangsa ini yang dirusak, tetapi wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke juga sedikit demi sedikit diganggu. Sebutlah masalah yang paling aktual adalah Papua, beberapa senator di Australia mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia, walaupun Jhon Howard Perdana Menteri Australia secara verbal mendukung integritas RI tetapi kenyataannya hal itu tidak terlihat dari upaya aktif dari dia untuk mendinginkan suasana yang sampai saat ini panas.

Dari semua permasalahan diatas, yang paling dirugikan adalah rakyat itu sendiri. Mari kita tengok naiknya harga BBM yang sangat mencekik leher tahun kemarin, dan saat ini ketika UU naker akan direvisi oleh pemerintah yang hal ini sungguh akan semakin membuat rakyat terpuruk.

Semua kenyataannya ini seakan menggariskan sebuah kenyataan yang lebih pahit lagi: rakyat Indonesia

sedang menjadi budak ditanah airnya kembali! Jika demikian apa bedanya kita saat ini dengan zaman penjajahan dulu.

Jika menengok sejarah dulu, awal sebelum pemerintah Belanda menguasai wilayah ini ternyata sebuah perusahaan bernama VOC terlebih dahulu yang bercokol untuk melakukan bisnis. Setelah memahami kenikmatan dari tumpah ruahnya kekayaan alam dari tanah air ini, akhirnya pemerintah Belanda datang dengan satu tujuan melakukan praktek imperialisme menjadikan wilayah Indonesia untuk dikuasai sehingga disinilah penjajahan itu berlangsung. 350 tahun Belanda melakukan itu.

Jika dilihat lebih dalam lagi, lamanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ternyata ditopang juga dari keberpihakan elit-elit pejabat atau raja dulu untuk bekerjasama dengan kolonial. Saya sangat yakin kerjasama itu karena para pejabat atau raja-raja dulu menikmati kekayaan sebagai pemberian atas loyalitasnya dari penjajah. Dan rakyat kita yang akhirnya menjadi budak.

Saat ini: *Nothing new* kata Refrison Baswir. Tidak ada yang baru dalam kehidupan berbangsa kita yang telah merdeka selama 61 tahun. Perusahaan multinasional milik

asing dan para pejabat dan pengusaha yang hanya memikirkan perutnya saja telah berkolaborasi. Sedikit demi sedikit bangsa ini dijual, rakyat dijadikan tumbal. Kenyataan saat ini persis saat penjajahan dulu.

Tapi telah menjadi *sunnatullah* pasti ada orang yang baik diantara bangsa ini. Ada yang gelisah menyaksikan kenyataan ini, dan akhirnya ada yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Jika dulu kita mengenal Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanudin, Teuku Umar, Cut Nya Dien, lalu disusul oleh Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Tan Malaka dalam merebut kemerdekaan melawan penjajah. Mereka tidak hanya berbicara tetapi melawan yang akhirnya penjara dan penyiksaan menjadi resiko yang harus dihadapi.

Saat ini, setelah kita memahami atas realitas kebangsaan yang sedang “dijajah”, harkat, derajat dan martabat bangsa ini diijak-injak. Maka satu-satunya asset yang masih tersisa adalah orang-orang yang baik, yang masih hidup nuraninya, masih siap untuk berkorban untuk bangsa untuk bangkit melawan. Hanya persoalannya adalah orang-orang baik tersebut bisa jadi masih terserak, masih sendiri-sendiri dalam meneriakkan perlawanan.

Sejarah mengajarkan kepada kita, seperti yang dikatakan oleh Anhar Gonggong bahwa perlawanan yang sendiri-sendiri akan minimalis hasilnya. Bisa dilihat ketika sebelum tahun 1908 perlawanan masih di daerah, belum terkonsolidasikan dengan baik hasilnya ratusan tahun belum nampak hasilnya. Maka inisiasi untuk mengumpulkan organisasi perlawanan muncul dan akhirnya dideklarasikan Organisasi Budi Utomo yang lebih mengedepankan permasalahan bangsa bukan daerah lagi walaupun organisasi ini diisi oleh saudara-saudara di daerah dengan beragam coraknya.

Hal inilah yang menjadi inspirator persatuan perjuangan, maka 20 tahun kemudian pemuda-pemuda juga berhasilkan menyatakan persatuannya yang dikenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 17 tahun kemudian tepatnya 17 Agustus 1945 bangsa ini diproklamasikan. Dari rentetan sejarah ini ada dua hikmah yang bisa diambil bahwa persatuanlah dengan dilandaskan pada nurani dan kesamaan visi,serta pemudalah yang menjadi kunci dari itu semua.

Saya sangat yakin, seperti Anis Matta dalam bukunya Mencari Pahlawan Indonesia, bahwa orang itu

telah disini, yakni saya dan anda semua, hanya yang belum dikerjakan adalah berjanji pada negeri ini untuk melakukan perjuangan meyelamatkan bangsa ini.

Janji adalah kerja awal untuk mencintai, maka Saya siap untuk memulai, mari kita mencintai Indonesia, siapa selanjutnya?

**Solo, Mei 2006**

# DEMOKRASI BERBASIS NILAI

Oleh : Muhammad Ikhlas Thamrin

Amien Rais dkk kecewa setelah keinginannya untuk bertemu dengan SBY gagal, bahkan timbul konflik baru antara keduanya walaupun akhirnya Amien Rais telah memaafkan SBY dan Sudi Silalahi. Akhirnya Amien Rais berencana akan mengadakan suatu acara bertepatan dengan hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei dengan mengusung agenda besar tentang kemandirian bangsa.

Tidak hanya tokoh-tokoh senior tersebut yang merasa kecewa terhadap kehidupan berbangsa aktual ini, puluhan ribu buruh juga sebelumnya telah mengadakan demo besar-besaran menolak revisi RUU Naker yang lebih berorientasi pada pengusaha walaupun akhirnya pemerintah telah bersikap membatalkan rencana tersebut. Tetapi rencananya buruh akan melakukan demo besar-besaran pula untuk memperingati hari buruh se-dunia tanggal 1 Mei.

Dikalangan umat islam, penolakan terhadap terbitnya majalah Playboy berlangsung dengan marak bahkan juga disertai dengan tindakan yang mengarah pada anarkis. Penerbit majalah ini harus ditutup dan dicabut

izinnya karena telah melanggar dan melukai aspirasi umat ini, begitu tuntutananya.

Bersamaan dengan itu, pro kontra terhadap RUU pornografi dan pornoaksi juga mengalami hal yang serupa dengan masing-masing pihak melakukan *"show of force"* dan mengklaim bahwa masing-masing pihak paling banyak. Bahkan ada yang mengancam jika ini disahkan maka akan ada satu wilayah yang akan lepas dari NKRI.

Kepala desa juga tak ketinggalan untuk melakukan demonstrasi, bahkan kali ini yang hadir ribuan untuk "mengepung" gedung MPR/DPR dengan tuntutan agar para Kades tersebut dapat masuk dalam partai politik. hasilnya cukup berhasil, regulasi tentang itu saat ini dilakukan peninjauan oleh MA.

Beberapa contoh diatas telah memberikan makna kepada kita tentang dua hal, yakni pertama tentang pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang merasa kecewa adalah cenderung dengan pendekatan aksi massa dengan menjadikan pemerintah dalam posisi berhadapan. Dan kedua adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bukan lagi kebijakan yang berbasis

kepada kebaikan bangsa yang menaungi seluruh elemen didalamnya.

Dua makna tersebut bertemu pada satu titik yang sama yakni atas nama demokrasi. Bahwa semua yang dilakukan telah ada dalam jalur yang legal menurut konstitusi, sehingga jika dalam mengaktualisasikan kekecewaan dengan melakukan aksi massa ada yang mencoba menghalangi maka diklaim akan menciderai demokratisasi.

Pihak pertama seakan-akan berpendapat bahwa semua akan dimenangkan dengan logika mayoritas. Sehingga hal ini akan berimplikasi kepada bentuk-bentuk memenangkan wacana di media dan pengerahan massa. Sehingga rumus kebenaran menjadi: siapa yang menguasai media dan bermodal banyak untuk mengerahkan massa maka bisa dipastikan dia akan memenangkan pertarungan di era demokrasi ini.

Lalu di pihak kedua yakni pemerintah juga seakan-akan berpendapat bahwa atas nama demokrasi biarkanlah aksi massa itu berlangsung sebagai wujud penghargaan atas proses demokrasi, tetapi tetap dengan kebijakan yang dianggap baik oleh pemerintah. Lihatlah kebijakan tentang

BBM, penyerahan operasional Cepu kepada Exxon Mobil, Freeport, Newmont, atau melakukan hutang kembali.

Atas nama demokrasi, pemerintah juga melakukan iklan di beberapa media cetak maupun nasional, bahkan menyewa ulama, pakar dan artis untuk menjadi corong rasionalisasi kebijakan tersebut. Partai pendukung pemerintah juga melakukan pembelaan. Intinya semua mencoba untuk bahu membahu mensukseskan kebijakan pemerintah. Dan akhirnya logika kebenaran tetap sama yakni kuasai media, bermodal banyak, dan kerahkan massa!

Pertanyaan terbesar yang harus diajukan adalah apakah wajah kehidupan berbangsa tentang mendefinisikan kebenaran adalah dengan meletakkanya pada penguasaan media dan massa sebagai implementasi dari logika mayoritas berdemokrasi? Jika kita tidak menginginkannya adakah konsep yang lebih baik?

Jika kita mengikuti pendapat Nurkholis Madjid bahwa sebenarnya walaupun bangsa ini telah merdeka tetapi sesungguhnya kehidupan berbangsa ini masih terus melakukan penjadian diri (*In Making*). Pencarian untuk menjadikan bangsa ini lebih baik. Harus diakui bahwa

demokrasi merupakan konsep bernegara yang saat ini menjadi pilihan primadona bagi semua bangsa. Tetapi apakah kita harus "menelan bulat-bulat" konsep tersebut tanpa difilteralisasi.

Demokrasi memang adalah sebuah paradoks, begitu kata Eep Saefulah Fatah dalam bukunya *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru* (2000). Paradoks karena disatu sisi mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik namun di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus.

Eep mengajukan sebuah pertanyaan yang krusial yakni bagaimana paradoks ini didamaikan? Karena jika hanya satu sisi yang ditonjolkan seperti keteraturan, stabilitas dan konsensus maka ia dibentuk secara ironis dan paradoksal oleh pemaksaan, koersi, represi dan intimidasi. Sehingga Eep lebih menitikberatkan pada hal memperlakukan demokrasi itu sendiri, bahwa demokrasi bukanlah sebagai tujuan sakral tetapi sebagai sebuah proses atau cara. Dari pemahaman ini maka keteraturan, stabilitas dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk

diposisikan sebagai hasil bentukan proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual.

Hanya saja yang perlu ditekankan adalah dalam proses-proses tersebut jika tidak dilandasi oleh sandaran atau landasan yang difahami dan menjadi komitmen bersama maka yang akan terjadi adalah seperti kasus-kasus diatas. Masing-masing pihak akan memiliki landasan yang berbeda dalam mengapresiasi persoalan yang ada.

Kata kunci dari ini adalah landasan nilai. Dengan landasan nilai yang difahami dan menjadi komitmen bersama maka inilah yang menjadi proses tersebut menjadi lebih langgeng. Landasan nilailah yang akan menjadi penengah dari perseteruan tersebut karena dengan nilai maka pertentangan-pertentangan tersebut tidak akan ada karena ia telah tereduksi dengan sendirinya, dan tidak perlu menjadi agenda nasional.

Lalu pertanyaan kemudian adalah nilai apa yang menjadi landasan dalam berdemokrasi, apalagi dalam kehidupan berbangsa yang majemuk seperti Indonesia? Saya melihat nilai-nilai tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan Sosial yang

harus menjadi landasannya. Nilai ini tidak bisa dipisah-pisah tetapi harus menjadi satu kesatuan.

Jika nilai ini difahami secara utuh dan menjadi komitmen di setiap anak bangsa ini maka kita tak perlu lagi ada pro kontra terbitnya majalah *Playboy* karena seharusnya majalah itu dengan sendirinya harus tereduksi karena tidak sesuai dengan nilai tentang kemanusiaan yakni menjunjung harkat dan martabat setiap manusia dalam hal ini adalah perempuan yang dalam majalah tersebut perempuan dijadikan objek eksploitasi.

Atau pada soal kemandirian bangsa, seharusnya pemerintah harus sadar diri karena hal ini menyangkut tentang keadilan sosial sehingga semua kekayaan bangsa ini diperuntukkan seluas-luasnya untuk negeri ini secara adil dan merata, bukan justru menjadikan bangsa ini hanya menjadi objek eksploitasi dari bangsa lain.

Mungkin sebenarnya nilai itu telah ada saat ini yang termuat dalam teks Pancasila, tetapi kehidupan bangsa ini seakan-akan menerima bulat-bulat tentang kaidah mayoritas dalam demokrasi sehingga semua tuntutan dipraktekkan dengan pendekatan mayoritas pula.

Demokrasi yang berbasis pada nilai akan dengan sendirinya memfilter mana-mana saja yang layak diselesaikan dengan kaidah mayoritas sehingga kaidah mayoritas adalah merupakan jalan terakhir bukan sebagai awalan. Demokrasi yang berbasis pada nilai akan memberikan jaminan kepastian tentang keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa daripada menyerahkan demokrasi pada kaidah mayoritas yang nantinya akan berujung pada kehidupan berbangsa yang liar.

Jalan untuk merealisasikan itu semua adalah melakukan penghidupan kembali akan nilai-nilai tersebut. Perlu ada lagi kampanye nilai-nilai tentang ke-Indonesia-an, perlu ada pemunculan karakter berbangsa, yang semua hal ini harus meresap dalam setiap diri manusia Indonesia.

Akhirnya jika nilai-nilai itu belum menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan berbangsa ini, maka saya yakin kehidupan berbangsa akan dipenuhi dengan semangat untuk saling mengalahkan dan demokrasi akan berubah menjadi mesin pembunuh bagi bangsa ini. Sekarang tinggal memilih.

**Solo, Mei 2006**

# EVOLUSIONER AKSELERATIF

Oleh : Indra Kusumah

*Berderap dan melaju  
Menuju Indonesia Baru  
Singsingkan lengan baju  
Singkirkan semua musuh-musuh*

*Rakyat pasti menang melawan penindasan  
Rakyat kita pasti akan menang  
Rakyat pasti menang rebut kedaulatan  
Rakyat kita pasti akan menang*

## **Perubahan adalah keniscayaan**

Perubahan adalah kata kunci untuk memahami daya tahan mahasiswa untuk terus melakukan gerakan mahasiswa yang kontinyu. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan karena di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Mahasiswa senantiasa memiliki keberanian bermimpi tentang perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari mimpi

perubahan bermula sebagaimana ungkapan ahli bijak: “Mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari sebagaimana kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin”.

Keyakinan yang mendalam berjumpa dengan semangat muda revolusioner yang senantiasa bertalu-talu dalam jiwanya menjadikan pergerakan mahasiswa senantiasa disertai dinamika psikologis yang luar biasa. Ada heroisme dan kepahlawanan yang meliputi nuansa gerakan sehari-hari.

Perjuangan mahasiswa di tengah dinamika politik Indonesia yang sulit diprediksi menuntut mahasiswa memilih proses perubahan yang akan diperjuangkan. Dengan demikian mahasiswa akan memandu perubahan yang di cetuskannya sendiri. Proses perubahan yang dipilih ini akan sangat berkaitan dengan paradigma gerakan mahasiswa Indonesia.

## **Reformasi VS Revolusi**

1998 telah mencatat sejarah monumental pergerakan mahasiswa dengan menumbangkan rezim tirani dan memasang patok perubahan bernama reformasi. Mahasiswa pun tidak ingin mengulang sejarah 1966 yang

memberikan cek kosong kepada pemerintahan yang baru sehingga gerakan mahasiswa merumuskan 6 visi reformasi yang harus dilaksanakan oleh rezim baru sekaligus sebagai dasar parameter kesuksesan orde reformasi di mata mahasiswa.

Sebenarnya ada dua jalur perubahan yang bisa dilakukan bangsa ini: Reformasi atau Revolusi. Di tengah teriakan sebagian elemen anak bangsa yang menggaungkan revolusi, reformasi telah dipilih oleh mayoritas bangsa sebagai jalan menuju Indonesia baru yang berkeadilan. Dan kini istilah reformasi menjadi kata populer yang sering diungkapkan para pemimpin negeri ini.

Reformasi telah dipilih. Namun, apakah bangsa ini sudah memikirkan seluruh konsekuensi dan tahapannya? Reformasi berkonsekuensi perubahan bertahap, dalam jangka waktu yang lama dengan proses yang rumit serta kompleks. Ia menyimpan jebakan sangat serius karena memberi ruang terbuka untuk konsolidasi status quo. Ketika status quo telah terkonsolidasi, maka biasanya reformasi hanya akan menjadi mimpi. Dan sejarah hanya bisa menangis menyaksikan bangsa besar ini jalan di tempat.

Sedangkan revolusi menjanjikan perubahan singkat, mendasar, waktu yang cepat dan proses yang tidak terlalu rumit. Hanya saja, dibutuhkan prasyarat berupa dukungan kekuatan alternatif tandingan yang luar biasa. Revolusi ini tak sedikit yang harus dibayar mahal dengan darah dan air mata yang memilukan.

Kita telah memilih reformasi, maka tiada jalan lain menuju perubahan yang nyata kecuali melakukan sebuah konsolidasi elemen-elemen reformis yang kemudian membangun eskalasi gerakan masif secara sistematis dan metodologis dengan kejelasan seluruh proses dan tahapannya. Di sisi lain, perlu dilakukan proses deligitimasi kontinyu terhadap kekuatan-kekuatan status quo yang niscaya senantiasa berusaha melakukan konsolidasi.

Sebagai sebuah gerakan sosial, aktifis reformis harus selalu mampu menawarkan solusi cerdas atas berbagai permasalahan bangsa secara rasional karena orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima akal sehat. Menurut Ferree (1992) yang dikutip Laode Ida, ciri gerakan sosial dalam perspektif mobilisasi sumber daya adalah; 1) bahwa kegiatan gerakan sosial

adalah bukan hal yang spontan dan bukan tidak terorganisasi, dan 2) peserta gerakan sosial bukan tidak rasional (Ferree, 1992)

Jika tidak, kekuatan status quo yang terkonsolidasikan akan memberangus dengan mudah gerakan reformasi, atau mencatut nama reformasi karena mereka masih memiliki berbagai sarana dan kekuatan politik seperti media massa, struktur birokrasi, kebijakan masa lalu dan sebagainya.

### **Evolusioner Akseleratif**

Pertarungan di antara aktifis reformis dan status quo merupakan sebuah keniscayaan. Kalaupun kekuatan reformasi menang, maka perubahan itu bersifat evolusioner. Sangat-sangat lambat dan lama. Karena itu dibutuhkan kesabaran revolusioner untuk menapaki garis jalan reformasi. Kesabaran revolusioner ini bukan penyerahan total atas apa pun yang terjadi. Ia adalah mekanisme pertahanan diri yang memiliki kontinum dari defensif sampai ofensif. Ia juga merupakan keberanian untuk mengubah pilihan perubahan dari reformasi menjadi revolusi ketika reformasi gagal total.

Jika perubahan positif reformasi ini mampu terus dipertahankan dalam waktu yang lama, maka ia akan mengalami akselerasi luar biasa yang pada saatnya nanti bahkan lebih cepat dari revolusi sekalipun. Akan datang suatu masa ketika perubahan itu bahkan tak tertahankan oleh siapa pun. Perubahan yang meskipun lambat namun terus mengalami percepatan signifikan inilah yang kita sebut evolusioner akseleratif.

Evolusioner akseleratif merupakan karakter reformasi yang berhasil, yang tidak mampu dibendung kekuatan status quo dengan segala perangkat kekuatan kekuasaan yang mereka miliki. Untuk melakukannya merupakan sebuah mega proyek yang membutuhkan sinergisitas elemen-elemen reformis dalam jangka panjang.

### **Potret Buram Reformasi Indonesia**

Samuel Huntington menyatakan dalam bukunya '*Political Order in Changing Societies*', "Perubahan melalui reformasi lebih sulit ketimbang revolusi. Dalam revolusi dapat ditegaskan dengan cepat melalui praktik penyingkiran semua elemen lama. Namun dalam reformasi yang bersifat gradual perubahan harus dilakukan dengan

negosiasi antara kekuatan lama dengan kekuatan baru; antara para reformis dan status quois. Dalam kerangka negosiasi ini, celakanya, kekuatan (*status quois*) telah terkonsolidasikan, sementara kekuatan baru masih berserakan. Akibatnya, alih-alih demokratisasi, yang justru terjadi adalah rekonsolidasi kekuatan-kekuatan lama yang berkarakter otoritarian”

Hari demi hari telah menyertai hampir sewindu reformasi Indonesia. Namun ternyata kita menyaksikan fenomena yang mengkhawatirkan. Reformasi yang digulirkan gerakan mahasiswa mengalami mati suri:

Kekuatan status quo berhasil melakukan konsolidasi...

Transisi demokrasi terancam gagal total...

Utang luar negeri semakin menjadi-jadi...

Kemiskinan meningkat...

Pengangguran bertambah...

Korupsi menjadi-jadi...

Harga-harga semakin meninggi...

Ah, revolusi. Mengapa namamu akhir-akhir ini begitu indah menggoda?

Jatinangor, April 2005

# MENUJU KEBANGKITAN

Oleh : Indra Kusumah

Kepada para mahasiswa Indonesia....

Kepada jiwa-jiwa muda yang telah saling berjanji untuk berjuang di jalan ini...

Kepada para aktifis.....

Tulisan ini ditujukan.....

Sebuah tragedi kemanusiaan memilukan menghiasi hari-hari kita. Bukan hanya Indonesia, bahkan dunia. Hegemoni neo-imperialis, neoliberalis dan kapitalisme global mencengkeram kuat masa depan peradaban kita. Kita sudah sepakat untuk tidak diam teragau. Tiada Jalan lain kecuali satu kata: LAWAN!

Kita telah, sedang, dan akan terus menapaktifikasi jalan panjang perubahan yang merupakan kata kunci kebangkitan. Kesiapan untuk konsisten, persisten dan resisten di jalan ini dibangun atas kesadaran karakter perjuangan yang penuh beban berat (*tsiqalul a'ba*), banyak hambatan (*katsrotul 'aqabat*), sedikit pengikut (*qillatus salikin*) dan perjalanan yang panjang (*thulu thariq*).

Lama memang. Tapi ia merupakan sebuah keniscayaan yang bisa dipercepat dan sebuah kepastian yang bisa dipersingkat, karena ia adalah megaprojek kebangkitan evolusioner akseleratif.

Kita memang bukan yang pertama melewati jalan ini. Sebelumnya telah berlalu para pahlawan keagungan, pejuang keadilan dan petarung kebenaran (semoga rahmat dan kasih sayang-Nya senantiasa dicurahkan kepada mereka). Napak tilas yang kita lakukan adalah melanjutkan estafeta perjuangan para pendahulu untuk menyelesaikan megaprojek kebangkitan bangsa ini.

Maka, tiada jalan lain bagi kita kecuali terus membangun dan memperkokoh 7 (tujuh) pilar kebangkitan sebuah bangsa, yakni:

□ **Ketergugahan Spiritual (*Al Yaqdzah Ar Ruhhiyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta (*Quwatush shillah billah*) sehingga kita memiliki keterarahan spiritual. Energi keterarahan spiritual ini yang akan kita arahkan untuk mengarahkan spiritualitas bangsa sehingga masyarakat ini mengalami ketergugahan spiritual secara masif.

□ **Keterbangkitan Pemikiran (*Ash Shohwah Al Fikriyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus membuka pemikiran kita kepada kebenaran hikmah dan ilmu sehingga merasakan ketersadaran pemikiran. Energi kegundahan dan kegelisahan yang lahir dari ketersadaran pemikiran akan kita gunakan untuk menggedor struktur kesadaran bangsa ini sehingga mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka dan memperjuangkan kemuliaan harga diri mereka.

□ **Penguasaan Pemahaman Teori (*Al Ihathoh An Nadzariyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus membiasakan diri dalam pertarungan ide, pergumulan gagasan dan perkelahian wacana sehingga kita mampu membuktikan keunggulan *manhaj rabbani*, dan memformulasikan teori-teori serta rumus-rumus solutif atas berbagai permasalahan masyarakat kontemporer. Teori dan rumus alternatif solutif yang berasal dari Sang Pencipta ini akan menuntun kita sehingga perjuangan kita dibangun di atas basis rasionalitas yang kuat dan konsep yang tangguh. Sehingga seluruh dunia

mengakui dan merasakan bahwa generasi baru ini adalah solusi.

□ **Pengetahuan Medan (*Al Ma'rifah Al Maidaniyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus terjun langsung berinteraksi dan berpartisipasi dengan masyarakat kita dalam membangun kemuliaannya sehingga kita mengenal betul seluk beluk permasalahan mereka.

Kita tidak akan pernah membuat benteng dengan mereka apalagi menjadi musuh mereka. Kita mencintai mereka jauh melebihi cinta kepada diri kita dan kita pun bangga seandainya jiwa kita harus menjadi tumbal atas kejayaan umat ini.

□ **Sistematika Strategi (*Abjadiatul Khutuwat*)**

Kita telah, sedang dan akan terus melaksanakan langkah-langkah perjuangan yang sistematis dan konseptual dalam melakukan mobilitas vertikal (*At ta'biah al 'amudiyyah*) dan mobilitas horizontal (*At ta'bi'ah al afaqiyyah*) demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Abjadiat perjuangan akan menghindarkan kita dari perjuangan yang tambal sulam, tergesa-gesa dan serabutan.

□ **Soliditas Struktural (*Al Matanah At Tandzimiyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus membangun struktur pergerakan yang tangguh, kokoh dan solid dalam aspek aktifitas dan personilnya. Pergerakan yang tak mudah dipecah belah, diadu domba dan disusupi para pengkhianat.

□ **Kebangkitan Pergerakan (*An Nahdloh Al Harokiyyah*)**

Kita telah, sedang dan akan terus bergerak menjadi garda inti yang menggerakkan bangsa ini. Tatkala bangsa ini telah bergerak dengan terarah dan sinergis, maka detik demi detik hanya akan menjadi saksi semakin mendekatnya kejayaan.

Saatnya nanti, gelombang kebangkitan generasi baru kan bergemuruh di seluruh dunia. Akselerasi pergerakan yang semakin masif pun menjadi realitas tak terbendung. Keadilan akan kembali menampakkan jati dirinya yang mulia dan daya ekspansinya yang memukau.

Realitas hari ini memang masih memiliki jarak yang sangat jauh dengan idealita. Tugas kita lah untuk menikahkan idealita dengan realitas. Sehingga tidak ada jarak antara keduanya.

Itulah pekerjaan kita.

Bukan begitu, wahai Indonesia muda?

*Marilah kawan mari kita kabarkan  
Di tangan kita terenggam arah bangsa  
Marilah kawan mari kita nyanyikan  
Sebuah lagu tentang pembebasan*

Jatinangor, April 2005

# DARAH JUANG

*Di sini negeri kami  
Tempat padi terhampar  
Samudaranya kaya raya  
Tanah kami subur tuan*

*Di negeri permai ini  
Berjuta rakyat bersimbah luka  
Anak kurus tak sekolah  
Pemuda desa tak kerja*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda relakan darah juang kami  
Untuk membebaskan rakyat*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda relakan darah juang kami  
Padamu kami berjanji*

## PROFIL PENULIS



**Indra Kusumah** dilahirkan di Tasikmalaya, 21 Juli 1981. Pemuda yang senang membaca ini sejak menjadi pelajar aktif di organisasi dan sering dipercaya menjadi ketuanya seperti di GEMMI (Generasi Muda-Mudi Islam) Al-Ishlah, RG (Rijalul Ghad) PPI 7 Cempakawarna (semacam OSIS Tsanawiyah), OSIS SMUN 1 Tasikmalaya, LIPMI (Lembaga Ilmiah dan Pengembangan Masyarakat Madani) dan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran periode 2005-2006.

Pemuda yang hobi makan gehu ini pertama kali berdemonstrasi kelas 3 SMUN 1 Tasikmalaya dan langsung dipercaya menjadi Kordinator Lapangan dalam aksi siswa SMU ke DPRD Tasikmalaya menentang P3N (Pelacuran, Perjudian, Pornografi dan Narkoba). Sejak itu aksi-aksi sering diikutinya apabila yakin bahwa aksinya adalah aksi

damai untuk menentang ketidakadilan di Indonesia dan dunia.

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran ini sering mengisi training, workoshop, seminar, lokakarya dan diskusi panel di berbagai acara. Ia tergabung menjadi salah seorang trainer LMT TRUSTCO Bandung sejak tahun 2003. Ia juga menjadi penulis lepas di beberapa media massa lokal dan nasional. Salah satu tulisannya dibukukan dalam LONTAR (Kumpulan Tulisan Mahasiswa Fakultas Psikologi) edisi pertama yang berjudul 'Mengeja Kesadaran dan Perubahan'.

Masukan, kritik, komentar, tambahan dll kepada Indra Kusumah bisa dihubungi di HP 0817-225-952, e-mail [i\\_kusumah@yahoo.com](mailto:i_kusumah@yahoo.com). Bisa juga membuka [www.indrakusumah.com](http://www.indrakusumah.com).



**Muhammad Ikhlas Thamrin,**  
Presiden BEM UNS periode 2004-  
2005. Aktifis sejak masih sekolah  
dengan terlibat di Pramuka SMAN 1  
Tasikmalaya Gudep 02121-02122  
Satya Karya Laksana-Nurani Bhakti,

GEMA BABUSSALAM dan Paskibra. Mahasiswa Fakultas  
Hukum UNS ini sekarang menjadi Direktur PUSKADIKA  
(Pusat Kajian dan Studi Kebangsaan).

## CATATAN KHUSUS

E-Book REFLEKSI JIWA DEMONSTRAN ini dibagikan secara gratis. Berikut ini beberapa harapan dan catatan dari kami:

1.Silakan membaca e-book REFLEKSI JIWA DEMONSTRAN, dan jika ada masukan, pertanyaan, tambahan, bahkan bantahan silakan disampaikan via twitter saja, dengan mention @INDRAKU1945 dan @muhammadikhlas. Kita diskusi secara terbuka saja ya ^\_^

2.Setelah membaca e-book REFLEKSI JIWA DEMONSTRAN mohon untuk menyampaikan kesan dan pesan tentang e-book ini via twitter dengan mention @INDRAKU1945 dan @muhammadikhlas

3.Jika sahabat merasa e-book ini bermanfaat, silakan untuk menyebarkan dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan ke mahasiswa secara umum